

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Alesina, & Rodrik D. (1994). Distributive Politics and Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 109(2), 465–490.
- A. Bende Nabende, & Ford JL. (2003). FDI, Policy Adjustment and Endogenous Growth: Multiplier Effect from a Small Dynamic Model for Taiwan, 1959-1998. *World Development*, 26(7), 1315–1330.
- A. Diamantopoulos, & JA Siguaw. (2000). *Introducing LISREL*. Sage Publications Inc.
- A. Mubarik. (2005). Inflation and Growth. An Estimate of the Threshold Level of Inflation in Pakistan. *SBP- Research Bulletin*, 1(1), 35–43.
- Achmad, A. (2022). *Investasi adalah: Pengertian, Jenis, dan Manfaat*. Universalbpr. [https://universalbpr.co.id/blog/investasi-adalah/#:~:text=Pengertian Investasi adalah keuntungan setelah kurun waktu tertentu.](https://universalbpr.co.id/blog/investasi-adalah/#:~:text=Pengertian%20Investasi%20adalah%20keuntungan%20setelah%20kurun%20waktu%20tertentu.)
- Achmat Subekan. (2012). *Keuangan Daerah Terapi Atasi Kemiskinan* (1st ed.). Dioma.
- Adams, & Richard H. Jr. (2003). *Economic Growth, Inequality, and Poverty: Finding from a New Data* (2972).
- Agung Istri Diah Paramita, A., & Bagus Putu Purbadharmaja, I. (2015). Pengaruh Investasi Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(10), 1194-1218.
- Agussalim. (2009). *Mereduksi Kemiskinan (Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia)*. Nala Cipta Litera Bekerjasama Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan.
- Ahmad Erani Yustika. (2010). Analisis Ekonomi: Inflasi dan Ketimpangan Pendapatan. *Jurnal Uni Sosial Demokrat*.
- Alan S. Blinder, & Howard Y. Esaki. (1978). Macroeconomic Activity and Income Distribution in the Postwar United States. *The Review of Economics and Statistics*, 60(4), 604-609.
- Alfirman, & Sutriono (2006). Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Granger Causality dan Vector Autoregression. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1).
- Amalia, R., Madris, & Rahman Razak, A. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Analisis*, 4(2), 183–189.
- Amartya Sen. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

- Amira Salhab, & Lasmini Soedjono. (2013). *Pengaruh Inflasi, Jumlah Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bali*.
- Andyka Arief Pratomo. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta*.
- Anggraini, W. R. (2014). *Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Ketimpangan Regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi*.
- Anwar, A. I. (2013). *Analisis Pengaruh Financial Inclusion terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2013* (Vol. 2013, Issue June).
- Anwar, M. L., Wim Palar, S., Sumual, J. I., Ilmu, J., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2016). Pengaruh DAU, DAK, PAD terhadap Pertumbuhan ekonomi dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2).
- Arfiansyah, M. A. (2020). Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(1), 91–106.
- Arham, M. A., Kamulili, S., & Payu, B. R. (2018). *Kebijakan Fiskal (Transfer Dana Desa) Ketimpangan dan Kemiskinan Perdesaan di Indonesia*.
- Arham, Muh. A., & Hasan, Y. (2014). *Transfer Dana Desa dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia*. 1–17.
- Aris, N., Astuty, S., & Samsir, A. (2019). *Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 3 Kota di Provinsi Sulawesi Selatan*. 1–11.
- Aristanti, N. Des. (2022). *Ketahui Hubungan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Teori Harrod-Domar*. [Www.koinworks.Com](http://www.koinworks.com). <https://koinworks.com/blog/teori-harrod-domar/>
- Aritonang. (2006). *Kebijakan Investasi Sebagai bagian Pembangunan Nasional*.
- Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2), 149–167.
- Azwardi, & Sukanto. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 29–41.
- B. Huang, & K. Chen. (2012). Are Intergovernmental Transfers in China Equalizing? *China Economic Review*, 23, 534–551.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi (Investasi) (Milyar Rupiah), 2015-2019*. [Www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id). <https://www.bps.go.id/indicator/13/793/3/realisasi-investasi-penanaman-modal-dalam-negeri-menurut-provinsi-investasi-.html>

- Badan Pusat Statistik. (2018). *Kemiskinan dan Ketimpangan*. Wwww.Bps.Go.Id.  
<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021). <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>. Wwww.Bps.Go.Id.  
<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- Balqis, R., & Suriani. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Call For Paper Conference on Economic and Business Innovation*, 35, 1–12.
- Bank Indonesia. (2021). *Apa itu Inflasi*. Wwww.Bi.Go.Id.  
<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx#:~:text=Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan, secara umum dan terus menerus.>
- Bank World. (1990). *World development report: Poverty*.
- Bashir, A. (2011). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *KAjian Ekonomi*, 10(2), 1–35.
- Basyir, Abubakar Hamzah, & Sofyan Syahnur. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 57–70.
- Bayai Innocent, & Davis Nyangara. (2013). An Analysis of Determinants of Private Investment in Zimbabwe For The Period 2009–2011. *International Journal of Economics and Management Sciences*, 2(6).
- Beetsma, R. M. W. J. (2000). *Apakah Ketimpangan Menyebabkan Inflasi? Tinjauan Ekonomi Politik Inflasi, Perpajakan Dan Utang Pemerintah*. 2, 163–178.
- Bitu Lailatul Yasinta. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Infrastruktur, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 1(4), 144.
- BM Byrne. (1998). *Structural Equation Modeling with LISREL, PRELIS, and SIMPLIS*. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Boediono. (1992). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE.
- Boediono. (1998). *Ekonomi Moneter*. BPFE.
- BPS. (2021). *Persentase Penduduk Miskin*. Wwww.Bps.Go.Id.  
<https://www.bps.go.id/indicator/23/192/3/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Butar, B. R. B. (2019). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Pembangunan Dan Pemerataan*, Vol 8, No.

- C. Checerita, C. Nickel, & P. Rother. (2009). *The Role of Fiscal Transfers for Regional Economic Convergence in Europe* (No. 1029).
- Cheyne, Christine, Mike O'Brien, & Michael Belgrave. (1998). *Social Policy in Aotearoa New Zealand: A Critical Introduction*. Oxford University Press.
- Christina D. Romer, & David H. Romer. (2008). The FOMC versus the Staff: Where Can Monetary Policymakers Add Value? *American Economic Association*, 98(2).
- Corrado Gini. (1921). Measurement of Inequality and Incomes. *The Economic Journal*, 31(121).
- D. Acemoglu, & J.A. Robinson. (2002). The political economy of the Kuznets curve. *Review of Development Economics*, 6(2), 183–203.
- D Friawan. (2008). Kondisi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *CSIS*, 37(2).
- Damanik, A. M., Zulgani, & Rosmeli. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 15–25.
- Dariwardani, N. M. I. (2014). Analisis Dinamika Kemiskinan (Poverty Dynamics) di Bali Berdasarkan Data Susenas Panel 2008 – 2010 Base On Susenas Panel Data 2008-2010. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(1), 7–15.
- David Fielding. (1997). Adjustment Trade Policy and Investment Slumps: Evidence from Africa. *Journal of Development Economics*, 52.
- Deininger, K., & Squire, L. (1998). New ways of looking at old issues: inequality and growth. *Journal of Development Economics*, 57(2), 259–287.
- Dennis A. Rondinelli. (1983). Implementing decentralization programmes in Asia: A comparative analysis. *Public Administration and Development*, 3(3), 181–207.
- Dewi Chrisanty Paat, Rosalina A.M.Koleangan, V. A. R. (2019). *Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Di Kota Bitung*. 1–10.
- Dewi, R. S., & Novi Irama, O. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Di Provinsi Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 11–18.
- Diana, M., Sulistiowati, D., & Hadi, S. (2017). Analisis sektor ekonomi unggulan di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Il*, 1(4), 400–415.
- Din, A. (2017). *Kebijakan Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Nasional*. [Www.Kompasiana.Com. https://www.kompasiana.com/asdindin/59a3d9f4d59a263b0b02dbf2/kebijakan-fiskal-dan-pengaruhnya-terhadap-perekonomian-nasional?page=1&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/asdindin/59a3d9f4d59a263b0b02dbf2/kebijakan-fiskal-dan-pengaruhnya-terhadap-perekonomian-nasional?page=1&page_images=1)
- Diyah Ratna Sari. (2006). Analisis pengaruh pertumbuhan sektor-sektor ekonomi terhadap distribusi pendapatan di Kabupaten Bogor. *IPB Repository*.

- Dollar, D., & Kraay, A. (2002). *Growth is Good for the Poor*. 195–225.
- D.S. Akbar. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) (Penelitian pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Sadananya). *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 5(2), 109–120.
- Dumairy. (2006). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga.
- Dyah Restyani. (2012). *Pengaruh Fluktuasi Harga Minyak Dunia, Inflasi, dan Suku Bunga Bank Umum Terhadap PDB di Indonesia Periode 1999-2009*. Universitas Hasanudin.
- Ebel, R. D., & Yilmaz, S. (2002). On the Measurement and Impact of Fiscal Decentralization. In *Policy Research Working Paper 2809*.
- Edi Suandi Hamid. (2003). *Ketimpangan Fiskal Vertikal dan Formula Alternatif Dana Alokasi Umum (DAU)*.
- Febrianti, T. (2015). *Analisis Perbandingan Konsep Keberfungsian Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Nelayan di Wilayah Pesisir*. 71–78. <https://media.neliti.com/media/publications/259209-analisis-perbandingan-konsep-keberfungsi-7fe08e33.pdf>
- Ferdinand Augusty. (2006). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk skripsi, Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen*. Universitas Diponegoro.
- Firdaus, M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan, Dan Penerimaan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Skripsi*, 53(9), 1689–1699.
- Fitri Amalia. (2012). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010. *Jurnal Ilmiah Econosains*, 10(2).
- Francois Bourguignon. (2004). *Poverty-Growth-Inequality Triangle, Paper was presented at the Indian Council for Research on International Economic Relation*.
- Ginting, A. M. (2015). Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia 2004-2013. *Pusat Penelitian - Badan Keahlian DPR RI*, 20(1), 45–58.
- Gumelar, A. (2019). *Analisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemiskinan*.
- Guritno Mangkoesobroto. (2002). *Ekonomi Publik (BPFE)*.
- H. A. Sackey. (2007). *Private Investment for Structural Transformation and Growth in Africa: Where do Small and Medium-Sized Enterprises Stand?*
- H. Son, & N. Kakwani. (2003). *Poverty Reduction: Do Initials Conditions Matter?* The Wolrd Bank.

- Hajiji, A. (2010). *Keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau 2002-2008*.
- Handayani, D. M. (2019). *Analisis Pengaruh Penggunaan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kediri*.
- Handayani, Desy Mediana, & Wildan Syafitri. (2019). *Analisis Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kediri*.
- Harjono, H., Heny, M.; & Pahala, K.; (2014). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran. *Binus Business Review*, 5(2), 537–550.
- Harmiati, Mulyadi, Suri, E. W., & Triyanto, D. (2019). Analisis Pemberian Dana Desa Dalam Penurunan Angka Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 8(1).
- Helmizar, Mulyadi, M., & Pidhegso, A. Y. (2020). *Belanja Infrastruktur Daerah*. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.
- Hendra Andy Mulia Panjaitan, Sri Mulatsih, & Wiwiek Rindayati. (2020). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 43–61. <https://doi.org/10.29244/jekp.v8i1.29898>
- Hendri, W., & Iswandi, T. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). *Journal Ilmiah Rinjani (JIR)*, 10(1), 43–50.
- Henry Maddick. (1963). *Democracy, Decentralization and Development*. Asia Publishing House.
- Hightower, J. (2018). *Inequality*. [www.inequality-org.translate.go](http://www.inequality-org.translate.go)
- Hur, S.-K. (2014). *Government Spending and Inclusive Growth in Developing Asia (Economics Working Paper No. 415)*. [www.adb.org](http://www.adb.org)
- Imam Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23: Vol. VIII (8th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indra Maipita. (2014). The Impact Of Free Trade Between Asean And China On The Indonesian Households. *Kuantitatif Economics Journal*, 3(2).
- Ingratubun, E. (2019). *Keuangan Inklusif, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia= Financial Inclusion, Economic Growth* ....  
[http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4959/2/19\\_P0500315006\\_Disertasi%28FILEminimizer%29%201-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4959/2/19_P0500315006_Disertasi%28FILEminimizer%29%201-2.pdf)
- Irina Slinko. (2002). *The Impact of Fiscal Desentralization on the Budget Revenue Inequality among Municipalities and Growth of Russian Regions*. Centre for Economic and Financial Research.

- Iskandar Putong. (2009). *Economics, Pengantar Mikro dan Makro* (3rd ed.). Mitra Wacana Media.
- Islamiah, N. (2015). Analisis Pengaruh Belanja Pembangunan/Modal Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Penerimaan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Economix*, 3(1), 46–57.
- Ismail, A., & Hakim, A. (2014). Peran Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 16(9), 2168. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol16.iss9.art8>
- Istiqamah, Syaparuddin, & Rahmadi, S. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Education and Development Institut*, 4(1), 32–36.
- J. Yang, & M. Qiu. (2016). The Impact of Education on Income Inequality and Intergenerational Mobility. *China Economic Review*, 37, 110–125.
- Jacob Cohen. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2nd ed.). Lawrence Earlbaum Associates.
- James L. Arbuckle. (1997). *Amos 7.0 User's Guide*. SPSS Inc.
- Jamie Boex. (2001). *An Introductory Overview of Intergovernmental Fiscal Relations*. Georgia State University.
- Jayadi, D. S., & Bata, A. G. (2012). *Peran Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menurunkan Kemiskinan di Tingkat Provinsi di Indonesia Tahun 2004–2012*.
- Jennie Litvack, & Jessica Seddon. (1999). *Decentralization Briefing Notes*. The World Bank.
- Jhingan M.L. (1993). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Raja Grafindo Perkasa.
- Jhingan ML. (1999). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. CV. Rajawali.
- Joshua Greene, & Delano Villanueva. (1991). *Private Investment in Developing Countries: An Empirical Analysis* (No. 38).
- Julie A. Litchfield. (1999). Inequality: Methods and Tools. *Text for World Bank's Web Site on Inequality, Poverty, and Socio-Economic Performance*.
- Juthathip Jongwanich. (2007). *Determinants of Export Performance in East and Southeast Asia, Economics and Research Department* (106).
- K. Datta, & C. Kumar. (2011). Relationship between Inflation and Economic Growth in Malaysia. *International Conference on Economics and Finance Research IPEDR*, 4(2).
- KA Bollen. (1989). *Structural Equations with Latent Variables*. John Wiley & Sons, Inc.

- Kemenkeu DJPK. (2020). *Dana Transfer Umum Untuk Belanja Infrastruktur Daerah*. Disampaikan dalam diskusi bersama PKAKN Badan Keahlian DPR RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 113.
- Kodoatie, & J. Robert. (2005). *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Pustaka Pelajar.
- Kolibu, M., Rumat, V. A., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 1–14. <https://doi.org/10.35794/jpek.d.16456.19.3.2017>
- Konny Joula Ellen Rasu, Anderson Guntur Kumenaung, & Rosalina A.M Koleangan. (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(4).
- Kresna. (2020). *Teori Pertumbuhan Harrod-Domar*. [www.konsultasiskripsi.com](http://www.konsultasiskripsi.com). <https://konsultasiskripsi.com/2020/01/29/teori-pertumbuhan-harrod-domar-skripsi-dan-tesis-2/>
- Krisna, M., Sunu, K., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Krisnawati, E. (2021). *Mengenal Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi & Daftar Tokoh Pemikirnya Baca selengkapnya di artikel "Mengenal Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi & Daftar Tokoh Pemikirnya"*. Tirto.Id.
- Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28. <https://www.jstor.org/stable/1811581%0D>
- Kuznets, S. (1971). *Modern Economic Growth: Findings and Reflections*. [www.nobelprize.org](http://www.nobelprize.org). <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1971/kuznets/lecture/>
- Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. F. (2018). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(04), 62–72.
- Lasminingsih. (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Agro Media Pustaka.
- Laucereno, S. F. (2017). *Berapa Banyak Orang Miskin di Muka Bumi Ini?* [www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com). <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3707627/berapa-banyak-orang-miskin-di-muka-bumi-ini>



- L.E. Bernal, R.S. Kaukab, & Yu III V.P.B. (2004). *The World Development Report*.
- Lestari, D. (2014). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ketimpangan Wilayah dan Indeks Pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur*.
- Lili, M. A. (2018). *Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar*.
- Lincoln Arsyad. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Lisa, Y., Roy, J., Ekonomi, F., & Mulawarman, U. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 19(2), 162–173.
- LT Hu, & PM Bentler. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling*, 6(1), 1–55.
- M. Ravallion. (1995). Growth and Poverty: evidence for developing countries in the 1980s. *Economics Letters*, 48, 411–417.
- M. Ravallion, & S. Chen. (1997). What Can New Survey Data Tell Us about Recent Changes in Distribution and Poverty? *World Bank Economic Review*, 11(2), 357–382.
- M. Suparmoko. (2011). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*.
- Machfud, Asnawi, & Naz'aina. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *JURNAL MANAJEMEN INDONESIA(J-MIND)*, 5(1).
- MacMillan Cheema G. Shabbir, & Dennis A. Rondinelli. (1983). *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. sage publications Conyer.
- Manduapessy, R. L. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Kabupaten Mimika. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia*, 4(2), 39–57.
- Mardiana, Militina, T., & Utary, A. R. (2017). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur terhadap tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan Analysis of the influence of local government spending on education and health and infrastructure on. 13(1), 50–60.

- Marisa. (2019). Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(1), 76–89. <https://doi.org/10.20527/jiep.v2i1.1156>
- Marpaung, Y., Rotinsulu, D. Ch., & Rorong, I. P. F. (2020). Analisis Dampak Penggunaan Dana Desa Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Rataotok Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(2), 76–93.
- Meilen Paseki, Amran Naukoko, & Patrick Wauran. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(3).
- Michael P. Todaro. (1997). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Jilid 1 & 2). Erlangga.
- Michael P. Todaro, & Stephen C. Smith. (2006). *Economic Development* (7th ed., Vol. 1). Addition Wesley Longman, Inc.
- Mita Setyo Arum Ningtyas. (2014). Pengaruh Harga Minyak Dunia, Harga Emas, dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 10(1).
- M.L. Jhingan. (2007). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Raja Grafindo Persada.
- Morris Kline. (1973). *Matematika Ilmu Dalam Perspektif* (Jujun Suriasumantri, Ed.). Yayasan Obor Indonesia.
- Muammil Sun'an, & Abdurrahman Senuk. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Mitra Wacana Media.
- Mudrajad Kuncoro. (2003). Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris Di Kalimantan Selatan 1993-1999. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 17(1), 27–45.
- Mudrajad Kuncoro. (2005). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN.
- Muhammad Haris Hidayat. (2014). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012*. Sarjana Jurusan IESP pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Mulawati, A. H. (2009). *Pengaruh Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam APBD Kota dan Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan Daerah Perkotaan di Indonesia*.
- N. Berardi, & F. Marzo. (2015). The Elasticity of Poverty ith Respect to Sectoral Growth in Africa. *The Review of Income and Wealth*.
- N Damodar, Gujarati, & Dawn C. Porter. (2009). *Basic Econometric* (5th ed.). McGraw Hill.

- N. Gregory Mankiw. (2000). *Teori Ekonomi Makro (IV)*. Erlangga.
- N. Gregory Mankiw. (2007). *Makro ekonomi* (6th ed.). Erlangga.
- Ni Ketut Anindya Permatasari, & A.A.N.B. Dwirandra. (2016). Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Kemiskinan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 55–81.
- Nisa, K., Wulandari, A., & Rahayu, R. L. (2020). Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009-2018. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(1), 55. <https://doi.org/10.31258/sorot.15.1.55-63>
- Nita Tri Hartini. (2017). *Pengaruh PDRB Per Kapita*.
- Nizar, C., Hamzah, A., & Syahnur, S. (2013). Investasi Dan Tenaga Kerja Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap ... *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 2–3.
- NS Grigg. (1988). *Infrastructure Engineering and Management*.
- Nugraha, J. (2020). *6 Tujuan Kebijakan Fiskal Beserta Jenis dan Fungsinya*. [www.Merdeka.Com](http://www.Merdeka.Com). <https://www.merdeka.com/jateng/6-tujuan-kebijakan-fiskal-beserta-jenis-dan-fungsinya-klm.html>
- Nugraheni, D., & Priyarsono, D. S. (2012). Kinerja Keuangan Daerah, Infrastruktur, dan Kemiskinan: Analisis Kabupaten/Kota di Indonesia 2006-2009. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 12(2), 148–167. <https://doi.org/10.21002/jepi.v12i2.495>
- Nurkse, R. (1961). *Problem of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Oxford University Press.
- O. Sukmana. (2018). Strategi Percepatan Pertumbuhan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Kebijakan Pengembangan Pariwisata. *Sosio Informa*, 4(3), 488–500.
- OECD. (1995). *Economic Outlook*. [www.Oecd-Library.Org](http://www.Oecd-Library.Org). [https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook-volume-1995-issue-1\\_eco\\_outlook-v1995-1-en](https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook-volume-1995-issue-1_eco_outlook-v1995-1-en)
- Olivier Blanchard. (2000). *The Economics of Unemployment. Shocks, Institutions, and Interactions*.
- P.A. Yotopoulos, & J.B. Nugent. (1976). *Economics of Development*.
- Pangiuik, A. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2(2), 44. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i2.160>
- Pateda, Y., Masinambouw, V. A. J., & Rotinsulu, T. O. (2019). Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan*

*Keuangan Daerah*, 19(3), 1–17.  
<https://doi.org/10.35794/jpekd.16455.19.3.2017>

- Paul Samuelson, & Nordhaus William D. (2004). *Ilmu Makroekonomi*. PT. Media Global Edukasi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.07/2016 tentang *Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 tentang *Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang *Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang *Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 *Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*.
- Posumah, F. (2015). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(02), 1–13.
- Pradnyadewi, D., & Purbadharmaja, I. (2017). Pengaruh Ipm, Biaya Infrastruktur, Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(2), 255–285.
- Prasetyo, R. B., & Firdaus, M. (2009). Pengaruh Infrastruktur pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 222–236.
- Prasetyo, Y., & Masdjojo, G. N. (2013). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di 10 Desa Wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi\_U)*.
- Priyono, & Ismail, Z. (2012). *Teori ekonomi* (T. Chandra, Ed.; Pertama). Dharma Ilmu.
- Purnomo, S. D., Wijaya, M., & Setiawan, H. (2021). Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. In *Majalah Ilmiah Manajemen dan Bisnis (MIMB)* (Vol. 18).

- Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2019). *Kajian Dana Desa - Analisis Empiris Badan Usaha Milik Desa, Kesempatan Kerja, dan Infrastruktur Pada Seribu Desa di Indonesia*. Www. Fiskal.Kemenkeu.Go.Id. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2019/08/15/081715513098462-kajian-dana-desa-analisis-empiris-badan-usaha-milik-desa-kesempatan-kerja-dan-infrastruktur-pada-seribu-desa-di-indonesia>
- Putra, H. S. (2018). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Analis Kebijakan*, 2(2).
- Putra, I. (2019). *Pengaruh Pengangguran, Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia*.
- R. Crudu. (2015). The Influence of Fiscal Policy on Income Inequality in European Union's Member States. *Ekonomika Business Systems and Economics*, 5, 46–60.
- R Ginevicius, & v Podvezko. (2006). *Comprehensive evaluation of economic and social development of Lithuanian regions based on a structured set of criteria, The 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development*.
- R. Hassan, & M.G. Quibria. (2002). *Poverty and Patterns of Growth* (No. 18).
- R. López, & Yoon S.W. (2013). *Sustainable Economic Growth: Structural Transformation with Consumption Flexibility*.
- Rahman, K. (2016). *Strategi Peningkatan Investasi Pedesaan Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Di Provinsi Riau*.
- Rai, N., Suda, N., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7, 651–680.
- Raksaka Mahi. (2001). *Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan Antar daerah dan Peningkatan Efisiensi*. Indonesia Project.
- Ravallion, M. (2004). *Pro-Poor Growth: A Primer*.
- Rebecca M. Blank. (1985). *Macroeconomics, Income Distribution, and Poverty* (No. 1567).
- Rezzy Eko Caraka. (2016). Pengaruh Inflasi Terhadap Impor dan Ekspor di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau menggunakan Generalized Spatio Time Series. *Jurnal BPPK*, 9(1).
- RI. Safitri. (2015). *Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan: Analisis Data Provinsi di Indonesia 2010*. Institut Pertanian Bogor.
- Riadi, M. (2020). *Ketimpangan Pendapatan (Pengertian, Penyebab dan Pengukuran)*. Kajian Pustaka. <https://www.kajianpustaka.com/2020/04/ketimpangan-pendapatan-pengertian-penyebab-dan-pengukuran.html>

- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan Di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287–295.
- Rini, E. M. (2019). *Manfaat Investasi di Pasar Modal untuk Indonesia*. Www.Poems.Co.Id.  
[https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v76/news02\\_vol76\\_ManfaatInvestasiPasarmodal.html](https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v76/news02_vol76_ManfaatInvestasiPasarmodal.html)
- Riry Isramiwarti, M. Rasuli, & Taufeni Taufik. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau*. 195–213.
- Ritonga, A., Handra, H., & Andrianus, F. (2021). Pengaruh dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Sumatera Barat. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 16(2), 277–290.  
<https://doi.org/10.20961/region.v16i2.32968>
- Rizal, Y., Asnidar, & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Investasi dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudera Ekonomika*, 4(1).
- Robert A. Simanjuntak. (2002). *Transfer Pusat ke Daerah: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara, dalam buku Sidik, Machfud (Eds). 2002. Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*.
- Robert A. Simanjuntak, & Djoko Hidayanto. (2002). *Dana Alokasi Umum di Masa depan*.
- Robert Chambers. (1983). *Rural Development, Putting the Last First*. Longman.
- Robert E. Baldwin. (1986). *Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi*. Bina Aksara.
- Roberto, S., Lutfi, M., & Nurnanigsih. (2015). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. *Jurnal IDEAL Journal of Indonesia Development and Economics Analysis*, 2084–2097.
- Roeslan Zaris. (1987). *Perspektif Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. LPFE UI.
- Rutherford, D. (2002). *Routledge Dictionary Dictionary of Economics Second edition* (2nd ed.). The Taylor & Francis e-Library, 2005.
- S Boopen, & A.J. Khadaroo. (2006). *“Transport Capital and Private Capital Formation in Mauritius: Testing the Substitutability and Complementarity Hypotheses* (No. 341).
- S. Saleh. (2002). Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 87–102.
- S. Straub. (2008). *Infrastructure and Growth in Developing Countries: Recent Advances and Research Challenges* (No. 4460).

- S. White. (2005). *Enhancing private investment for development: Policy guidance for development agencies*.
- Sabir. (2015). *Pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Sadono Sukirno. (2006). *Makroekonomi: Teori Pengantar* (III (ketiga)). Rajawali Press.
- Saifuddin. (2014). *Pengaruh ketimpangan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat*.
- Santi, A. L., Hardiani, H., & Rosmeli, R. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.53867/jea.v1i1.1>
- Saputra, B., & Mahmudi. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 16(1993), 185–199. <http://eprints.upnyk.ac.id/871/>
- Sari, R. M., Pakuan, U., Pakuan, U., & Pemerintah, I. (2017). *Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kemiskinan Kota Tangerang*.
- Sari, R. N., Ribawanto, H., & Said, M. (2008). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(11), 1880–1885.
- Sarjiyo. (2009). *Dampak Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah* (Abdul Halim & Ibnu Mujib, Eds.). Sekolah Pascasarjana UGM.
- Sartika, C., Balaka, My., Aya Rumbia, W., Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo, M., & Pengajar, S. (2016). Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. *Jurnal Ekonomi (JE)*, 1(1), 106–118. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JE>
- Savarita Pitri. (2018). *Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Scruton, R. (2007). *The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought Third Edition* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
- Septiawan, D. A., Hidayat, R. R., & Sulasmiyati, S. (2016). Pengaruh Harga Minyak Dunia, Inflasi, Dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Studi Pada Tahun 2007 - 2014). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 40(2), 130–138.
- Septifany, A. T., Hidayat, R. R., & Sulasmiyati, S. (2015). *Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah dan Cadangan Devisa terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia*. 25(2), 1–7.
- Setianingsih, I. (2017). Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Melawi. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 5(3), 1–18.

- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran: pendekatan analisis jalur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211–228. <https://doi.org/10.21002/jaki.2007.11>
- Sianturi, Y. S. (2019). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara)*.
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105–119. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.170>
- Sihite, L. (2020). *Pengaruh Dana Desa, IPM, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara*.
- Siti Aisyah, & Suseno. (2009). *Inflasi*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Soedibjo, W. (2015). *Efektivitas Penggunaan Pinjaman LuarNegeri untuk PembangunanInfrastruktur dalamPenyusunanAPBN 2014 dan APBN 2015*.
- Stanley Fischer, Ratna Sahay, & Carlos A. Végh. (2002). Modern Hyper and High Inflations. *American Economic Association*, 40(3), 837–880.
- Stephen J. Turnovsky. (2015). Economic Growth and Inequality: The Role of Public Investment. *Journal of Economic Dynamis and Control*, 61(C), 204–221.
- Sugeng Bahagijo, Arief Anshory Yusuf, Hamong Santono, Dwi Ruby Khalifah, Yanuar Nugroho, & Siti Khoirun Nikmah. (2014). Walikota New York, Ketimpangan dan Pemilu 2014. *Analisis INFID*, 2.
- Sugiartiningsih. (2017). *Pengaruh Inflasi Indonesia Terhadap Penerimaan Penanaman Modal Asing Langsung Korea Selatan Di Indonesia Periode 2000-2014*. 17(1), 33–40. <http://journal.maranatha.edu/jmm>
- Sugiarto, E. C. (2019a). *Investasi dan Indonesia Maju*. Setneg.Go.Id. [https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi\\_dan\\_indonesia\\_maju](https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju)
- Sugiarto, E. C. (2019b). *Investasi dan Indonesia Maju*. Setneg.Go.Id.
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), 115–130. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>.
- Summers, & Heston. (1996). *Commercial Poultry Nutrition* (3rd ed.). University Brooks.
- Supiansyah, Djohan, S., & Junaidi, A. (2021). *Pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan kota bontang Supiansyah B Supiansyah B, Sjamsu Djohan, Agus Junaidi*.



- Suryawati. (2004). *Teori Ekonomi Mikro*. UPP STIM YKPN.
- Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh alokasi dana desa, dana desa, belanja modal, dan produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 514–526.
- Syahyuti. (2006). *30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian (Penjelasan tentang konsep, istilah, teori, dan indikator serta variabel)*. Bina Rena Pariwara.
- Syamsul. (2020). Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Akuntabel*, 17(1), 140–147.
- Szeles, & Monica Raileanu. (2013). Re-examining the relationship between economic growth and inequality in the New Member States. *Qual Quant Summer*, 2799–2813.
- T Nurhidayah, & P Hendikawati. (2018). Pengaruh Realisasi APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan dengan Statistical Mediation Analysis. *Indonesian Journal of Mathematics and Natural Sciences*, 41(2).
- T. Persson, & G. Tabellini. (1994). Is Inequality Harmful For Growth? Theory and Evidence. *American Economic Review*, 84(3), 600–621.
- T. Reungsri. (2010). *The Impact of Public Infrastructure Investment on Economic Growth in Thailand*.
- Tajuddin, I. (2014). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap ketimpangan Pendapatan Melalui Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja di Regional Sulawesi*.
- Talcott Parsons. (1961). *Theories of Society: Foundations of Modern Sociological Theory* (Vol. 1).
- Teja Rinanda, & Subambang Harsono. (2020). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ekonomi Hukum & Humaniora*, 1(1).
- The World Bank. (2004). *Determinants of Private Sector Growth in Ethiopia, Urban*.
- The World Bank. (2005). *Iklim Investasi yang Lebih Baik bagi Setiap Orang. Salemba Empat*.
- The World Bank. (2011). *World Development Report*. Salemba Empat.
- The World Bank. (2016, October 2). *Mengatasi Ketimpangan Penting untuk Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem di Tahun 2030*.
- The World Bank. (2019). *Indonesia Economic Quarterly Reports (IEQ)*. [www.Worldbank.Org.https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterly-reports](https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterly-reports)

- Theodore Panayotou. (1998). *Investments of Change: Motivating and Financing Sustainable Development*. Earthscan Publications.
- Thomas Piketty, & Emmanuel Saez. (2014). Inequality in the long run. *Science*, 344(6186).
- Tim LPEM-PSEKP-PSP. (2004). *Studi Dampak Kebijakan Ekonomi Makro Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan*.
- Todaro. Michael P., & Smith. Stephen C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (9th ed.). Erlangga.
- Todaro Michael P, & Stephen C. Smith. (2009). *Economic Development* (11th ed.). Pearson Education.
- Todaro P. Michael. (2000). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga: Vol. Jilid I*. Erlangga.
- Toma Lankauskiene, & Manuela Tvaronaviciene. (2011). Interrelation of countries' developmental level and foreign direct investments performance/Saliu issivystymo lygio ir tiesioginiu uzsienio investiciju veiklos saveika. *Journal of Business Economics and Management*, 12(3).
- Tusk Advisory. (2018). *The Impact of Indonesia's Infrastructure Delivery*.
- Umar Bakti, & Maria Septijantini Alie. (2018). Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Investasi di Provinsi Lampung Periode 1980-2015. *Jurnal Ekonomi*, 20(3), 275–285.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- United Nations Convergence on Environment & Development. (1992). *Agenda 21* (Issue June).
- United Nations Development Program (UNDP). (2005). *Fiscal Decentralisation and Poverty Reduction*. UNDP.

- Usmaliadanti, C. (2011). *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009*.
- W. A. Saputra, & YB. Mudakir. (2011). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*.
- W. Arthur Lewis. (1994). *Perencanaan Pembangunan, Dasar-Dasar Kebijakan Ekonomi* (II). PT. Rineka Cipta.
- Wahyuddin, Ramly, A. R., Djalil, M. A., & Indriani, M. (2019). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya Wahyuddin. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Kegamaan Islam*, 16(2), 182–193. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i2.2410>
- Wahyuningtyas, Agustina Endah, Arianti, & Fitri. (2010). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Defisit Anggaran Terhadap Investasi Di Indonesia (1986-2008). *Ekonomi Pembangunan*.
- Wai T. U., & Wong C. H. (1982). Determinants of Private Investment in Developing Countries. *Journal of Development Studies*, 19.
- Walinono, A. M. I. (2020). *Pengaruh Reformasi Keuangan dan Desentralisasi Fiskal tentang Tata Kelola Keuangan di Bone, Indonesia*. 1–14.
- Wallace E. Oates. (2008). On The Evolution of Fiscal Federalism: Theory and Institutions. *National Tax Journal*, 61(2), 313–334.
- Wasistiono, & Irwan Tahir. (2007). *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia.
- Wibowo, mohamad erhan. (2014). Analisis Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*, 1–85(1), 1–85.
- William J. Doane, Patricia E. Cladis, Christopher Curtin, James Larimer, Marko Slusarczyk, Jan B. Talbot, & Ziv Yaniv. (1994, December). *Display technologies in Russia, Ukraine, and Belarus*. Final Report Loyola Coll., Baltimore, MD. International Technology Reseach Inst.
- Yulianto, D. (2011). *Analisis Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Suku Bunga SBI terhadap Inflasi di Indonesia TAahun 1984-2009* (Vol. 1).
- Zamrud Siswa Utama. (2017). *Pengaruh Kebijakan Fiskal pada Pertumbuhan dan Ketimpangan Ekonomi Indonesia: Studi Kasus 1980-2015*. Universitas Brawijaya.
- Zulhendra, I. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Bali*.

## Lampiran 1 Biodata

**BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Andi Muhammad Iqbal Walinono  
 Tempat, tanggal Lahir : Bone, 25 Mei 1988  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Nomor Hp : 0811467345  
 Alamat Email : iqbalwalinono@gmail.com  
 Status Sipil :  
     Nama Istri : Sry Wulandari, S.H., M.Kn.  
     Nama Anak : 1. Andi Yusuf Al Hadi Walinono  
               2. Shebyka We Zahira Walinono

**Riwayat Pendidikan**

## Pendidikan Formal

Tamat SD tahun 2000 di SD Negeri 10 Manurunge  
 Tamat SLTP tahun 2003 di SLTP Negeri 2 Watampone  
 Tamat SLTA tahun 2006 di SMA Amir Islam Watampone  
 Sarjana (S1) tahun 2010 di Yayasan Ompo Makassar STIE Indonesia  
 Magister (S2) tahun 2014 di STIA Puangrimaggalatung Bone

## Pendidikan Nonformal

1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Angkatan II, Tahun 2012, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. *Training of Trainers* Pengelolaan Keuangan Daerah Modul Penatausahaan Perbendaharaan Daerah, Tahun 2013, PPKED Fakultas Ekonomi Unhas.
3. *Training of Trainers* Pengelolaan Keuangan Daerah Modul Perencanaan Penganggaran Daerah, Tahun 2013, Kementerian Keuangan RI, PPKED Unhas, Kemendagri.
4. *Training of Trainers* Pengelolaan Keuangan Daerah Modul Akuntansi Keuangan Daerah, Tahun 2015, PPKED Fakultas Ekonomi Unhas.
5. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan CCXV, Tahun 2017, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Bimbingan Teknis Konsolidasi Laporan Keuangan, Penatausahaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan SKPD serta (TP4D) Kejaksaan dalam Anggaran Pembangunan Daerah, Tahun 2017, Lembaga Fasilitasi Management Pemerintahan Daerah.
7. Bimbingan Teknis Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tahun 2017, Politeknik Negeri Ujung Pandang.

8. Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah Angkatan III, Tahun 2017, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Pendidikan dan Pelatihan Monitoring Evaluasi, Tahun 2018, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung dan Bappenas.
10. Pelatihan Kota Tematik Berbasis Kota Cerdas, Tahun 2018, Koordinator Diklat Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung.
11. Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Angkatan I, Tahun 2018, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
12. Kader Bela Negara, Tahun 2018, Komando Distrik Militer 1407.
13. *E-Auditee application Training Program conducted by USAID CEGAH*, Tahun 2019, BPK RI.
14. Diskusi Ekonomi Regional “Potensi desa wisata dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, Tahun 2020, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
15. Bicara data virtual series “Peluang mendorong investasi saat pandemi”, Tahun 2020, Katadata Insight Center.
16. Seminar Nasional dengan tema “Inovasi Industri Hasil Perkebunan dan Hasil Laut untuk mendukung peningkatan 35% Substitusi Impor”, Tahun 2020, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Kementerian Perindustrian RI.
17. Diskusi Webinar dengan tema “Peran OJK dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19”, Tahun 2020, Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis FEB-UNHAS.
18. Sosialisasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran IPKD, Tahun 2020, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
19. Webinar Sekretariat Presiden Menyapa “Kegiatan Kepresidenan Era Kebiasaan Baru”, Tahun 2020, Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Presiden.
20. Seminar Digital Kemenkeu *Corporate University Talk: Percepat Pemulihan Sosial Ekonomi, Belanja TKDD 2021 Dukung Program Prioritas Nasional*, Tahun 2020, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan.
21. Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah Angkatan III, Tahun 2021, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
22. Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) *goes to campus 5*, Tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

23. Bimbingan teknis Keuangan Daerah kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Tahun 2022, Pusat Pendidikan dan Pengembangan Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi dan DJPK Kementerian Keuangan RI.
24. Pelatihan dan Sertifikasi *Certified Risk Associate* dan *Certified Risk Professional* (Manajemen Risiko Madya dan Utama) Tahun 2022.

#### **Pekerjaan dan Riwayat Pekerjaan**

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara  
NIP : 19880525 201101 1 009  
Pangkat/Jabatan : Penata Tk.I / Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD Kabupaten Bone

#### **Karya Ilmiah/Artikel yang telah dipublikasikan**

1. *Analysis of fiscal decentralization, income inequality and poverty rate in Indonesia.*
2. *The effect of financial reform and fiscal decentralization on financial governance in Bone, Indonesia.*
3. *Analysis of The Determinants Level of Poverty in Indonesia.*

#### **Makalah pada Seminar/Konferensi Ilmiah Nasional dan Internasional**

1. *Analysis of The Determinants Level of Poverty in Indonesia.*

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 26 Desember 2022

  
Andi Muhammad Iqbal Walinono

Lampiran 2 Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia Tahun 2015 - 2021

| INDIKATOR                                   | TAHUN |       |         |         |         |         |         |
|---|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | 2015  | 2016  | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| <b>PDB</b> (dalam milyar USD)               | 860,9 | 931,9 | 1,015,0 | 1,042,2 | 1,119,2 | 3.911,7 | 4.325,4 |
| <b>PDB</b> (perubahan % tahunan)            | 4,88  | 5,03  | 5,07    | 5,17    | 5,02    | -2,50   | 7,07    |
| <b>Kemiskinan Relatif</b> (% dari populasi) | 11,2  | 10,7  | 10,1    | 9,8     | 9,41    | 9,78    | 10,14   |
| <b>Kemiskinan Absolut</b> (dalam jutaan)    | 28,5  | 27,8  | 26,6    | 26,0    | 25,14   | 27,55   | 27,54   |
| <b>Koefisien Gini/ Rasio Gini</b>           | 0,402 | 0,394 | 0,391   | 0,384   | 0,380   | 0.385   | 0,384   |

Lampiran 3 Tingkat Kemiskinan Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2021 (Persen)

| NO | PROVINSI             | TAHUN |       |       |       |       |       |       |
|----|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                      | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1  | Aceh                 | 17,11 | 16,43 | 15,92 | 15,68 | 15,01 | 15,43 | 15.53 |
| 2  | Sumatera Utara       | 10,79 | 10,27 | 9,28  | 8,94  | 8,63  | 9,14  | 8.49  |
| 3  | Sumatera Barat       | 6,71  | 7,14  | 6,75  | 6,55  | 6,29  | 6,56  | 6.04  |
| 4  | Riau                 | 8,82  | 7,67  | 7,41  | 7,21  | 6,9   | 7,04  | 7.00  |
| 5  | Jambi                | 9,12  | 8,37  | 7,9   | 7,85  | 7,51  | 7,97  | 7.67  |
| 6  | Sumatera Selatan     | 13,77 | 13,39 | 13,1  | 12,82 | 12,56 | 12,98 | 12.79 |
| 7  | Bengkulu             | 17,16 | 17,03 | 15,59 | 15,41 | 14,91 | 15,30 | 14.43 |
| 8  | Lampung              | 13,53 | 13,86 | 13,04 | 13,01 | 12,3  | 12,76 | 11.67 |
| 9  | Kep. Bangka Belitung | 4,83  | 5,04  | 5,3   | 4,77  | 4,5   | 4,89  | 4.67  |
| 10 | Kep. Riau            | 5,78  | 5,84  | 6,13  | 5,83  | 5,8   | 6,13  | 5.75  |
| 11 | Jawa Barat           | 9,57  | 8,77  | 7,83  | 7,25  | 6,82  | 8,43  | 7.97  |
| 12 | Jawa Tengah          | 13,32 | 13,19 | 12,23 | 11,19 | 10,58 | 11,84 | 11.25 |
| 13 | DI Yogyakarta        | 13,16 | 13,1  | 12,36 | 11,81 | 11,44 | 12,80 | 11.91 |
| 14 | Jawa Timur           | 12,28 | 11,85 | 11,2  | 10,85 | 10,2  | 11,46 | 10.59 |
| 15 | Banten               | 5,75  | 5,36  | 5,59  | 5,25  | 4,94  | 6,63  | 6.50  |
| 16 | Bali                 | 5,25  | 4,15  | 4,14  | 3,91  | 3,61  | 4,45  | 4.72  |
| 17 | Nusa Tenggara Barat  | 16,54 | 16,02 | 15,05 | 14,63 | 13,88 | 14,23 | 13.83 |
| 18 | Nusa Tenggara Timur  | 22,58 | 22,01 | 21,38 | 21,03 | 20,62 | 21,21 | 20.44 |
| 19 | Kalimantan Barat     | 8,44  | 8     | 7,86  | 7,37  | 7,28  | 7,24  | 6.84  |
| 20 | Kalimantan Tengah    | 5,91  | 5,36  | 5,26  | 5,1   | 4,81  | 5,26  | 5.16  |
| 21 | Kalimantan Selatan   | 4,72  | 4,52  | 4,7   | 4,65  | 4,47  | 4,83  | 4.56  |
| 22 | Kalimantan Timur     | 6,1   | 6     | 6,08  | 6,06  | 5,91  | 6,64  | 6.27  |
| 23 | Kalimantan Utara     | 6,32  | 6,99  | 6,96  | 6,86  | 6,49  | 7,41  | 6.83  |
| 24 | Sulawesi Utara       | 8,98  | 8,2   | 7,9   | 7,59  | 7,51  | 7,78  | 7.36  |
| 25 | Sulawesi Tengah      | 14,07 | 14,09 | 14,22 | 13,69 | 13,18 | 13,06 | 12.18 |
| 26 | Sulawesi Selatan     | 10,12 | 9,24  | 9,48  | 8,87  | 8,56  | 8,99  | 8.53  |
| 27 | Sulawesi Tenggara    | 13,74 | 12,77 | 11,97 | 11,32 | 11,04 | 11,69 | 11.85 |
| 28 | Gorontalo            | 18,16 | 17,63 | 17,14 | 15,83 | 15,31 | 15,59 | 11.74 |
| 29 | Sulawesi Barat       | 11,9  | 11,19 | 11,18 | 11,22 | 10,95 | 11,50 | 15.41 |
| 30 | Maluku               | 19,36 | 19,26 | 18,29 | 17,85 | 17,65 | 17,99 | 16.30 |
| 31 | Maluku Utara         | 6,22  | 6,41  | 6,44  | 6,62  | 6,91  | 6,97  | 6.38  |
| 32 | Papua Barat          | 25,73 | 24,88 | 23,12 | 22,66 | 21,51 | 21,7  | 21.82 |
| 33 | Papua                | 28,4  | 28,4  | 27,76 | 27,43 | 26,55 | 26,80 | 27.38 |



Lampiran 4 Gini Ratio Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2021

| NO | PROVINSI             | TAHUN |       |       |       |       |       |       |
|----|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                      | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1  | Aceh                 | 0.339 | 0.341 | 0.329 | 0.318 | 0.321 | 0.319 | 0.323 |
| 2  | Sumatera Utara       | 0.326 | 0.312 | 0.335 | 0.311 | 0.315 | 0.314 | 0.313 |
| 3  | Sumatera Barat       | 0.319 | 0.312 | 0.312 | 0.305 | 0.307 | 0.301 | 0.300 |
| 4  | Riau                 | 0.366 | 0.347 | 0.325 | 0.347 | 0.331 | 0.321 | 0.327 |
| 5  | Jambi                | 0.344 | 0.346 | 0.334 | 0.335 | 0.324 | 0.316 | 0.315 |
| 6  | Sumatera Selatan     | 0.334 | 0.362 | 0.365 | 0.341 | 0.339 | 0.338 | 0.340 |
| 7  | Bengkulu             | 0.371 | 0.354 | 0.349 | 0.355 | 0.329 | 0.323 | 0.321 |
| 8  | Lampung              | 0.352 | 0.358 | 0.333 | 0.326 | 0.331 | 0.320 | 0.314 |
| 9  | Kep. Bangka Belitung | 0.275 | 0.288 | 0.276 | 0.272 | 0.262 | 0.257 | 0.247 |
| 10 | Kep. Riau            | 0.339 | 0.352 | 0.359 | 0.339 | 0.337 | 0.334 | 0.339 |
| 11 | Jawa Barat           | 0.426 | 0.402 | 0.393 | 0.405 | 0.398 | 0.398 | 0.406 |
| 12 | Jawa Tengah          | 0.382 | 0.357 | 0.365 | 0.357 | 0.358 | 0.359 | 0.368 |
| 13 | DI Yogyakarta        | 0.420 | 0.425 | 0.440 | 0.422 | 0.428 | 0.437 | 0.436 |
| 14 | Jawa Timur           | 0.403 | 0.402 | 0.415 | 0.371 | 0.364 | 0.364 | 0.364 |
| 15 | Banten               | 0.386 | 0.392 | 0.379 | 0.367 | 0.361 | 0.365 | 0.363 |
| 16 | Bali                 | 0.399 | 0.374 | 0.379 | 0.364 | 0.370 | 0.369 | 0.375 |
| 17 | Nusa Tenggara Barat  | 0.360 | 0.365 | 0.378 | 0.391 | 0.374 | 0.386 | 0.384 |
| 18 | Nusa Tenggara Timur  | 0.348 | 0.362 | 0.359 | 0.359 | 0.355 | 0.356 | 0.339 |
| 19 | Kalimantan Barat     | 0.330 | 0.331 | 0.329 | 0.325 | 0.318 | 0.325 | 0.315 |
| 20 | Kalimantan Tengah    | 0.300 | 0.347 | 0.327 | 0.344 | 0.335 | 0.320 | 0.320 |
| 21 | Kalimantan Selatan   | 0.334 | 0.351 | 0.347 | 0.340 | 0.334 | 0.351 | 0.325 |
| 22 | Kalimantan Timur     | 0.315 | 0.328 | 0.333 | 0.342 | 0.335 | 0.335 | 0.331 |
| 23 | Kalimantan Utara     | 0.314 | 0.305 | 0.313 | 0.304 | 0.292 | 0.300 | 0.285 |
| 24 | Sulawesi Utara       | 0.366 | 0.379 | 0.394 | 0.372 | 0.376 | 0.368 | 0.359 |
| 25 | Sulawesi Tengah      | 0.370 | 0.347 | 0.345 | 0.317 | 0.330 | 0.321 | 0.326 |
| 26 | Sulawesi Selatan     | 0.404 | 0.400 | 0.429 | 0.388 | 0.391 | 0.382 | 0.377 |
| 27 | Sulawesi Tenggara    | 0.381 | 0.388 | 0.404 | 0.392 | 0.393 | 0.388 | 0.394 |
| 28 | Gorontalo            | 0.401 | 0.410 | 0.405 | 0.417 | 0.410 | 0.406 | 0.409 |
| 29 | Sulawesi Barat       | 0.362 | 0.371 | 0.339 | 0.366 | 0.365 | 0.356 | 0.366 |
| 30 | Maluku               | 0.338 | 0.344 | 0.321 | 0.326 | 0.320 | 0.326 | 0.316 |
| 31 | Maluku Utara         | 0.286 | 0.309 | 0.330 | 0.336 | 0.310 | 0.290 | 0.278 |
| 32 | Papua Barat          | 0.428 | 0.401 | 0.387 | 0.391 | 0.381 | 0.376 | 0.374 |
| 33 | Papua                | 0.392 | 0.399 | 0.398 | 0.398 | 0.391 | 0.395 | 0.396 |

Lampiran 5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2021 (Persen)

| NO. | PROVINSI             | TAHUN |       |      |       |        |       |       |
|-----|----------------------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|
|     |                      | 2015  | 2016  | 2017 | 2018  | 2019   | 2020  | 2021  |
| 1   | Aceh                 | -0.73 | 3.29  | 4.18 | 4.61  | 4.14   | -0.37 | 2.79  |
| 2   | Sumatera Utara       | 5.10  | 5.18  | 5.12 | 5.18  | 5.22   | -1.07 | 2.61  |
| 3   | Sumatera Barat       | 5.53  | 5.27  | 5.30 | 5.14  | 5.01   | -1.62 | 3.29  |
| 4   | Riau                 | 0.22  | 2.18  | 2.66 | 2.35  | 2.81   | -1.13 | 3.36  |
| 5   | Jambi                | 4.21  | 4.37  | 4.60 | 4.69  | 4.35   | -0.44 | 3.66  |
| 6   | Sumatera Selatan     | 4.42  | 5.04  | 5.51 | 6.01  | 5.69   | -0.11 | 3.58  |
| 7   | Bengkulu             | 5.13  | 5.28  | 4.98 | 4.97  | 4.94   | -0.02 | 3.24  |
| 8   | Lampung              | 5.13  | 5.14  | 5.16 | 5.23  | 5.26   | -1.67 | 2.79  |
| 9   | Kep. Bangka Belitung | 4.08  | 4.10  | 4.47 | 4.45  | 3.32   | -2.30 | 5.05  |
| 10  | Kep. Riau            | 6.02  | 4.98  | 1.98 | 4.47  | 4.83   | -3.80 | 3.43  |
| 11  | Jawa Barat           | 5.05  | 5.66  | 5.33 | 5.65  | 5.02   | -2.52 | 3.74  |
| 12  | Jawa Tengah          | 5.47  | 5.25  | 5.26 | 5.30  | 5.36   | -2.65 | 3.32  |
| 13  | DI Yogyakarta        | 4.95  | 5.05  | 5.26 | 6.20  | 6.59   | -2.68 | 5.53  |
| 14  | Jawa Timur           | 5.44  | 5.57  | 5.46 | 5.47  | 5.53   | -2.33 | 3.57  |
| 15  | Banten               | 5.45  | 5.28  | 5.75 | 5.77  | 5.26   | -3.39 | 4.44  |
| 16  | Bali                 | 6.03  | 6.33  | 5.56 | 6.31  | 5.60   | -9.33 | -2.47 |
| 17  | Nusa Tenggara Barat  | 21.76 | 5.81  | 0.09 | -4.50 | 3.90   | -0.62 | 2.30  |
| 18  | Nusa Tenggara Timur  | 4.92  | 5.12  | 5.11 | 5.11  | 5.25   | -0.84 | 2.51  |
| 19  | Kalimantan Barat     | 4.88  | 5.20  | 5.17 | 5.07  | 5.09   | -1.82 | 4.78  |
| 20  | Kalimantan Tengah    | 7.01  | 6.35  | 6.73 | 5.61  | 6.12   | -1.41 | 3.40  |
| 21  | Kalimantan Selatan   | 3.82  | 4.40  | 5.28 | 5.08  | 4.09   | -1.82 | 3.48  |
| 22  | Kalimantan Timur     | -1.20 | -0.38 | 3.13 | 2.64  | 4.70   | -2.87 | 2.48  |
| 23  | Kalimantan Utara     | 3.40  | 3.55  | 6.80 | 5.36  | 6.89   | -1.09 | 3.98  |
| 24  | Sulawesi Utara       | 6.12  | 6.16  | 6.31 | 6.00  | 5.65   | -0.99 | 4.16  |
| 25  | Sulawesi Tengah      | 15.50 | 9.94  | 7.10 | 20.60 | 8.83   | 4.86  | 11.70 |
| 26  | Sulawesi Selatan     | 7.19  | 7.42  | 7.21 | 7.04  | 6.91   | -0.71 | 4.65  |
| 27  | Sulawesi Tenggara    | 6.88  | 6.51  | 6.76 | 6.40  | 6.50   | -0.65 | 2.56  |
| 28  | Gorontalo            | 6.22  | 6.52  | 6.73 | 6.49  | 6.40   | -2.40 | 4.10  |
| 29  | Sulawesi Barat       | 7.31  | 6.01  | 6.39 | 6.26  | 5.56   | -0.02 | 2.41  |
| 30  | Maluku               | 5.48  | 5.73  | 5.82 | 5.91  | 5.41   | -0.92 | 3.04  |
| 31  | Maluku Utara         | 6.10  | 5.77  | 7.67 | 7.86  | 6.25   | 5.35  | 16.40 |
| 32  | Papua Barat          | 4.15  | 4.52  | 4.02 | 6.25  | 2.66   | -0.76 | -0.51 |
| 33  | Papua                | 7.35  | 9.14  | 4.64 | 7.32  | -15.74 | 2.39  | 15.11 |

Lampiran 6 Investasi Per Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2021 (Triliun Rupiah)

| NO | PROVINSI             | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|----|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Aceh                 | 4.496.217.000   | 4.383.619.000   | 1.115.279.000   | 1.990.367.000   | 5.577.412.000   | 8.966.720.000   | 4.158.564.700   |
| 2  | Sumatera Utara       | 22.145.259.000  | 19.405.865.000  | 33.393.631.000  | 25.964.535.000  | 25.187.614.000  | 32.031.660.000  | 18.058.164.500  |
| 3  | Sumatera Barat       | 2.370.800.000   | 4.932.048.000   | 4.302.946.000   | 4.900.444.000   | 5.278.000.000   | 4.889.820.000   | 3.426.383.700   |
| 4  | Riau                 | 19.306.875.000  | 19.068.772.000  | 26.036.424.000  | 23.858.889.000  | 41.110.454.000  | 49.425.500.000  | 32.009.077.800  |
| 5  | Jambi                | 5.083.648.000   | 4.758.591.000   | 4.107.220.000   | 4.336.828.000   | 5.219.872.000   | 3.895.200.000   | 2.589.184.200   |
| 6  | Sumatera Selatan     | 20.199.059.000  | 48.567.748.000  | 25.152.339.000  | 24.977.216.000  | 27.475.881.000  | 37.747.980.000  | 22.334.406.900  |
| 7  | Bengkulu             | 849.118.000     | 1.747.336.000   | 2.284.209.000   | 6.860.414.000   | 7.533.228.000   | 8.129.960.000   | 2.059.663.500   |
| 8  | Lampung              | 4.795.398.000   | 7.259.966.000   | 8.743.118.000   | 14.210.691.000  | 4.653.071.000   | 14.197.880.000  | 4.665.273.200   |
| 9  | Kep. Bangka Belitung | 2.208.873.000   | 2.957.243.000   | 3.928.776.000   | 3.776.425.000   | 4.186.359.000   | 2.551.180.000   | 2.683.217.400   |
| 10 | Kep. Riau            | 9.789.672.000   | 7.931.722.000   | 16.180.426.000  | 16.299.360.000  | 25.195.285.000  | 37.670.580.000  | 28.916.708.700  |
| 11 | Jawa Barat           | 108.514.209.000 | 108.763.667.000 | 112.093.499.000 | 122.152.028.000 | 133.564.811.000 | 119.471.140.000 | 148.616.088.500 |
| 12 | Jawa Tengah          | 27.597.782.000  | 38.842.794.000  | 53.866.297.000  | 61.478.063.000  | 57.680.879.000  | 49.969.320.000  | 39.207.691.200  |
| 13 | DI Yogyakarta        | 1.639.292.000   | 1.229.487.000   | 817.681.000     | 7.296.810.000   | 6.508.032.000   | 2.821.240.000   | 3.848.121.300   |
| 14 | Jawa Timur           | 72.655.815.000  | 74.148.071.000  | 67.496.877.000  | 52.442.055.000  | 57.867.645.000  | 78.032.800.000  | 52.084.192.200  |
| 15 | Banten               | 47.139.302.000  | 54.159.605.000  | 58.815.622.000  | 59.155.636.000  | 47.481.574.000  | 61.584.920.000  | 58.657.789.500  |
| 16 | Bali                 | 8.355.709.000   | 6.939.848.000   | 13.302.663.000  | 15.915.627.000  | 13.498.206.000  | 9.597.660.000   | 46.156.355.200  |
| 17 | Nusa Tenggara Barat  | 10.370.901.000  | 7.634.109.000   | 7.306.625.000   | 7.740.779.000   | 4.231.301.000   | 10.872.320.000  | 15.177.530.500  |
| 18 | Nusa Tenggara Timur  | 2.297.436.000   | 1.656.264.000   | 3.073.909.000   | 5.684.932.000   | 5.569.770.000   | 4.183.060.000   | 4.845.942.600   |

| <b>NO</b> | <b>PROVINSI</b>    | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    |
|-----------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 19        | Kalimantan Barat   | 25.285.416.000 | 18.054.061.000 | 20.526.640.000 | 13.640.818.000 | 15.327.491.000 | 20.038.660.000 | 11.376.453.400 |
| 20        | Kalimantan Tengah  | 14.649.521.000 | 14.029.014.000 | 12.223.971.000 | 22.815.183.000 | 12.654.738.000 | 6.232.020.000  | 5.139.659.800  |
| 21        | Kalimantan Selatan | 15.835.357.000 | 9.737.151.000  | 6.475.797.000  | 11.826.765.000 | 15.405.029.000 | 7.705.760.000  | 3.762.643.900  |
| 22        | Kalimantan Timur   | 43.739.143.000 | 23.216.707.000 | 29.398.401.000 | 34.361.462.000 | 34.290.991.000 | 31.301.700.000 | 16.689.737.400 |
| 23        | Kalimantan Utara   | 4.230.827.000  | 5.650.124.000  | 2.988.619.000  | 2.321.276.000  | 5.571.742.000  | 3.206.580.000  | 2.666.292.500  |
| 24        | Sulawesi Utara     | 1.531.728.000  | 10.555.506.000 | 8.408.639.000  | 8.560.642.000  | 11.419.585.000 | 5.216.640.000  | 4.080.300.000  |
| 25        | Sulawesi Tengah    | 16.520.401.000 | 24.015.099.000 | 24.079.693.000 | 18.125.064.000 | 30.306.255.000 | 30.523.200.000 | 40.999.832.300 |
| 26        | Sulawesi Selatan   | 12.558.722.000 | 8.672.897.000  | 12.184.536.000 | 12.120.993.000 | 10.009.160.000 | 12.494.720.000 | 7.921.475.400  |
| 27        | Sulawesi Tenggara  | 4.093.395.000  | 7.184.089.000  | 13.080.083.000 | 3.498.175.000  | 17.981.828.000 | 20.879.920.000 | 467.575.300    |
| 28        | Gorontalo          | 193.183.000    | 2.384.503.000  | 1.480.270.000  | 11.246.729.000 | 3.299.300.000  | 1.643.620.000  | 24.023.634.200 |
| 29        | Sulawesi Barat     | 1.132.462.000  | 379.318.000    | 823.573.000    | 3.251.504.000  | 1.331.943.000  | 2.613.300.000  | 1.577.204.300  |
| 30        | Maluku             | 1.180.874.000  | 1.481.760.000  | 3.090.472.000  | 1.128.148.000  | 756.123.000    | 2.984.040.000  | 617.799.700    |
| 31        | Maluku Utara       | 2.968.857.000  | 6.298.675.000  | 4.419.501.000  | 7.475.586.000  | 15.135.513.000 | 34.870.000.000 | 41.152.845.300 |
| 32        | Papua Barat        | 3.769.396.000  | 7.383.899.000  | 1.273.035.000  | 4.162.463.000  | 1.042.292.000  | 2.076.020.000  | 1.200.535.600  |
| 33        | Papua              | 14.130.107.000 | 16.964.840.000 | 28.792.177.000 | 16.331.591.000 | 14.053.171.000 | 10.783.640.000 | 22.495.130.800 |

## Lampiran 7 Dana Perimbangan di Indonesia Tahun 2015-2021 (Rupiah)

| NO | PROVINSI             | TAHUN          |                |                |                |                |                |                |
|----|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |                      | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
| 1  | Aceh                 | 20.350.592.633 | 18.382.886.364 | 22.001.006.678 | 24.556.087.722 | 24.751.364.613 | 21.126.762.716 | 21.126.762.715 |
| 2  | Sumatera Utara       | 31.217.123.008 | 33.048.601.144 | 37.041.792.393 | 39.984.871.033 | 41.065.473.825 | 34.449.805.820 | 33.351.860.639 |
| 3  | Sumatera Barat       | 18.546.036.644 | 17.256.099.393 | 21.378.530.215 | 20.992.673.472 | 22.281.656.963 | 18.329.546.074 | 19.146.156.315 |
| 4  | Riau                 | 14.216.425.425 | 17.978.848.478 | 17.360.912.128 | 21.581.057.716 | 26.589.197.769 | 20.412.037.534 | 19.316.518.764 |
| 5  | Jambi                | 10.732.438.800 | 11.076.030.712 | 11.919.466.142 | 13.397.092.802 | 14.679.768.978 | 12.290.953.014 | 12.133.783.152 |
| 6  | Sumatera Selatan     | 18.419.150.589 | 21.878.579.645 | 24.768.310.613 | 28.030.800.932 | 31.052.927.305 | 25.602.890.855 | 23.592.428.167 |
| 7  | Bengkulu             | 8.943.720.189  | 8.114.324.416  | 9.365.511.122  | 9.528.238.026  | 10.473.426.108 | 8.707.016.615  | 7.870.732.121  |
| 8  | Lampung              | 17.367.183.838 | 17.278.010.606 | 19.983.941.079 | 22.164.652.281 | 21.487.541.682 | 16.610.131.787 | 18.862.774.621 |
| 9  | Kep. Bangka Belitung | 6.758.026.871  | 5.967.517.532  | 8.513.555.440  | 7.210.509.379  | 7.226.611.679  | 5.965.038.811  | 6.326.751.296  |
| 10 | Kep. Riau            | 5.580.809.530  | 6.003.551.830  | 25.834.494.137 | 7.328.667.944  | 9.000.529.861  | 7.892.785.151  | 7.054.949.259  |
| 11 | Jawa Barat           | 52.593.274.615 | 55.131.877.302 | 41.806.988.031 | 64.210.169.203 | 67.681.420.796 | 60.086.170.232 | 61.533.851.770 |
| 12 | Jawa Tengah          | 51.461.222.451 | 57.222.571.190 | 59.257.013.072 | 61.244.268.545 | 62.949.070.312 | 55.232.571.119 | 57.729.112.511 |
| 13 | DI Yogyakarta        | 7.622.156.009  | 8.217.502.660  | 11.689.342.569 | 8.891.848.352  | 9.034.776.525  | 7.910.440.979  | 8.200.515.625  |
| 14 | Jawa Timur           | 59.145.880.978 | 60.408.922.687 | 48.942.175.753 | 71.380.090.567 | 77.450.823.194 | 64.342.431.184 | 67.527.655.058 |
| 15 | Banten               | 12.971.876.126 | 14.120.850.001 | 12.725.228.809 | 15.444.055.645 | 16.360.075.504 | 14.490.910.624 | 14.925.291.843 |
| 16 | Bali                 | 9.274.714.082  | 10.090.230.377 | 10.719.950.690 | 11.032.323.635 | 11.289.933.058 | 9.885.643.973  | 10.624.660.348 |
| 17 | Nusa Tenggara Barat  | 12.476.555.451 | 11.974.699.531 | 14.012.057.174 | 15.688.563.347 | 16.334.525.056 | 13.186.110.083 | 13.802.220.385 |
| 18 | Nusa Tenggara Timur  | 17.875.575.079 | 16.492.780.045 | 17.853.021.071 | 22.256.872.381 | 23.247.248.059 | 19.281.323.334 | 20.028.539.943 |
| 19 | Kalimantan Barat     | 16.078.581.323 | 15.296.570.611 | 21.938.974.095 | 19.875.126.296 | 20.015.474.156 | 16.330.022.308 | 17.583.463.650 |

| NO | PROVINSI           | TAHUN          |                |                |                |                |                |                |
|----|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |                    | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
| 20 | Kalimantan Tengah  | 14.141.474.763 | 14.329.623.383 | 17.412.813.747 | 16.828.782.168 | 17.022.696.155 | 14.569.765.203 | 14.827.934.606 |
| 21 | Kalimantan Selatan | 12.463.913.000 | 14.102.172.101 | 17.600.087.447 | 16.154.766.527 | 18.775.823.716 | 15.584.969.714 | 14.608.730.349 |
| 22 | Kalimantan Timur   | 14.009.465.900 | 15.667.841.144 | 17.154.284.734 | 19.882.038.264 | 23.356.146.665 | 21.528.453.076 | 16.892.821.465 |
| 23 | Kalimantan Utara   | 4.101.211.802  | 4.910.992.070  | 11.311.805.609 | 6.499.772.020  | 6.794.629.478  | 6.017.323.259  | 6.003.291.392  |
| 24 | Sulawesi Utara     | 12.525.800.059 | 10.832.589.376 | 12.313.674.420 | 14.503.786.319 | 13.937.639.067 | 11.639.093.469 | 12.055.762.067 |
| 25 | Sulawesi Tengah    | 13.165.264.793 | 12.248.830.613 | 16.700.748.878 | 16.054.943.193 | 16.678.594.976 | 14.204.299.696 | 14.214.164.452 |
| 26 | Sulawesi Selatan   | 26.215.504.673 | 24.043.227.632 | 21.560.619.682 | 32.783.836.917 | 31.727.504.627 | 26.643.961.553 | 28.081.526.213 |
| 27 | Sulawesi Tenggara  | 13.055.531.305 | 11.987.359.861 | 15.181.942.869 | 6.751.219.553  | 16.857.445.009 | 14.334.278.699 | 6.000.987.185  |
| 28 | Gorontalo          | 5.911.648.306  | 5.077.962.292  | 5.808.779.518  | 16.247.776.367 | 6.426.692.840  | 5.416.026.012  | 15.037.072.358 |
| 29 | Sulawesi Barat     | 6.378.976.152  | 5.444.242.381  | 6.100.514.204  | 6.721.552.101  | 7.143.760.837  | 5.980.711.787  | 5.617.909.200  |
| 30 | Maluku             | 10.415.623.388 | 9.284.491.034  | 9.784.755.004  | 12.825.203.104 | 12.752.234.415 | 10.488.862.568 | 11.565.350.234 |
| 31 | Maluku Utara       | 8.585.443.007  | 7.439.167.184  | 9.147.166.648  | 10.250.606.098 | 10.639.301.032 | 8.978.577.278  | 9.446.248.088  |
| 32 | Papua Barat        | 11.440.753.573 | 11.569.052.991 | 11.262.615.611 | 12.734.432.191 | 16.042.199.238 | 14.233.848.590 | 2.327.237.155  |
| 33 | Papua              | 30.270.982.287 | 27.163.691.932 | 26.034.874.697 | 35.283.186.438 | 34.784.131.486 | 28.373.771.912 | 30.587.810.366 |

Lampiran 8 Realisasi Anggaran Infrastruktur di Indonesia Tahun 2015-2021 (Rupiah)

| NO | PROVINSI             | TAHUN          |                |                |                |                |                |                |
|----|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |                      | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
| 1  | Aceh                 | 11.726.293.066 | 14.389.899.642 | 14.827.386.642 | 11.981.335.828 | 17.442.195.922 | 15.349.132.411 | 15.349.132.411 |
| 2  | Sumatera Utara       | 7.997.092.726  | 18.091.792.165 | 19.467.916.839 | 19.000.690.180 | 18.949.943.768 | 16.675.950.516 | 16.143.987.695 |
| 3  | Sumatera Barat       | 2.501.687.913  | 10.159.077.631 | 10.032.656.261 | 9.789.692.445  | 12.430.136.195 | 10.938.519.851 | 11.426.377.836 |
| 4  | Riau                 | 6.455.500.388  | 9.292.762.059  | 9.783.358.059  | 9.419.286.638  | 11.359.940.687 | 9.996.747.804  | 9.459.922.447  |
| 5  | Jambi                | 2.188.181.468  | 5.968.378.727  | 6.337.989.408  | 6.296.487.173  | 7.453.047.527  | 6.558.681.824  | 6.474.730.697  |
| 6  | Sumatera Selatan     | 4.492.638.118  | 11.199.765.657 | 13.158.617.916 | 14.469.892.342 | 18.234.228.340 | 16.046.120.939 | 14.786.500.445 |
| 7  | Bengkulu             | 2.422.827.980  | 3.907.048.203  | 4.198.672.261  | 3.893.331.959  | 4.388.847.966  | 3.862.186.210  | 3.491.416.334  |
| 8  | Lampung              | 5.312.596.811  | 9.740.001.973  | 10.602.923.864 | 10.450.002.656 | 8.986.928.648  | 7.908.497.210  | 8.980.889.432  |
| 9  | Kep. Bangka Belitung | 1.310.870.001  | 3.096.598.778  | 2.582.191.307  | 2.809.019.040  | 3.270.657.841  | 2.878.178.900  | 3.052.596.541  |
| 10 | Kep. Riau            | 2.175.270.436  | 3.721.447.694  | 3.828.358.442  | 4.331.393.460  | 4.722.256.134  | 4.155.585.398  | 3.714.262.229  |
| 11 | Jawa Barat           | 14.132.022.854 | 42.043.176.508 | 39.599.521.325 | 42.928.504.559 | 42.335.280.678 | 37.255.046.997 | 38.152.648.617 |
| 12 | Jawa Tengah          | 15.037.855.067 | 30.391.902.592 | 30.137.716.680 | 30.009.512.359 | 36.785.499.403 | 32.371.239.475 | 33.834.436.600 |
| 13 | DI Yogyakarta        | 2.001.950.750  | 4.409.156.167  | 4.467.525.124  | 5.108.300.210  | 5.216.871.098  | 4.590.846.566  | 4.759.192.199  |
| 14 | Jawa Timur           | 24.053.106.774 | 43.718.411.601 | 43.593.728.627 | 44.947.663.122 | 51.257.418.090 | 45.106.527.919 | 47.339.492.806 |
| 15 | Banten               | 7.729.002.781  | 12.399.707.207 | 12.816.046.073 | 14.328.155.926 | 14.641.387.741 | 12.884.421.212 | 13.270.646.118 |
| 16 | Bali                 | 2.055.485.584  | 13.534.975.726 | 8.667.981.329  | 8.445.623.150  | 8.733.774.484  | 7.685.721.545  | 8.260.279.368  |
| 17 | Nusa Tenggara Barat  | 1.259.667.994  | 6.741.124.047  | 8.326.781.736  | 8.083.221.906  | 8.309.928.110  | 7.312.736.737  | 7.654.418.432  |
| 18 | Nusa Tenggara Timur  | 2.242.388.877  | 9.557.665.569  | 9.120.898.773  | 9.056.335.802  | 9.793.231.476  | 8.618.043.698  | 8.952.022.091  |
| 19 | Kalimantan Barat     | 3.264.755.708  | 8.886.573.565  | 9.296.015.337  | 8.633.719.491  | 9.399.250.892  | 8.271.340.785  | 8.906.222.985  |

| NO | PROVINSI           | TAHUN         |                |                |                |                |                |                |
|----|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |                    | 2015          | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
| 20 | Kalimantan Tengah  | 3.347.259.273 | 7.728.309.905  | 7.506.853.790  | 7.478.616.347  | 7.837.956.500  | 6.897.401.720  | 7.019.620.442  |
| 21 | Kalimantan Selatan | 3.473.694.130 | 10.907.946.464 | 7.717.007.754  | 7.329.757.195  | 11.137.663.181 | 9.801.143.599  | 9.187.592.010  |
| 22 | Kalimantan Timur   | 6.888.557.528 | 11.561.626.468 | 10.166.714.482 | 12.189.276.126 | 15.219.208.089 | 13.392.903.119 | 10.509.411.077 |
| 23 | Kalimantan Utara   | 3.385.300.269 | 3.664.954.187  | 3.086.598.171  | 2.838.334.345  | 2.856.396.407  | 2.513.628.838  | 2.507.847.492  |
| 24 | Sulawesi Utara     | 2.438.842.549 | 6.938.170.313  | 6.713.815.186  | 6.518.644.496  | 6.914.639.563  | 6.084.882.816  | 6.302.715.897  |
| 25 | Sulawesi Tengah    | 3.142.022.843 | 7.126.558.466  | 6.853.469.008  | 6.409.859.201  | 7.427.641.186  | 6.536.324.244  | 6.540.863.661  |
| 26 | Sulawesi Selatan   | 6.179.317.116 | 13.154.905.834 | 15.989.324.590 | 14.264.154.452 | 14.675.899.472 | 12.914.791.535 | 13.611.604.127 |
| 27 | Sulawesi Tenggara  | 2.514.193.700 | 6.973.990.678  | 7.100.292.121  | 2.708.093.232  | 7.989.642.979  | 7.030.885.821  | 2.943.128.805  |
| 28 | Gorontalo          | 1.696.208.767 | 2.724.761.115  | 2.611.193.358  | 6.912.704.480  | 2.984.116.826  | 2.626.022.806  | 7.290.898.319  |
| 29 | Sulawesi Barat     | 493.818.015   | 3.327.973.708  | 2.961.101.587  | 2.852.994.489  | 2.882.310.478  | 2.536.433.221  | 2.382.471.724  |
| 30 | Maluku             | 3.157.051.270 | 5.249.141.328  | 5.951.804.144  | 6.199.705.532  | 4.862.646.995  | 4.279.129.355  | 4.718.302.806  |
| 31 | Maluku Utara       | 1.984.316.615 | 4.337.347.054  | 4.233.062.431  | 4.072.260.098  | 4.618.801.278  | 4.064.545.125  | 4.276.256.742  |
| 32 | Papua Barat        | 3.780.818.496 | 8.356.532.610  | 7.143.917.239  | 7.940.515.158  | 10.602.114.814 | 9.329.861.036  | 1.525.432.279  |
| 33 | Papua              | 8.937.421.857 | 17.155.821.972 | 15.846.539.246 | 16.342.468.937 | 15.491.182.108 | 13.632.240.255 | 14.695.979.832 |



Lampiran 9 Inflasi di Indonesia Tahun 2015-2021 (Rupiah)

| NO | PROVINSI             | TAHUN |      |      |      |      |      |      |
|----|----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
|    |                      | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1  | Aceh                 | 1.53  | 3.95 | 4.25 | 1.84 | 1.69 | 3.59 | 0.71 |
| 2  | Sumatera Utara       | 3.24  | 6.34 | 3.20 | 1.23 | 2.33 | 1.96 | 0.46 |
| 3  | Sumatera Barat       | 1.08  | 4.89 | 2.02 | 2.60 | 1.66 | 2.11 | 1.40 |
| 4  | Riau                 | 2.65  | 4.04 | 4.20 | 2.45 | 2.36 | 2.42 | 1.54 |
| 5  | Jambi                | 2.76  | 4.39 | 3.61 | 3.34 | 1.40 | 2.40 | 0.48 |
| 6  | Sumatera Selatan     | 3.10  | 3.58 | 2.96 | 2.74 | 2.06 | 1.55 | 1.82 |
| 7  | Bengkulu             | 3.25  | 5.00 | 3.56 | 2.35 | 2.91 | 0.89 | 2.42 |
| 8  | Lampung              | 4.65  | 1.02 | 3.14 | 2.73 | 3.44 | 2.00 | 2.19 |
| 9  | Kep. Bangka Belitung | 3.27  | 6.75 | 3.13 | 3.18 | 2.62 | 1.08 | 3.75 |
| 10 | Kep. Riau            | 4.40  | 3.53 | 4.02 | 3.47 | 2.03 | 1.18 | 2.26 |
| 11 | Jawa Barat           | 2.73  | 2.75 | 3.63 | 3.54 | 3.21 | 2.18 | 1.69 |
| 12 | Jawa Tengah          | 2.73  | 2.36 | 3.71 | 2.82 | 2.81 | 1.56 | 1.70 |
| 13 | DI Yogyakarta        | 3.09  | 2.29 | 4.20 | 2.66 | 2.77 | 1.40 | 2.29 |
| 14 | Jawa Timur           | 3.08  | 2.74 | 4.04 | 2.86 | 2.12 | 0.46 | 2.45 |
| 15 | Banten               | 4.29  | 3.75 | 3.98 | 3.42 | 3.30 | 1.45 | 1.91 |
| 16 | Bali                 | 2.75  | 7.51 | 6.69 | 3.13 | 1.57 | 0.08 | 2.07 |
| 17 | Nusa Tenggara Barat  | 3.41  | 2.61 | 3.70 | 3.16 | 1.87 | 0.60 | 2.12 |
| 18 | Nusa Tenggara Timur  | 4.92  | 2.48 | 2.00 | 3.07 | 0.67 | 0.61 | 1.67 |
| 19 | Kalimantan Barat     | 5.79  | 3.66 | 3.61 | 3.13 | 2.64 | 2.46 | 1.45 |
| 20 | Kalimantan Tengah    | 4.74  | 2.11 | 3.11 | 3.68 | 2.70 | 0.71 | 3.32 |
| 21 | Kalimantan Selatan   | 5.14  | 3.57 | 3.82 | 2.63 | 4.01 | 1.68 | 2.55 |
| 22 | Kalimantan Timur     | 4.89  | 3.39 | 3.15 | 3.24 | 1.66 | 0.78 | 2.15 |
| 23 | Kalimantan Utara     | 3.42  | 4.31 | 2.77 | 5.00 | 1.47 | 1.32 | 2.73 |
| 24 | Sulawesi Utara       | 5.56  | 3.02 | 2.44 | 3.13 | 3.52 | 3.67 | 2.51 |
| 25 | Sulawesi Tengah      | 4.17  | 1.49 | 4.33 | 6.46 | 2.30 | 1.62 | 2.20 |
| 26 | Sulawesi Selatan     | 4.48  | 2.94 | 4.44 | 3.50 | 2.35 | 2.04 | 2.40 |
| 27 | Sulawesi Tenggara    | 3.35  | 3.07 | 2.96 | 1.80 | 3.22 | 1.78 | 4.39 |
| 28 | Gorontalo            | 4.30  | 1.30 | 4.34 | 2.55 | 2.87 | 1.37 | 3.05 |
| 29 | Sulawesi Barat       | 5.07  | 2.23 | 3.79 | 2.15 | 1.43 | 0.81 | 2.59 |
| 30 | Maluku               | 0.62  | 0.48 | 0.78 | 1.20 | 2.08 | 0.09 | 4.01 |
| 31 | Maluku Utara         | 4.52  | 1.91 | 1.97 | 4.12 | 2.24 | 2.13 | 2.38 |
| 32 | Papua Barat          | 5.34  | 3.62 | 1.44 | 5.21 | 5.77 | 0.79 | 3.47 |
| 33 | Papua                | 3.35  | 3.26 | 3.66 | 3.83 | 1.03 | 1.30 | 1.79 |

Lampiran 10 Dana desa di Indonesia Tahun 2015-2021 (Rupiah)

| NO | PROVINSI             | TAHUN         |               |               |               |               |               |               |
|----|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                      | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
| 1  | Aceh                 | 1.707.817.995 | 3.829.751.986 | 4.892.571.795 | 4.457.512.950 | 4.955.500.482 | 5.050.301.259 | 4.986.622.282 |
| 2  | Sumatera Utara       | 1.461.156.834 | 3.293.282.206 | 4.197.972.490 | 3.874.857.829 | 4.452.049.366 | 4.554.128.079 | 4.525.292.326 |
| 3  | Sumatera Barat       | 267.003.839   | 598.637.609   | 796.538.971   | 790.787.312   | 932.325.519   | 961.135.402   | 992.597.548   |
| 4  | Riau                 | 445.646.965   | 999.278.616   | 1.269.305.925 | 1.254.688.851 | 1.436.685.874 | 1.470.374.050 | 1.484.815.447 |
| 5  | Jambi                | 381.560.156   | 856.771.029   | 1.090.942.601 | 1.037.674.061 | 1.184.558.060 | 1.221.842.427 | 1.222.139.342 |
| 6  | Sumatera Selatan     | 775.043.818   | 1.780.769.519 | 2.267.261.445 | 2.309.392.954 | 2.683.946.345 | 2.712.779.047 | 2.692.090.368 |
| 7  | Bengkulu             | 362.962.239   | 813.896.546   | 1.035.340.413 | 945.638.279   | 1.079.418.707 | 1.099.512.847 | 1.085.359.570 |
| 8  | Lampung              | 684.727.653   | 1.536.762.050 | 1.957.487.721 | 2.091.398.105 | 2.427.111.117 | 2.454.053.315 | 2.441.161.413 |
| 9  | Kep. Bangka Belitung | 91.927.560    | 206.293.612   | 261.661.579   | 264.571.725   | 309.831.614   | 321.740.760   | 334.531.471   |
| 10 | Kep. Riau            | 79.199.724    | 177.766.079   | 228.182.536   | 221.500.941   | 261.333.056   | 273.346.665   | 276.396.391   |
| 11 | Jawa Barat           | 1.589.711.596 | 3.568.437.985 | 4.547.513.838 | 4.823.095.418 | 5.710.074.611 | 5.940.216.905 | 5.990.622.942 |
| 12 | Jawa Tengah          | 2.228.889.296 | 5.002.426.341 | 6.384.442.058 | 6.737.083.091 | 7.889.431.604 | 8.200.608.600 | 8.157.169.762 |
| 13 | DI Yogyakarta        | 128.076.618   | 287.695.629   | 368.567.559   | 361.894.397   | 423.785.125   | 448.690.293   | 460.455.838   |
| 14 | Jawa Timur           | 2.214.014.855 | 4.969.123.651 | 6.339.556.181 | 6.368.745.359 | 7.441.561.392 | 7.654.234.840 | 7.659.802.915 |
| 15 | Banten               | 352.516.368   | 791.252.019   | 1.009.506.961 | 937.180.879   | 1.092.073.316 | 1.122.813.298 | 1.135.031.921 |
| 16 | Bali                 | 185.428.984   | 416.264.690   | 537.258.505   | 531.141.963   | 630.189.586   | 657.798.211   | 679.123.617   |
| 17 | Nusa Tenggara Barat  | 301.797.520   | 677.494.427   | 865.014.066   | 983.185.878   | 1.181.329.455 | 1.233.354.121 | 1.247.727.848 |
| 18 | Nusa Tenggara Timur  | 812.875.565   | 1.849.353.802 | 2.360.353.320 | 2.537.837.576 | 3.020.504.603 | 3.090.060.054 | 3.059.653.902 |
| 19 | Kalimantan Barat     | 537.066.678   | 1.241.607.506 | 1.616.725.259 | 1.688.279.973 | 1.992.571.733 | 2.042.632.135 | 2.061.328.499 |

| NO | PROVINSI           | TAHUN         |               |               |               |               |               |               |
|----|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                    | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
| 20 | Kalimantan Tengah  | 403.351.015   | 904.370.668   | 1.148.904.929 | 1.144.586.424 | 1.347.142.545 | 1.403.071.877 | 1.426.889.276 |
| 21 | Kalimantan Selatan | 501.119.950   | 1.125.244.835 | 1.430.375.412 | 1.316.573.429 | 1.506.337.021 | 1.533.082.274 | 1.525.770.457 |
| 22 | Kalimantan Timur   | 240.542.413   | 540.759.158   | 692.420.247   | 730.928.055   | 870.119.582   | 908.976.179   | 939.074.018   |
| 23 | Kalimantan Utara   | 129.874.894   | 291.096.987   | 369.938.349   | 387.688.280   | 463.268.514   | 487.453.221   | 503.042.462   |
| 24 | Sulawesi Utara     | 402.546.360   | 911.498.499   | 1.161.358.872 | 1.065.411.508 | 1.210.560.814 | 1.241.529.043 | 1.227.039.030 |
| 25 | Sulawesi Tengah    | 500.301.180   | 1.124.644.395 | 1.433.826.019 | 1.363.158.368 | 1.567.950.719 | 1.610.204.714 | 1.597.596.005 |
| 26 | Sulawesi Selatan   | 635.355.795   | 1.425.595.011 | 1.820.518.240 | 1.986.216.686 | 2.351.148.984 | 2.382.220.597 | 2.372.807.818 |
| 27 | Sulawesi Tenggara  | 496.077.234   | 1.126.867.317 | 1.482.032.772 | 1.411.237.132 | 1.613.817.589 | 1.653.925.686 | 1.636.862.682 |
| 28 | Gorontalo          | 179.957.839   | 403.677.978   | 513.958.123   | 540.591.708   | 636.614.465   | 644.017.610   | 639.158.141   |
| 29 | Sulawesi Barat     | 162.019.634   | 363.558.853   | 461.094.687   | 472.270.192   | 560.226.664   | 574.952.086   | 576.443.184   |
| 30 | Maluku             | 334.004.517   | 754.638.987   | 961.602.798   | 964.700.076   | 1.122.509.201 | 1.159.385.596 | 1.158.272.522 |
| 31 | Maluku Utara       | 291.071.202   | 653.455.314   | 832.406.416   | 785.606.677   | 891.604.070   | 921.882.920   | 919.556.082   |
| 32 | Papua Barat        | 449.326.962   | 1.074.690.239 | 1.364.412.395 | 1.329.719.076 | 1.516.915.258 | 1.560.810.537 | 1.551.501.373 |
| 33 | Papua              | 1.433.226.742 | 3.385.116.457 | 4.300.947.518 | 4.284.844.848 | 5.237.503.009 | 5.408.865.352 | 5.434.063.548 |

## Lampiran 11 Tabulasi Data Penelitian

| <b>TAHUN</b> | <b>PROVINSI</b>      | <b>X1 (Rp)</b> | <b>X2 (Rp)</b> | <b>X3 (Rp)</b> | <b>X4 (%)</b> | <b>Y1 (Rp)</b>  | <b>Y2 (%)</b> | <b>Y3 (%)</b> | <b>Y4 (%)</b> |
|--------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2015         | Aceh                 | 20,350,592,633 | 1,707,817,995  | 11,726,293,066 | 1.53          | 4,496,217,000   | -0.73         | 0.339         | 17.11         |
| 2015         | Sumatera Utara       | 31,217,123,008 | 1,461,156,834  | 7,997,092,726  | 3.24          | 22,145,259,000  | 5.10          | 0.326         | 10.79         |
| 2015         | Sumatera Barat       | 18,546,036,644 | 267,003,839    | 2,501,687,913  | 1.08          | 2,370,800,000   | 5.53          | 0.319         | 6.71          |
| 2015         | Riau                 | 14,216,425,425 | 445,646,965    | 6,455,500,388  | 2.65          | 19,306,875,000  | 0.22          | 0.366         | 8.82          |
| 2015         | Jambi                | 10,732,438,800 | 381,560,156    | 2,188,181,468  | 2.76          | 5,083,648,000   | 4.21          | 0.344         | 9.12          |
| 2015         | Sumatera Selatan     | 18,419,150,589 | 775,043,818    | 4,492,638,118  | 3.10          | 20,199,059,000  | 4.42          | 0.334         | 13.77         |
| 2015         | Bengkulu             | 8,943,720,189  | 362,962,239    | 2,422,827,980  | 3.25          | 849,118,000     | 5.13          | 0.371         | 17.16         |
| 2015         | Lampung              | 17,367,183,838 | 684,727,650    | 5,312,596,811  | 4.65          | 4,795,398,000   | 5.13          | 0.352         | 13.53         |
| 2015         | Kep. Bangka Belitung | 6,758,026,871  | 91,927,560     | 1,310,870,001  | 3.27          | 2,208,873,000   | 4.08          | 0.275         | 4.83          |
| 2015         | Kep. Riau            | 5,580,809,530  | 79,199,724     | 2,175,270,436  | 4.40          | 9,789,672,000   | 6.02          | 0.339         | 5.78          |
| 2015         | Jawa Barat           | 52,593,274,615 | 1,589,711,596  | 14,132,022,854 | 2.73          | 108,514,209,000 | 5.05          | 0.426         | 9.57          |
| 2015         | Jawa Tengah          | 51,461,222,451 | 2,228,889,296  | 15,037,855,067 | 2.73          | 27,597,782,000  | 5.47          | 0.382         | 13.32         |
| 2015         | DI Yogyakarta        | 7,622,156,009  | 128,076,618    | 2,001,950,750  | 3.09          | 1,639,292,000   | 4.95          | 0.420         | 13.16         |
| 2015         | Jawa Timur           | 59,145,880,978 | 2,214,014,855  | 24,053,106,774 | 3.08          | 72,655,815,000  | 5.44          | 0.403         | 12.28         |
| 2015         | Banten               | 12,971,876,126 | 352,516,368    | 7,729,002,781  | 4.29          | 47,139,302,000  | 5.45          | 0.386         | 5.75          |
| 2015         | Bali                 | 9,274,714,082  | 185,428,984    | 2,055,485,584  | 2.75          | 8,355,709,000   | 6.03          | 0.399         | 5.25          |
| 2015         | Nusa Tenggara Barat  | 12,476,555,451 | 301,797,520    | 1,259,667,994  | 3.41          | 10,370,901,000  | 21.76         | 0.360         | 16.54         |
| 2015         | Nusa Tenggara Timur  | 17,875,575,079 | 812,875,565    | 2,242,388,877  | 4.92          | 2,297,436,000   | 4.92          | 0.348         | 22.58         |
| 2015         | Kalimantan Barat     | 16,078,581,323 | 537,066,678    | 3,264,755,708  | 5.79          | 25,285,416,000  | 4.88          | 0.330         | 8.44          |
| 2015         | Kalimantan Tengah    | 14,141,474,763 | 403,351,015    | 3,347,259,273  | 4.74          | 14,649,521,000  | 7.01          | 0.300         | 5.91          |

| TAHUN | PROVINSI             | X1 (Rp)        | X2 (Rp)       | X3 (Rp)        | X4 (%) | Y1 (Rp)        | Y2 (%) | Y3 (%) | Y4 (%) |
|-------|----------------------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 2015  | Kalimantan Selatan   | 12,463,913,000 | 501,119,950   | 3,473,694,130  | 5.14   | 15,835,357,000 | 3.82   | 0.334  | 4.72   |
| 2015  | Kalimantan Timur     | 14,009,465,900 | 240,542,413   | 6,888,557,528  | 4.89   | 43,739,143,000 | -1.20  | 0.315  | 6.10   |
| 2015  | Kalimantan Utara     | 4,101,211,802  | 129,874,894   | 3,385,300,269  | 3.42   | 4,230,827,000  | 3.40   | 0.314  | 6.32   |
| 2015  | Sulawesi Utara       | 12,525,800,059 | 402,546,360   | 2,438,842,549  | 5.56   | 1,531,728,000  | 6.12   | 0.366  | 8.98   |
| 2015  | Sulawesi Tengah      | 13,165,264,793 | 500,301,180   | 3,142,022,843  | 4.17   | 16,520,401,000 | 15.50  | 0.370  | 14.07  |
| 2015  | Sulawesi Selatan     | 26,215,504,673 | 635,355,795   | 6,179,317,116  | 4.48   | 12,558,722,000 | 7.19   | 0.404  | 10.12  |
| 2015  | Sulawesi Tenggara    | 13,055,531,305 | 496,077,234   | 2,514,193,700  | 3.35   | 4,093,395,000  | 6.88   | 0.381  | 13.74  |
| 2015  | Gorontalo            | 5,911,648,306  | 179,957,839   | 1,696,208,767  | 4.30   | 193,183,000    | 6.22   | 0.401  | 18.16  |
| 2015  | Sulawesi Barat       | 6,378,976,152  | 162,019,634   | 493,818,015    | 5.07   | 1,132,462,000  | 7.31   | 0.362  | 11.90  |
| 2015  | Maluku               | 10,415,623,388 | 334,004,517   | 3,157,051,270  | 0.62   | 1,180,874,000  | 5.48   | 0.338  | 19.36  |
| 2015  | Maluku Utara         | 8,585,443,007  | 291,071,202   | 1,984,316,615  | 4.52   | 2,968,857,000  | 6.10   | 0.286  | 6.22   |
| 2015  | Papua Barat          | 11,440,753,573 | 449,326,962   | 3,780,818,496  | 5.34   | 3,769,396,000  | 4.15   | 0.428  | 25.73  |
| 2015  | Papua                | 30,270,982,287 | 1,433,226,742 | 8,937,421,857  | 3.35   | 14,130,107,000 | 7.35   | 0.392  | 28.40  |
| 2016  | Aceh                 | 18,382,886,364 | 3,829,751,986 | 14,389,899,642 | 3.95   | 4,383,619,000  | 3.29   | 0.341  | 16.43  |
| 2016  | Sumatera Utara       | 33,048,601,144 | 3,293,282,206 | 18,091,792,165 | 6.34   | 19,405,865,000 | 5.18   | 0.312  | 10.27  |
| 2016  | Sumatera Barat       | 17,256,099,393 | 598,637,609   | 10,159,077,631 | 4.89   | 4,932,048,000  | 5.27   | 0.312  | 7.14   |
| 2016  | Riau                 | 17,978,848,478 | 999,278,616   | 9,292,762,059  | 4.04   | 19,068,772,000 | 2.18   | 0.347  | 7.67   |
| 2016  | Jambi                | 11,076,030,712 | 856,771,029   | 5,968,378,727  | 4.39   | 4,758,591,000  | 4.37   | 0.346  | 8.37   |
| 2016  | Sumatera Selatan     | 21,878,579,645 | 1,780,769,519 | 11,199,765,657 | 3.58   | 48,567,748,000 | 5.04   | 0.362  | 13.39  |
| 2016  | Bengkulu             | 8,114,324,416  | 813,896,546   | 3,907,048,203  | 5.00   | 1,747,336,000  | 5.28   | 0.354  | 17.03  |
| 2016  | Lampung              | 17,278,010,606 | 1,536,762,050 | 9,740,001,973  | 1.02   | 7,259,966,000  | 5.14   | 0.358  | 13.86  |
| 2016  | Kep. Bangka Belitung | 5,967,517,532  | 206,293,612   | 3,096,598,778  | 6.75   | 2,957,243,000  | 4.10   | 0.288  | 5.04   |

| TAHUN | PROVINSI            | X1 (Rp)        | X2 (Rp)       | X3 (Rp)        | X4 (%) | Y1 (Rp)         | Y2 (%) | Y3 (%) | Y4 (%) |
|-------|---------------------|----------------|---------------|----------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|
| 2016  | Kep. Riau           | 6,003,551,830  | 177,766,079   | 3,721,447,694  | 3.53   | 7,931,722,000   | 4.98   | 0.352  | 5.84   |
| 2016  | Jawa Barat          | 55,131,877,302 | 3,568,437,985 | 42,043,176,508 | 2.75   | 108,763,667,000 | 5.66   | 0.402  | 8.77   |
| 2016  | Jawa Tengah         | 57,222,571,190 | 5,002,426,341 | 30,391,902,592 | 2.36   | 38,842,794,000  | 5.25   | 0.357  | 13.19  |
| 2016  | DI Yogyakarta       | 8,217,502,660  | 287,695,629   | 4,409,156,167  | 2.29   | 1,229,487,000   | 5.05   | 0.425  | 13.10  |
| 2016  | Jawa Timur          | 60,408,922,687 | 4,969,123,651 | 43,718,411,601 | 2.74   | 74,148,071,000  | 5.57   | 0.402  | 11.85  |
| 2016  | Banten              | 14,120,850,001 | 791,252,019   | 12,399,707,207 | 3.75   | 54,159,605,000  | 5.28   | 0.392  | 5.36   |
| 2016  | Bali                | 10,090,230,377 | 416,264,690   | 13,534,975,726 | 7.51   | 6,939,848,000   | 6.33   | 0.374  | 4.15   |
| 2016  | Nusa Tenggara Barat | 11,974,699,531 | 677,494,427   | 6,741,124,047  | 2.61   | 7,634,109,000   | 5.81   | 0.365  | 16.02  |
| 2016  | Nusa Tenggara Timur | 16,492,780,045 | 1,849,353,802 | 9,557,665,569  | 2.48   | 1,656,264,000   | 5.12   | 0.362  | 22.01  |
| 2016  | Kalimantan Barat    | 15,296,570,611 | 1,241,607,506 | 8,886,573,565  | 3.66   | 18,054,061,000  | 5.20   | 0.331  | 8.00   |
| 2016  | Kalimantan Tengah   | 14,329,623,383 | 904,370,668   | 7,728,309,905  | 2.11   | 14,029,014,000  | 6.35   | 0.347  | 5.36   |
| 2016  | Kalimantan Selatan  | 14,102,172,101 | 1,125,244,835 | 10,907,946,464 | 3.57   | 9,737,151,000   | 4.40   | 0.351  | 4.52   |
| 2016  | Kalimantan Timur    | 15,667,841,144 | 540,759,158   | 11,561,626,468 | 3.39   | 23,216,707,000  | -0.38  | 0.328  | 6.00   |
| 2016  | Kalimantan Utara    | 4,910,992,070  | 291,096,987   | 3,664,954,187  | 4.31   | 5,650,124,000   | 3.55   | 0.305  | 6.99   |
| 2016  | Sulawesi Utara      | 10,832,589,376 | 911,498,499   | 6,938,170,313  | 3.02   | 10,555,506,000  | 6.16   | 0.379  | 8.20   |
| 2016  | Sulawesi Tengah     | 12,248,830,613 | 1,124,644,395 | 7,126,558,466  | 1.49   | 24,015,099,000  | 9.94   | 0.347  | 14.09  |
| 2016  | Sulawesi Selatan    | 24,043,227,632 | 1,425,595,011 | 13,154,905,834 | 2.94   | 8,672,897,000   | 7.42   | 0.400  | 9.24   |
| 2016  | Sulawesi Tenggara   | 11,987,359,861 | 1,126,867,317 | 6,973,990,678  | 3.07   | 7,184,089,000   | 6.51   | 0.388  | 12.77  |
| 2016  | Gorontalo           | 5,077,962,292  | 403,677,978   | 2,724,761,115  | 1.30   | 2,384,503,000   | 6.52   | 0.410  | 17.63  |
| 2016  | Sulawesi Barat      | 5,444,242,381  | 363,558,853   | 3,327,973,708  | 2.23   | 379,318,000     | 6.01   | 0.371  | 11.19  |
| 2016  | Maluku              | 9,284,491,034  | 754,638,987   | 5,249,141,328  | 0.48   | 1,481,760,000   | 5.73   | 0.344  | 19.26  |

| TAHUN | PROVINSI             | X1 (Rp)        | X2 (Rp)       | X3 (Rp)        | X4 (%) | Y1 (Rp)         | Y2 (%) | Y3 (%) | Y4 (%) |
|-------|----------------------|----------------|---------------|----------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|
| 2016  | Maluku Utara         | 7,439,167,184  | 653,455,314   | 4,337,347,054  | 1.91   | 6,298,675,000   | 5.77   | 0.309  | 6.41   |
| 2016  | Papua Barat          | 11,569,052,991 | 1,074,690,239 | 8,356,532,610  | 3.62   | 7,383,899,000   | 4.52   | 0.401  | 24.88  |
| 2016  | Papua                | 27,163,691,932 | 3,385,116,457 | 17,155,821,972 | 3.26   | 16,964,840,000  | 9.14   | 0.399  | 28.40  |
| 2017  | Aceh                 | 22,001,006,678 | 4,892,571,795 | 14,827,386,642 | 4.25   | 1,115,279,000   | 4.18   | 0.329  | 15.92  |
| 2017  | Sumatera Utara       | 37,041,792,393 | 4,197,972,490 | 19,467,916,839 | 3.20   | 33,393,631,000  | 5.12   | 0.335  | 9.28   |
| 2017  | Sumatera Barat       | 21,378,530,215 | 796,538,971   | 10,032,656,261 | 2.02   | 4,302,946,000   | 5.30   | 0.312  | 6.75   |
| 2017  | Riau                 | 17,360,912,128 | 1,269,305,925 | 9,783,358,059  | 4.20   | 26,036,424,000  | 2.66   | 0.325  | 7.41   |
| 2017  | Jambi                | 11,919,466,142 | 1,090,942,601 | 6,337,989,408  | 3.61   | 4,107,220,000   | 4.60   | 0.334  | 7.90   |
| 2017  | Sumatera Selatan     | 24,768,310,613 | 2,267,261,445 | 13,158,617,916 | 2.96   | 25,152,339,000  | 5.51   | 0.365  | 13.10  |
| 2017  | Bengkulu             | 9,365,511,122  | 1,035,340,413 | 4,198,672,261  | 3.56   | 2,284,209,000   | 4.98   | 0.349  | 15.59  |
| 2017  | Lampung              | 19,983,941,079 | 1,957,487,721 | 10,602,923,864 | 3.14   | 8,743,118,000   | 5.16   | 0.333  | 13.04  |
| 2017  | Kep. Bangka Belitung | 8,513,555,440  | 261,661,579   | 2,582,191,307  | 3.13   | 3,928,776,000   | 4.47   | 0.276  | 5.30   |
| 2017  | Kep. Riau            | 25,834,494,137 | 228,182,536   | 3,828,358,442  | 4.02   | 16,180,426,000  | 1.98   | 0.359  | 6.13   |
| 2017  | Jawa Barat           | 41,806,988,031 | 4,547,513,838 | 39,599,521,325 | 3.63   | 112,093,499,000 | 5.33   | 0.393  | 7.83   |
| 2017  | Jawa Tengah          | 59,257,013,072 | 6,384,442,058 | 30,137,716,680 | 3.71   | 53,866,297,000  | 5.26   | 0.365  | 12.23  |
| 2017  | DI Yogyakarta        | 11,689,342,569 | 368,567,559   | 4,467,525,124  | 4.20   | 817,681,000     | 5.26   | 0.440  | 12.36  |
| 2017  | Jawa Timur           | 48,942,175,753 | 6,339,556,181 | 43,593,728,627 | 4.04   | 67,496,877,000  | 5.46   | 0.415  | 11.20  |
| 2017  | Banten               | 12,725,228,809 | 1,009,506,961 | 12,816,046,073 | 3.98   | 58,815,622,000  | 5.75   | 0.379  | 5.59   |
| 2017  | Bali                 | 10,719,950,690 | 537,258,505   | 8,667,981,329  | 6.69   | 13,302,663,000  | 5.56   | 0.379  | 4.14   |
| 2017  | Nusa Tenggara Barat  | 14,012,057,174 | 865,014,066   | 8,326,781,736  | 3.70   | 7,306,625,000   | 0.09   | 0.378  | 15.05  |
| 2017  | Nusa Tenggara Timur  | 17,853,021,071 | 2,360,353,320 | 9,120,898,773  | 2.00   | 3,073,909,000   | 5.11   | 0.359  | 21.38  |
| 2017  | Kalimantan Barat     | 21,938,974,095 | 1,616,725,259 | 9,296,015,337  | 3.61   | 20,526,640,000  | 5.17   | 0.329  | 7.86   |

| TAHUN | PROVINSI           | X1 (Rp)        | X2 (Rp)       | X3 (Rp)        | X4 (%) | Y1 (Rp)        | Y2 (%) | Y3 (%) | Y4 (%) |
|-------|--------------------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 2017  | Kalimantan Tengah  | 17,412,813,747 | 1,148,904,929 | 7,506,853,790  | 3.11   | 12,223,971,000 | 6.73   | 0.327  | 5.26   |
| 2017  | Kalimantan Selatan | 17,600,087,447 | 1,430,375,412 | 7,717,007,754  | 3.82   | 6,475,797,000  | 5.28   | 0.347  | 4.70   |
| 2017  | Kalimantan Timur   | 17,154,284,734 | 692,420,247   | 10,166,714,482 | 3.15   | 29,398,401,000 | 3.13   | 0.333  | 6.08   |
| 2017  | Kalimantan Utara   | 11,311,805,609 | 369,938,349   | 3,086,598,171  | 2.77   | 2,988,619,000  | 6.80   | 0.313  | 6.96   |
| 2017  | Sulawesi Utara     | 12,313,674,420 | 1,161,358,872 | 6,713,815,186  | 2.44   | 8,408,639,000  | 6.31   | 0.394  | 7.90   |
| 2017  | Sulawesi Tengah    | 16,700,748,878 | 1,433,826,019 | 6,853,469,008  | 4.33   | 24,079,693,000 | 7.10   | 0.345  | 14.22  |
| 2017  | Sulawesi Selatan   | 21,560,619,682 | 1,820,518,240 | 15,989,324,590 | 4.44   | 12,184,536,000 | 7.21   | 0.429  | 9.48   |
| 2017  | Sulawesi Tenggara  | 15,181,942,869 | 1,482,032,772 | 7,100,292,121  | 2.96   | 13,080,083,000 | 6.76   | 0.404  | 11.97  |
| 2017  | Gorontalo          | 5,808,779,518  | 513,958,123   | 2,611,193,358  | 4.34   | 1,480,270,000  | 6.73   | 0.405  | 17.14  |
| 2017  | Sulawesi Barat     | 6,100,514,204  | 461,094,687   | 2,961,101,587  | 3.79   | 823,573,000    | 6.39   | 0.339  | 11.18  |
| 2017  | Maluku             | 9,784,755,004  | 961,602,798   | 5,951,804,144  | 0.78   | 3,090,472,000  | 5.82   | 0.321  | 18.29  |
| 2017  | Maluku Utara       | 9,147,166,648  | 832,406,416   | 4,233,062,431  | 1.97   | 4,419,501,000  | 7.67   | 0.330  | 6.44   |
| 2017  | Papua Barat        | 11,262,615,611 | 1,364,412,395 | 7,143,917,239  | 1.44   | 1,273,035,000  | 4.02   | 0.387  | 23.12  |
| 2017  | Papua              | 26,034,874,697 | 4,300,947,518 | 15,846,539,246 | 3.66   | 28,792,177,000 | 4.64   | 0.398  | 27.76  |
| 2018  | Aceh               | 24,556,087,722 | 4,457,512,950 | 11,981,335,828 | 1.84   | 1,990,367,000  | 4.61   | 0.318  | 15.68  |
| 2018  | Sumatera Utara     | 39,984,871,033 | 3,874,857,829 | 19,000,690,180 | 1.23   | 25,964,535,000 | 5.18   | 0.311  | 8.94   |
| 2018  | Sumatera Barat     | 20,992,673,472 | 790,787,312   | 9,789,692,445  | 2.60   | 4,900,444,000  | 5.14   | 0.305  | 6.55   |
| 2018  | Riau               | 21,581,057,716 | 1,254,688,851 | 9,419,286,638  | 2.45   | 23,858,889,000 | 2.35   | 0.347  | 7.21   |
| 2018  | Jambi              | 13,397,092,802 | 1,037,674,061 | 6,296,487,173  | 3.34   | 4,336,828,000  | 4.69   | 0.335  | 7.85   |
| 2018  | Sumatera Selatan   | 28,030,800,932 | 2,309,392,954 | 14,469,892,342 | 2.74   | 24,977,216,000 | 6.01   | 0.341  | 12.82  |
| 2018  | Bengkulu           | 9,528,238,026  | 945,638,279   | 3,893,331,959  | 2.35   | 6,860,414,000  | 4.97   | 0.355  | 15.41  |
| 2018  | Lampung            | 22,164,652,281 | 2,091,398,105 | 10,450,002,656 | 2.73   | 14,210,691,000 | 5.23   | 0.326  | 13.01  |



| TAHUN | PROVINSI             | X1 (Rp)        | X2 (Rp)       | X3 (Rp)        | X4 (%) | Y1 (Rp)         | Y2 (%) | Y3 (%) | Y4 (%) |
|-------|----------------------|----------------|---------------|----------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|
| 2018  | Kep. Bangka Belitung | 7,210,509,379  | 264,571,725   | 2,809,019,040  | 3.18   | 3,776,425,000   | 4.45   | 0.272  | 4.77   |
| 2018  | Kep. Riau            | 7,328,667,944  | 221,500,941   | 4,331,393,460  | 3.47   | 16,299,360,000  | 4.47   | 0.339  | 5.83   |
| 2018  | Jawa Barat           | 64,210,169,203 | 4,823,095,418 | 42,928,504,559 | 3.54   | 122,152,028,000 | 5.65   | 0.405  | 7.25   |
| 2018  | Jawa Tengah          | 61,244,268,545 | 6,737,083,091 | 30,009,512,359 | 2.82   | 61,478,063,000  | 5.30   | 0.357  | 11.19  |
| 2018  | DI Yogyakarta        | 8,891,848,352  | 361,894,397   | 5,108,300,210  | 2.66   | 7,296,810,000   | 6.20   | 0.422  | 11.81  |
| 2018  | Jawa Timur           | 71,380,090,567 | 6,368,745,359 | 44,947,663,122 | 2.86   | 52,442,055,000  | 5.47   | 0.371  | 10.85  |
| 2018  | Banten               | 15,444,055,645 | 937,180,879   | 14,328,155,926 | 3.42   | 59,155,636,000  | 5.77   | 0.367  | 5.25   |
| 2018  | Bali                 | 11,032,323,635 | 531,141,963   | 8,445,623,150  | 3.13   | 15,915,627,000  | 6.31   | 0.364  | 3.91   |
| 2018  | Nusa Tenggara Barat  | 15,688,563,347 | 983,185,878   | 8,083,221,906  | 3.16   | 7,740,779,000   | -4.50  | 0.391  | 14.63  |
| 2018  | Nusa Tenggara Timur  | 22,256,872,381 | 2,537,837,576 | 9,056,335,802  | 3.07   | 5,684,932,000   | 5.11   | 0.359  | 21.03  |
| 2018  | Kalimantan Barat     | 19,875,126,296 | 1,688,279,973 | 8,633,719,491  | 3.13   | 13,640,818,000  | 5.07   | 0.325  | 7.37   |
| 2018  | Kalimantan Tengah    | 16,828,782,168 | 1,144,586,424 | 7,478,616,347  | 3.68   | 22,815,183,000  | 5.61   | 0.344  | 5.10   |
| 2018  | Kalimantan Selatan   | 16,154,766,527 | 1,316,573,429 | 7,329,757,195  | 2.63   | 11,826,765,000  | 5.08   | 0.340  | 4.65   |
| 2018  | Kalimantan Timur     | 19,882,038,264 | 730,928,055   | 12,189,276,126 | 3.24   | 34,361,462,000  | 2.64   | 0.342  | 6.06   |
| 2018  | Kalimantan Utara     | 6,499,772,020  | 387,688,280   | 2,838,334,345  | 5.00   | 2,321,276,000   | 5.36   | 0.304  | 6.86   |
| 2018  | Sulawesi Utara       | 14,503,786,319 | 1,065,411,508 | 6,518,644,496  | 3.13   | 8,560,642,000   | 6.00   | 0.372  | 7.59   |
| 2018  | Sulawesi Tengah      | 16,054,943,193 | 1,363,158,368 | 6,409,859,201  | 6.46   | 18,125,064,000  | 20.60  | 0.317  | 13.69  |
| 2018  | Sulawesi Selatan     | 32,783,836,917 | 1,986,216,686 | 14,264,154,452 | 3.50   | 12,120,993,000  | 7.04   | 0.388  | 8.87   |
| 2018  | Sulawesi Barat       | 6,751,219,553  | 472,270,192   | 2,708,093,232  | 1.80   | 3,498,175,000   | 6.26   | 0.392  | 11.32  |
| 2018  | Sulawesi Tenggara    | 16,247,776,367 | 1,411,237,132 | 6,912,704,480  | 2.55   | 11,246,729,000  | 6.40   | 0.417  | 15.83  |
| 2018  | Gorontalo            | 6,721,552,101  | 540,591,708   | 2,852,994,489  | 2.15   | 3,251,504,000   | 6.49   | 0.366  | 11.22  |
| 2018  | Maluku               | 12,825,203,104 | 964,700,076   | 6,199,705,532  | 1.20   | 1,128,148,000   | 5.91   | 0.326  | 17.85  |

| TAHUN | PROVINSI             | X1 (Rp)        | X2 (Rp)       | X3 (Rp)        | X4 (%) | Y1 (Rp)         | Y2 (%) | Y3 (%) | Y4 (%) |
|-------|----------------------|----------------|---------------|----------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|
| 2018  | Maluku Utara         | 10,250,606,098 | 785,606,677   | 4,072,260,098  | 4.12   | 7,475,586,000   | 7.86   | 0.336  | 6.62   |
| 2018  | Papua Barat          | 12,734,432,191 | 1,329,719,076 | 7,940,515,158  | 5.21   | 4,162,463,000   | 6.25   | 0.391  | 22.66  |
| 2018  | Papua                | 35,283,186,438 | 4,284,844,848 | 16,342,468,937 | 3.83   | 16,331,591,000  | 7.32   | 0.398  | 27.43  |
| 2019  | Aceh                 | 24,751,364,613 | 4,955,500,482 | 17,442,195,922 | 1.69   | 5,577,412,000   | 4.14   | 0.321  | 15.01  |
| 2019  | Sumatera Utara       | 41,065,473,825 | 4,452,049,366 | 18,949,943,768 | 2.33   | 25,187,614,000  | 5.22   | 0.315  | 8.63   |
| 2019  | Sumatera Barat       | 22,281,656,963 | 932,325,519   | 12,430,136,195 | 1.66   | 5,278,000,000   | 5.01   | 0.307  | 6.29   |
| 2019  | Riau                 | 26,589,197,769 | 1,436,685,874 | 11,359,940,687 | 2.36   | 41,110,454,000  | 2.81   | 0.331  | 6.90   |
| 2019  | Jambi                | 14,679,768,978 | 1,184,558,060 | 7,453,047,527  | 1.40   | 5,219,872,000   | 4.35   | 0.324  | 7.51   |
| 2019  | Sumatera Selatan     | 31,052,927,305 | 2,683,946,345 | 18,234,228,340 | 2.06   | 27,475,881,000  | 5.69   | 0.339  | 12.56  |
| 2019  | Bengkulu             | 10,473,426,108 | 1,079,418,707 | 4,388,847,966  | 2.91   | 7,533,228,000   | 4.94   | 0.329  | 14.91  |
| 2019  | Lampung              | 21,487,541,682 | 2,427,111,117 | 8,986,928,648  | 3.44   | 4,653,071,000   | 5.26   | 0.331  | 12.30  |
| 2019  | Kep. Bangka Belitung | 7,226,611,679  | 309,831,614   | 3,270,657,841  | 2.62   | 4,186,359,000   | 3.32   | 0.262  | 4.50   |
| 2019  | Kep. Riau            | 9,000,529,861  | 261,333,056   | 4,722,256,134  | 2.03   | 25,195,285,000  | 4.83   | 0.337  | 5.80   |
| 2019  | Jawa Barat           | 67,681,420,796 | 5,710,074,611 | 42,335,280,678 | 3.21   | 133,564,811,000 | 5.02   | 0.398  | 6.82   |
| 2019  | Jawa Tengah          | 62,949,070,312 | 7,889,431,604 | 36,785,499,403 | 2.81   | 57,680,879,000  | 5.36   | 0.358  | 10.58  |
| 2019  | DI Yogyakarta        | 9,034,776,525  | 423,785,125   | 5,216,871,098  | 2.77   | 6,508,032,000   | 6.59   | 0.428  | 11.44  |
| 2019  | Jawa Timur           | 77,450,823,194 | 7,441,561,392 | 51,257,418,090 | 2.12   | 57,867,645,000  | 5.53   | 0.364  | 10.20  |
| 2019  | Banten               | 16,360,075,504 | 1,092,073,316 | 14,641,387,741 | 3.30   | 47,481,574,000  | 5.26   | 0.361  | 4.94   |
| 2019  | Bali                 | 11,289,933,058 | 630,189,586   | 8,733,774,484  | 1.57   | 13,498,206,000  | 5.60   | 0.370  | 3.61   |
| 2019  | Nusa Tenggara Barat  | 16,334,525,056 | 1,181,329,455 | 8,309,928,110  | 1.87   | 4,231,301,000   | 3.90   | 0.374  | 13.88  |
| 2019  | Nusa Tenggara Timur  | 23,247,248,059 | 3,020,504,603 | 9,793,231,476  | 0.67   | 5,569,770,000   | 5.25   | 0.355  | 20.62  |
| 2019  | Kalimantan Barat     | 20,015,474,156 | 1,992,571,733 | 9,399,250,892  | 2.64   | 15,327,491,000  | 5.09   | 0.318  | 7.28   |

| TAHUN | PROVINSI           | X1 (Rp)        | X2 (Rp)       | X3 (Rp)        | X4 (%) | Y1 (Rp)        | Y2 (%) | Y3 (%) | Y4 (%) |
|-------|--------------------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 2019  | Kalimantan Tengah  | 17,022,696,155 | 1,347,142,545 | 7,837,956,500  | 2.70   | 12,654,738,000 | 6.12   | 0.335  | 4.81   |
| 2019  | Kalimantan Selatan | 18,775,823,716 | 1,506,337,021 | 11,137,663,181 | 4.01   | 15,405,029,000 | 4.09   | 0.334  | 4.47   |
| 2019  | Kalimantan Timur   | 23,356,146,665 | 870,119,582   | 15,219,208,089 | 1.66   | 34,290,991,000 | 4.70   | 0.335  | 5.91   |
| 2019  | Kalimantan Utara   | 6,794,629,478  | 463,268,514   | 2,856,396,407  | 1.47   | 5,571,742,000  | 6.89   | 0.292  | 6.49   |
| 2019  | Sulawesi Utara     | 13,937,639,067 | 1,210,560,814 | 6,914,639,563  | 3.52   | 11,419,585,000 | 5.65   | 0.376  | 7.51   |
| 2019  | Sulawesi Tengah    | 16,678,594,976 | 1,567,950,719 | 7,427,641,186  | 2.30   | 30,306,255,000 | 8.83   | 0.330  | 13.18  |
| 2019  | Sulawesi Selatan   | 31,727,504,627 | 2,351,148,984 | 14,675,899,472 | 2.35   | 10,009,160,000 | 6.91   | 0.391  | 8.56   |
| 2019  | Sulawesi Tenggara  | 16,857,445,009 | 1,613,817,589 | 7,989,642,979  | 3.22   | 17,981,828,000 | 6.50   | 0.393  | 11.04  |
| 2019  | Gorontalo          | 6,426,692,840  | 636,614,465   | 2,984,116,826  | 2.87   | 3,299,300,000  | 6.40   | 0.410  | 15.31  |
| 2019  | Sulawesi Barat     | 7,143,760,837  | 560,226,664   | 2,882,310,478  | 1.43   | 1,331,943,000  | 5.56   | 0.365  | 10.95  |
| 2019  | Maluku             | 12,752,234,415 | 1,122,509,201 | 4,862,646,995  | 2.08   | 756,123,000    | 5.41   | 0.320  | 17.65  |
| 2019  | Maluku Utara       | 10,639,301,032 | 891,604,070   | 4,618,801,278  | 2.24   | 15,135,513,000 | 6.25   | 0.310  | 6.91   |
| 2019  | Papua Barat        | 16,042,199,238 | 1,516,915,258 | 10,602,114,814 | 5.77   | 1,042,292,000  | 2.66   | 0.381  | 21.51  |
| 2019  | Papua              | 34,784,131,486 | 5,237,503,009 | 15,491,182,108 | 1.03   | 14,053,171,000 | -15.74 | 0.391  | 26.55  |
| 2020  | Aceh               | 21,126,762,716 | 5,050,301,259 | 15,349,132,411 | 3.59   | 8,966,720,000  | -0.37  | 0.319  | 15.43  |
| 2020  | Sumatera Utara     | 34,449,805,820 | 4,554,128,079 | 16,675,950,516 | 1.96   | 32,031,660,000 | -1.07  | 0.314  | 9.14   |
| 2020  | Sumatera Barat     | 18,329,546,074 | 961,135,402   | 10,938,519,851 | 2.11   | 4,889,820,000  | -1.62  | 0.301  | 6.56   |
| 2020  | Riau               | 20,412,037,534 | 1,470,374,050 | 9,996,747,804  | 2.42   | 49,425,500,000 | -1.13  | 0.321  | 7.04   |
| 2020  | Jambi              | 12,290,953,014 | 1,221,842,427 | 6,558,681,824  | 2.40   | 3,895,200,000  | -0.44  | 0.316  | 7.97   |
| 2020  | Sumatera Selatan   | 25,602,890,855 | 2,712,779,047 | 16,046,120,939 | 1.55   | 37,747,980,000 | -0.11  | 0.338  | 12.98  |
| 2020  | Bengkulu           | 8,707,016,615  | 1,099,512,847 | 3,862,186,210  | 0.89   | 8,129,960,000  | -0.02  | 0.323  | 15.3   |
| 2020  | Lampung            | 16,610,131,787 | 2,454,053,315 | 7,908,497,210  | 2.00   | 14,197,880,000 | -1.67  | 0.320  | 12.76  |

| TAHUN | PROVINSI             | X1 (Rp)        | X2 (Rp)       | X3 (Rp)        | X4 (%) | Y1 (Rp)         | Y2 (%) | Y3 (%) | Y4 (%) |
|-------|----------------------|----------------|---------------|----------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|
| 2020  | Kep. Bangka Belitung | 5,965,038,811  | 321,740,760   | 2,878,178,900  | 1.08   | 2,551,180,000   | -2.30  | 0.257  | 4.89   |
| 2020  | Kep. Riau            | 7,892,785,151  | 273,346,665   | 4,155,585,398  | 1.18   | 37,670,580,000  | -3.80  | 0.334  | 6.13   |
| 2020  | Jawa Barat           | 60,086,170,232 | 5,940,216,905 | 37,255,046,997 | 2.18   | 119,471,140,000 | -2.52  | 0.398  | 8.43   |
| 2020  | Jawa Tengah          | 55,232,571,119 | 8,200,608,600 | 32,371,239,475 | 1.56   | 49,969,320,000  | -2.65  | 0.359  | 11.84  |
| 2020  | DI Yogyakarta        | 7,910,440,979  | 448,690,293   | 4,590,846,566  | 1.40   | 2,821,240,000   | -2.68  | 0.437  | 12.8   |
| 2020  | Jawa Timur           | 64,342,431,184 | 7,654,234,840 | 45,106,527,919 | 0.46   | 78,032,800,000  | -2.33  | 0.364  | 11.46  |
| 2020  | Banten               | 14,490,910,624 | 1,122,813,298 | 12,884,421,212 | 1.45   | 61,584,920,000  | -3.39  | 0.365  | 6.63   |
| 2020  | Bali                 | 9,885,643,973  | 657,798,211   | 7,685,721,545  | 0.08   | 9,597,660,000   | -9.33  | 0.369  | 4.45   |
| 2020  | Nusa Tenggara Barat  | 13,186,110,083 | 1,233,354,121 | 7,312,736,737  | 0.60   | 10,872,320,000  | -0.62  | 0.386  | 14.23  |
| 2020  | Nusa Tenggara Timur  | 19,281,323,334 | 3,090,060,054 | 8,618,043,698  | 0.61   | 4,183,060,000   | -0.84  | 0.356  | 21.21  |
| 2020  | Kalimantan Barat     | 16,330,022,308 | 2,042,632,135 | 8,271,340,785  | 2.46   | 20,038,660,000  | -1.82  | 0.325  | 7.24   |
| 2020  | Kalimantan Tengah    | 14,569,765,203 | 1,403,071,877 | 6,897,401,720  | 0.71   | 6,232,020,000   | -1.41  | 0.320  | 5.26   |
| 2020  | Kalimantan Selatan   | 15,584,969,714 | 1,533,082,274 | 9,801,143,599  | 1.68   | 7,705,760,000   | -1.82  | 0.351  | 4.83   |
| 2020  | Kalimantan Timur     | 21,528,453,076 | 908,976,179   | 13,392,903,119 | 0.78   | 31,301,700,000  | -2.87  | 0.335  | 6.64   |
| 2020  | Kalimantan Utara     | 6,017,323,259  | 487,453,221   | 2,513,628,838  | 1.32   | 3,206,580,000   | -1.09  | 0.300  | 7.41   |
| 2020  | Sulawesi Utara       | 11,639,093,469 | 1,241,529,043 | 6,084,882,816  | 3.67   | 5,216,640,000   | -0.99  | 0.368  | 7.78   |
| 2020  | Sulawesi Tengah      | 14,204,299,696 | 1,610,204,714 | 6,536,324,244  | 1.62   | 30,523,200,000  | 4.86   | 0.321  | 13.06  |
| 2020  | Sulawesi Selatan     | 26,643,961,553 | 2,382,220,597 | 12,914,791,535 | 2.04   | 12,494,720,000  | -0.71  | 0.382  | 8.99   |
| 2020  | Sulawesi Barat       | 14,334,278,699 | 1,653,925,686 | 7,030,885,821  | 1.78   | 20,879,920,000  | -2.40  | 0.388  | 11.69  |
| 2020  | Sulawesi Tenggara    | 5,416,026,012  | 644,017,610   | 2,626,022,806  | 1.37   | 1,643,620,000   | -0.65  | 0.406  | 15.59  |
| 2020  | Gorontalo            | 5,980,711,787  | 574,952,086   | 2,536,433,221  | 0.81   | 2,613,300,000   | -0.02  | 0.356  | 11.5   |
| 2020  | Maluku               | 10,488,862,568 | 1,159,385,596 | 4,279,129,355  | 0.09   | 2,984,040,000   | -0.92  | 0.326  | 17.99  |

| TAHUN | PROVINSI             | X1 (Rp)        | X2 (Rp)       | X3 (Rp)        | X4 (%) | Y1 (Rp)         | Y2 (%) | Y3 (%) | Y4 (%) |
|-------|----------------------|----------------|---------------|----------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|
| 2020  | Maluku Utara         | 8,978,577,278  | 921,882,920   | 4,064,545,125  | 2.13   | 34,870,000,000  | 5.35   | 0.290  | 6.97   |
| 2020  | Papua Barat          | 14,233,848,590 | 1,560,810,537 | 9,329,861,036  | 0.79   | 2,076,020,000   | -0.76  | 0.376  | 21.7   |
| 2020  | Papua                | 28,373,771,912 | 5,408,865,352 | 13,632,240,255 | 1.30   | 10,783,640,000  | 2.39   | 0.395  | 26.8   |
| 2021  | Aceh                 | 21,126,762,715 | 4,986,622,282 | 15,349,132,411 | 0.71   | 4,158,564,700   | 2.79   | 0.323  | 15.53  |
| 2021  | Sumatera Utara       | 33,351,860,639 | 4,525,292,326 | 16,143,987,695 | 0.46   | 18,058,164,500  | 2.61   | 0.313  | 8.49   |
| 2021  | Sumatera Barat       | 19,146,156,315 | 992,597,548   | 11,426,377,836 | 1.40   | 3,426,383,700   | 3.29   | 0.300  | 6.04   |
| 2021  | Riau                 | 19,316,518,764 | 1,484,815,447 | 9,459,922,447  | 1.54   | 32,009,077,800  | 3.36   | 0.327  | 7.00   |
| 2021  | Jambi                | 12,133,783,152 | 1,222,139,342 | 6,474,730,697  | 0.48   | 2,589,184,200   | 3.66   | 0.315  | 7.67   |
| 2021  | Sumatera Selatan     | 23,592,428,167 | 2,692,090,368 | 14,786,500,445 | 1.82   | 22,334,406,900  | 3.58   | 0.340  | 12.79  |
| 2021  | Bengkulu             | 7,870,732,121  | 1,085,359,570 | 3,491,416,334  | 2.42   | 2,059,663,500   | 3.24   | 0.321  | 14.43  |
| 2021  | Lampung              | 18,862,774,621 | 2,441,161,413 | 8,980,889,432  | 2.19   | 4,665,273,200   | 2.79   | 0.314  | 11.67  |
| 2021  | Kep. Bangka Belitung | 6,326,751,296  | 334,531,471   | 3,052,596,541  | 3.75   | 2,683,217,400   | 5.05   | 0.247  | 4.67   |
| 2021  | Kep. Riau            | 7,054,949,259  | 276,396,391   | 3,714,262,229  | 2.26   | 28,916,708,700  | 3.43   | 0.339  | 5.75   |
| 2021  | Jawa Barat           | 61,533,851,770 | 5,990,622,942 | 38,152,648,617 | 1.69   | 148,616,088,500 | 3.74   | 0.406  | 7.97   |
| 2021  | Jawa Tengah          | 57,729,112,511 | 8,157,169,762 | 33,834,436,600 | 1.70   | 39,207,691,200  | 3.32   | 0.368  | 11.25  |
| 2021  | DI Yogyakarta        | 8,200,515,625  | 460,455,838   | 4,759,192,199  | 2.29   | 3,848,121,300   | 5.53   | 0.436  | 11.91  |
| 2021  | Jawa Timur           | 67,527,655,058 | 7,659,802,915 | 47,339,492,806 | 2.45   | 52,084,192,200  | 3.57   | 0.364  | 10.59  |
| 2021  | Banten               | 14,925,291,843 | 1,135,031,921 | 13,270,646,118 | 1.91   | 58,657,789,500  | 4.44   | 0.363  | 6.5    |
| 2021  | Bali                 | 10,624,660,348 | 679,123,617   | 8,260,279,368  | 2.07   | 46,156,355,200  | -2.47  | 0.375  | 4.72   |
| 2021  | Nusa Tenggara Barat  | 13,802,220,385 | 1,247,727,848 | 7,654,418,432  | 2.12   | 15,177,530,500  | 2.30   | 0.384  | 13.83  |
| 2021  | Nusa Tenggara Timur  | 20,028,539,943 | 3,059,653,902 | 8,952,022,091  | 1.67   | 4,845,942,600   | 2.51   | 0.339  | 20.44  |
| 2021  | Kalimantan Barat     | 17,583,463,650 | 2,061,328,499 | 8,906,222,985  | 1.45   | 11,376,453,400  | 4.78   | 0.315  | 6.84   |

| TAHUN | PROVINSI           | X1 (Rp)        | X2 (Rp)       | X3 (Rp)        | X4 (%) | Y1 (Rp)        | Y2 (%) | Y3 (%) | Y4 (%) |
|-------|--------------------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 2021  | Kalimantan Tengah  | 14,827,934,606 | 1,426,889,276 | 7,019,620,442  | 3.32   | 5,139,659,800  | 3.40   | 0.320  | 5.16   |
| 2021  | Kalimantan Selatan | 14,608,730,349 | 1,525,770,457 | 9,187,592,010  | 2.55   | 3,762,643,900  | 3.48   | 0.325  | 4.56   |
| 2021  | Kalimantan Timur   | 16,892,821,465 | 939,074,018   | 10,509,411,077 | 2.15   | 16,689,737,400 | 2.48   | 0.331  | 6.27   |
| 2021  | Kalimantan Utara   | 6,003,291,392  | 503,042,462   | 2,507,847,492  | 2.73   | 2,666,292,500  | 3.98   | 0.285  | 6.83   |
| 2021  | Sulawesi Utara     | 12,055,762,067 | 1,227,039,030 | 6,302,715,897  | 2.51   | 4,080,300,000  | 4.16   | 0.359  | 7.36   |
| 2021  | Sulawesi Tengah    | 14,214,164,452 | 1,597,596,005 | 6,540,863,661  | 2.20   | 40,999,832,300 | 11.70  | 0.326  | 12.18  |
| 2021  | Sulawesi Selatan   | 28,081,526,213 | 2,372,807,818 | 13,611,604,127 | 2.40   | 7,921,475,400  | 4.65   | 0.377  | 8.53   |
| 2021  | Sulawesi Barat     | 6,000,987,185  | 576,443,184   | 2,943,128,805  | 4.39   | 467,575,300    | 2.56   | 0.394  | 11.74  |
| 2021  | Sulawesi Tenggara  | 15,037,072,358 | 1,636,862,682 | 7,290,898,319  | 3.05   | 24,023,634,200 | 4.10   | 0.409  | 15.41  |
| 2021  | Gorontalo          | 5,617,909,200  | 639,158,141   | 2,382,471,724  | 2.59   | 1,577,204,300  | 2.41   | 0.366  | 11.85  |
| 2021  | Maluku             | 11,565,350,234 | 1,158,272,522 | 4,718,302,806  | 4.01   | 617,799,700    | 3.04   | 0.316  | 16.3   |
| 2021  | Maluku Utara       | 9,446,248,088  | 919,556,082   | 4,276,256,742  | 2.38   | 41,152,845,300 | 16.40  | 0.278  | 6.38   |
| 2021  | Papua Barat        | 2,327,237,155  | 1,551,501,373 | 1,525,432,279  | 3.47   | 1,200,535,600  | -0.51  | 0.374  | 21.82  |
| 2021  | Papua              | 30,587,810,366 | 5,434,063,548 | 14,695,979,832 | 1.79   | 22,495,130,800 | 15.11  | 0.396  | 27.38  |

Lampiran 12 *Reduced Form*

$$Y_1 = f(X_1, X_2, X_3, X_4) \quad (4.1)$$

$$Y_2 = f(Y_1, X_1, X_2, X_3, X_4)$$

$$Y_3 = f(Y_1, Y_2, X_1, X_2, X_3, X_4)$$

$$Y_4 = f(Y_1, Y_2, Y_3, X_1, X_2, X_3, X_4)$$

Berdasarkan model fungsional di atas (4.1) bentuk persamaan regresi model persamaan yang dikembangkan adalah:

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \alpha_4 X_4 + \epsilon_1 \quad (4.2)$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_4 Y_1 + \beta_5 Y_1 + \epsilon_2$$

$$Y_3 = \gamma_0 + \gamma_1 X_1 + \gamma_2 X_2 + \gamma_3 X_3 + \gamma_4 X_4 + \gamma_5 Y_1 + \gamma_6 Y_2 + \epsilon_3$$

$$Y_4 = \delta_0 + \delta_1 X_1 + \delta_2 X_2 + \delta_3 X_3 + \delta_4 X_4 + \delta_5 Y_1 + \delta_6 Y_2 + \delta_7 Y_3 + \epsilon_4$$

Persamaan 4.2 dapat dibentuk sebagai berikut :

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \alpha_4 X_4 + \epsilon_1 \quad (4.3)$$

$$Y_2 = (\beta_0 + \beta_5 \alpha_0) + (\beta_1 + \beta_5 \alpha_1) X_1 + (\beta_2 + \beta_5 \alpha_2) X_2 + (\beta_3 + \beta_5 \alpha_3) X_3 + (\beta_4 + \beta_5 \alpha_4) X_4 + (\beta_5 \epsilon_1) \epsilon_2 \quad (4.4)$$

$$Y_3 = (\gamma_0 + \gamma_5 \alpha_0 + \gamma_6 \beta_0 + \gamma_6 \beta_5 \alpha_0) + (\gamma_1 + \gamma_5 \alpha_1 + \gamma_5 \beta_1 + \gamma_6 \beta_5 \alpha_1) X_1 + (\gamma_2 + \gamma_5 \alpha_2 + \gamma_5 \beta_2 + \gamma_6 \beta_5 \alpha_2) X_2 + (\gamma_3 + \gamma_5 \alpha_3 + \gamma_5 \beta_3 + \gamma_6 \beta_5 \alpha_3) X_3 + (\gamma_4 + \gamma_5 \alpha_4 + \gamma_5 \beta_4 + \gamma_6 \beta_5 \alpha_4) X_4 + (\gamma_1 + \gamma_5 \alpha_4 + \gamma_6 \beta_5) \epsilon_1 + \gamma_6 \epsilon_2 + \epsilon_3 \quad (4.5)$$

$$Y_4 = (\delta_0 + \delta_5 \alpha_0 + \delta_6 \beta_0 + \delta_7 \gamma_0 + \delta_6 \beta_5 \alpha_0 + \delta_7 \gamma_5 \alpha_0 + \delta_7 \gamma_6 \beta_0 + \delta_7 \gamma_6 \beta_5 \alpha_0) + (\delta_1 + \delta_5 \alpha_1 + \delta_6 \beta_1 + \delta_7 \gamma_1 + \delta_6 \beta_5 \alpha_1 + \delta_7 \gamma_5 \alpha_1 + \delta_7 \gamma_6 \beta_1 + \delta_7 \gamma_6 \beta_5 \alpha_1) X_1 + (\delta_2 + \delta_5 \alpha_2 + \delta_6 \beta_2 + \delta_7 \gamma_2 + \delta_6 \beta_5 \alpha_2 + \delta_7 \gamma_5 \alpha_2 + \delta_7 \gamma_6 \beta_2 + \delta_7 \gamma_6 \beta_5 \alpha_2) X_2 + (\delta_3 + \delta_5 \alpha_3 + \delta_6 \beta_3 + \delta_7 \gamma_3 + \delta_6 \beta_5 \alpha_3 + \delta_7 \gamma_5 \alpha_3 + \delta_7 \gamma_6 \beta_3 + \delta_7 \gamma_6 \beta_5 \alpha_3) X_3 + (\delta_4 + \delta_5 \alpha_4 + \delta_6 \beta_4 + \delta_7 \gamma_4 + \delta_6 \beta_5 \alpha_4 + \delta_7 \gamma_5 \alpha_4 + \delta_7 \gamma_6 \beta_4 + \delta_7 \gamma_6 \beta_5 \alpha_4) X_4 + (\delta_1 + \delta_5 \alpha_1 + \delta_7 \gamma_6 \beta_5) \epsilon_1 + \delta_6 \epsilon_2 + \delta_7 \epsilon_3 + \epsilon_4 \quad (4.6)$$

Berdasarkan hasil *reduce form* di atas, maka di dapat model *stochastic* untuk masing-masing :

### a. Model Investasi.

Untuk melakukan pengujian hipotesis pengaruh masing-masing dana perimbangan, dana desa, anggaran infrastruktur dan inflasi terhadap investasi, maka digunakan persamaan (4.3) :

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \alpha_4 X_4 + \epsilon_1$$

Dimana :

#### **Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)**

$\alpha_0$  = Konstanta investasi

$\alpha_1$  = Pengaruh langsung dana perimbangan ( $X_1$ ) terhadap investasi ( $Y_1$ )

$\alpha_2$  = Pengaruh langsung dana desa ( $X_2$ ) terhadap investasi ( $Y_1$ )

$\alpha_3$  = Pengaruh langsung anggaran infrastruktur ( $X_3$ ) terhadap investasi ( $Y_1$ )

$\alpha_4$  = Pengaruh langsung inflasi ( $X_4$ ) terhadap investasi ( $Y_1$ )

### b. Model Pertumbuhan Ekonomi.

Untuk melakukan pengujian hipotesis pengaruh masing-masing dana perimbangan, dana desa, anggaran infrastruktur, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, maka digunakan persamaan (4.4) :

$$Y_2 = (\beta_0 + \beta_5 \alpha_0) + (\beta_1 + \beta_5 \alpha_1) X_1 + (\beta_2 + \beta_5 \alpha_2) X_2 + (\beta_3 + \beta_5 \alpha_3) X_3 + (\beta_4 + \beta_5 \alpha_4) X_4 + (\beta_5 \epsilon_1) + \epsilon_2$$

Dimana :

#### **Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)**

$\beta_0$  = Konstanta pertumbuhan ekonomi

$\beta_1$  = Pengaruh langsung dana perimbangan ( $X_1$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ )

$\beta_2$  = Pengaruh langsung dana desa ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ )



$\beta_3 =$  Pengaruh langsung anggaran infrastruktur ( $X_3$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ )

$\beta_4 =$  Pengaruh langsung inflasi ( $X_4$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ )

**Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)**

$\beta_5\alpha_1 =$  Pengaruh tidak langsung dana perimbangan ( $X_1$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ).

$\beta_5\alpha_2 =$  Pengaruh tidak langsung dana desa ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ).

$\beta_5\alpha_3 =$  Pengaruh tidak langsung anggaran infrastruktur ( $X_3$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ).

$\beta_5\alpha_4 =$  Pengaruh tidak langsung inflasi ( $X_4$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ).

**Total pengaruh (*Total Effect*)**

$\beta_1 + \beta_4\alpha_1 =$  Total pengaruh dana perimbangan ( $X_1$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ).

$\beta_2 + \beta_4\alpha_2 =$  Total pengaruh dana desa ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ).

$\beta_3 + \beta_4\alpha_3 =$  Total pengaruh anggaran infrastruktur ( $X_3$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ).

$\beta_4 + \beta_4\alpha_4 =$  Total pengaruh inflasi ( $X_4$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ).

**c. Model Ketimpangan Pendapatan.**

Untuk melakukan pengujian hipotesis pengaruh masing-masing dana perimbangan, dana desa, anggaran infrastruktur, dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan, maka digunakan persamaan (4.5):

$$\begin{aligned}
Y_3 = & (\gamma_0 + \gamma_5 \alpha_0 + \gamma_6 \beta_0 + \gamma_6 \beta_5 \alpha_0) + (\gamma_1 + \gamma_5 \alpha_1 + \gamma_5 \beta_1 + \gamma_6 \beta_5 \alpha_1) X_1 \\
& (\gamma_2 + \gamma_5 \alpha_2 + \gamma_5 \beta_2 + \gamma_6 \beta_5 \alpha_2) X_2 + (\gamma_3 + \gamma_5 \alpha_3 + \gamma_5 \beta_3 + \gamma_6 \beta_5 \alpha_3) X_3 + \\
& (\gamma_4 + \gamma_5 \alpha_4 + \gamma_5 \beta_4 + \gamma_6 \beta_5 \alpha_4) X_4 + (\gamma_1 + \gamma_5 \alpha_4 + \gamma_6 \beta_5) \epsilon_1 + \gamma_6 \epsilon_2 + \epsilon_3
\end{aligned}$$

Dimana :

### **Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)**

$\gamma_0$  = Konstanta Ketimpangan Pendapatan

$\gamma_1$  = Pengaruh langsung dana perimbangan ( $X_1$ ) terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).

$\gamma_2$  = Pengaruh langsung dana desa ( $X_2$ ) terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).

$\gamma_3$  = Pengaruh langsung anggaran infrastruktur ( $X_3$ ) terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).

$\gamma_4$  = Pengaruh langsung inflasi ( $X_4$ ) terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).

### **Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)**

$\gamma_5 \alpha_1$  = Pengaruh tidak langsung dana perimbangan ( $X_1$ ) terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ).

$\gamma_6 \beta_1$  = Pengaruh tidak langsung dana perimbangan ( $X_1$ ) terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ) melalui pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ).

$\gamma_6 \beta_5 \alpha_1$  = Pengaruh tidak langsung dana perimbangan ( $X_1$ ) terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ) dan pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ).

$\gamma_5 \alpha_2$  = Pengaruh tidak langsung dana desa ( $X_2$ ) terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ).

$\gamma_6 \beta_2$  = Pengaruh tidak langsung dana desa ( $X_2$ ) terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ) melalui pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ).

$\gamma_6\beta_5\alpha_2 =$  Pengaruh tidak langsung dana desa ( $X_2$ ) terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ) dan pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ).

$\gamma_5\alpha_3 =$  Pengaruh tidak langsung anggaran infrastruktur ( $X_3$ ) terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ).

$\gamma_6\beta_3 =$  Pengaruh tidak langsung anggaran infrastruktur ( $X_3$ ) terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ) melalui pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ).

$\gamma_6\beta_5\alpha_3 =$  Pengaruh tidak langsung anggaran infrastruktur ( $X_3$ ) terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ) dan pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ).

$\gamma_5\alpha_4 =$  Pengaruh tidak langsung inflasi ( $X_4$ ) terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ).

$\gamma_6\beta_4 =$  Pengaruh tidak langsung inflasi ( $X_4$ ) terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ) melalui pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ).

$\gamma_6\beta_5\alpha_4 =$  Pengaruh tidak langsung inflasi ( $X_4$ ) terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ) dan pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ).

#### **Total pengaruh (*Total Effect*)**

$\gamma_1 + \gamma_5\alpha_1 + \gamma_6(\beta_1 + \beta_5\alpha_1) =$  total pengaruh dana perimbangan ( $X_1$ ) terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).

$\gamma_2 + \gamma_5\alpha_2 + \gamma_6(\beta_2 + \beta_5\alpha_2) =$  total pengaruh dana desa ( $X_2$ ) terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).

$\gamma_3 + \gamma_5\alpha_3 + \gamma_6(\beta_3 + \beta_5\alpha_3) =$  total pengaruh anggaran infrastruktur ( $X_3$ ) terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).

$\gamma_4 + \gamma_5\alpha_4 + \gamma_6(\beta_4 + \beta_5\alpha_4) =$  total pengaruh inflasi ( $X_4$ ) terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).

#### d. Model Tingkat Kemiskinan

Untuk melakukan pengujian hipotesis pengaruh masing-masing dana perimbangan, dana desa, anggaran infrastruktur, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan, maka digunakan persamaan (4.6):

$$\begin{aligned}
 Y_4 = & (\delta_0 + \delta_5 \alpha_0 + \delta_6 \beta_0 + \delta_7 \gamma_0 + \delta_6 \beta_5 \alpha_0 + \delta_7 \gamma_5 \alpha_0 + \delta_7 \gamma_6 \beta_0 + \delta_7 \gamma_6 \beta_5 \alpha_0) + \\
 & (\delta_1 + \delta_5 \alpha_1 + \delta_6 \beta_1 + \delta_7 \gamma_1 + \delta_6 \beta_5 \alpha_1 + \delta_7 \gamma_5 \alpha_1 + \delta_7 \gamma_6 \beta_1 + \delta_7 \gamma_6 \beta_5 \alpha_1) X_1 + \\
 & (\delta_2 + \delta_5 \alpha_2 + \delta_6 \beta_2 + \delta_7 \gamma_2 + \delta_6 \beta_5 \alpha_2 + \delta_7 \gamma_5 \alpha_2 + \delta_7 \gamma_6 \beta_2 + \delta_7 \gamma_6 \beta_5 \alpha_2) X_2 + \\
 & (\delta_3 + \delta_5 \alpha_3 + \delta_6 \beta_3 + \delta_7 \gamma_3 + \delta_6 \beta_5 \alpha_3 + \delta_7 \gamma_5 \alpha_3 + \delta_7 \gamma_6 \beta_3 + \delta_7 \gamma_6 \beta_5 \alpha_3) X_3 + \\
 & (\delta_4 + \delta_5 \alpha_4 + \delta_6 \beta_4 + \delta_7 \gamma_4 + \delta_6 \beta_5 \alpha_4 + \delta_7 \gamma_5 \alpha_4 + \delta_7 \gamma_6 \beta_4 + \delta_7 \gamma_6 \beta_5 \alpha_4) X_4 + \\
 & (\delta_1 + \delta_5 \alpha_1 + \delta_7 \gamma_6 \beta_5) \epsilon_1 + \delta_6 \epsilon_2 + \delta_7 \epsilon_3 + \epsilon_4
 \end{aligned}$$

Dimana :

##### **Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)**

$\delta_0$  = Konstanta Tingkat Kemiskinan

$\delta_1$  = Pengaruh langsung dana perimbangan ( $X_1$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ).

$\delta_2$  = Pengaruh langsung dana desa ( $X_2$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ).

$\delta_3$  = Pengaruh langsung anggaran infrastruktur ( $X_3$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ).

$\delta_4$  = Pengaruh langsung inflasi ( $X_4$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ).

##### **Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)**

$\delta_5 \alpha_1$  = Pengaruh tidak langsung dana perimbangan ( $X_1$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ).

$\delta_6 \beta_1$  = Pengaruh tidak langsung dana perimbangan ( $X_1$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ).

$\delta_7 \gamma_1$  = Pengaruh tidak langsung dana perimbangan ( $X_1$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).

- $\delta_6\beta_5\alpha_1 =$  Pengaruh tidak langsung dana perimbangan ( $X_1$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ) dan pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ).
- $\delta_7\gamma_5\alpha_1 =$  Pengaruh tidak langsung dana perimbangan ( $X_1$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ) dan ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).
- $\delta_7\gamma_6\beta_1 =$  Pengaruh tidak langsung dana perimbangan ( $X_1$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) dan ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).
- $\delta_7\gamma_6\beta_5\alpha_1 =$  Pengaruh tidak langsung dana perimbangan ( $X_1$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ) pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).
- $\delta_5\alpha_2 =$  Pengaruh tidak langsung dana desa ( $X_2$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ).
- $\delta_6\beta_2 =$  Pengaruh tidak langsung dana desa ( $X_2$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ).
- $\delta_7\gamma_2 =$  Pengaruh tidak langsung dana desa ( $X_2$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).
- $\delta_6\beta_5\alpha_2 =$  Pengaruh tidak langsung dana desa ( $X_2$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ) dan pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ).
- $\delta_7\gamma_5\alpha_2 =$  Pengaruh tidak langsung dana desa ( $X_2$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ) dan ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).

- $\delta_7\gamma_6\beta_2 =$  Pengaruh tidak langsung dana desa ( $X_2$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) dan ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).
- $\delta_7\gamma_6\beta_5\alpha_2 =$  Pengaruh tidak langsung dana desa ( $X_2$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ) pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) dan ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).
- $\delta_5\alpha_3 =$  Pengaruh tidak langsung anggaran infrastruktur ( $X_3$ ) tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ).
- $\delta_6\beta_3 =$  Pengaruh tidak langsung anggaran infrastruktur ( $X_3$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ).
- $\delta_7\gamma_3 =$  Pengaruh tidak langsung anggaran infrastruktur ( $X_3$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).
- $\delta_6\beta_5\alpha_3 =$  Pengaruh tidak langsung anggaran infrastruktur ( $X_3$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ) dan pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ).
- $\delta_7\gamma_5\alpha_3 =$  Pengaruh tidak langsung anggaran infrastruktur ( $X_3$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ) dan ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).
- $\delta_7\gamma_6\beta_3 =$  Pengaruh tidak langsung anggaran infrastruktur ( $X_3$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) dan ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).
- $\delta_7\gamma_6\beta_5\alpha_3 =$  Pengaruh tidak langsung anggaran infrastruktur ( $X_3$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ) pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) dan ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).
- $\delta_5\alpha_4 =$  Pengaruh tidak langsung inflasi ( $X_4$ ) tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ).

$\delta_6\beta_4 =$  Pengaruh tidak langsung inflasi ( $X_4$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ).

$\delta_7\gamma_4 =$  Pengaruh tidak langsung inflasi ( $X_4$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).

$\delta_6\beta_5\alpha_4 =$  Pengaruh tidak langsung inflasi ( $X_4$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ) dan pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ).

$\delta_7\gamma_5\alpha_4 =$  Pengaruh tidak langsung inflasi ( $X_4$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ) dan ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).

$\delta_7\gamma_5\beta_4 =$  Pengaruh tidak langsung inflasi ( $X_4$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) dan ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).

$\delta_7\gamma_6\beta_5\alpha_4 =$  Pengaruh tidak langsung inflasi ( $X_4$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ) melalui investasi ( $Y_1$ ) pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) dan ketimpangan pendapatan ( $Y_3$ ).

#### **Total pengaruh (*Total Effect*)**

$\delta_1 + \delta_7\gamma_5\alpha_1 + \delta_7(\beta_1 + \gamma_6\beta_5\alpha_1) =$  total pengaruh dana perimbangan ( $X_1$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ).

$\delta_2 + \delta_7\gamma_5\alpha_2 + \delta_7(\beta_2 + \gamma_6\beta_5\alpha_2) =$  total pengaruh dana desa ( $X_2$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ).

$\delta_3 + \delta_7\gamma_5\alpha_3 + \delta_7(\beta_3 + \gamma_6\beta_5\alpha_3) =$  total pengaruh anggaran infrastruktur ( $X_3$ ) tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ).

$\delta_4 + \delta_7\gamma_5\alpha_4 + \delta_7(\beta_3 + \gamma_6\beta_5\alpha_4) =$  total pengaruh inflasi ( $X_4$ ) tingkat kemiskinan ( $Y_4$ ).

Lampiran 13 Pengujian Variabel

Path Model 1 (Non Lag)

**Dirrect Effect**

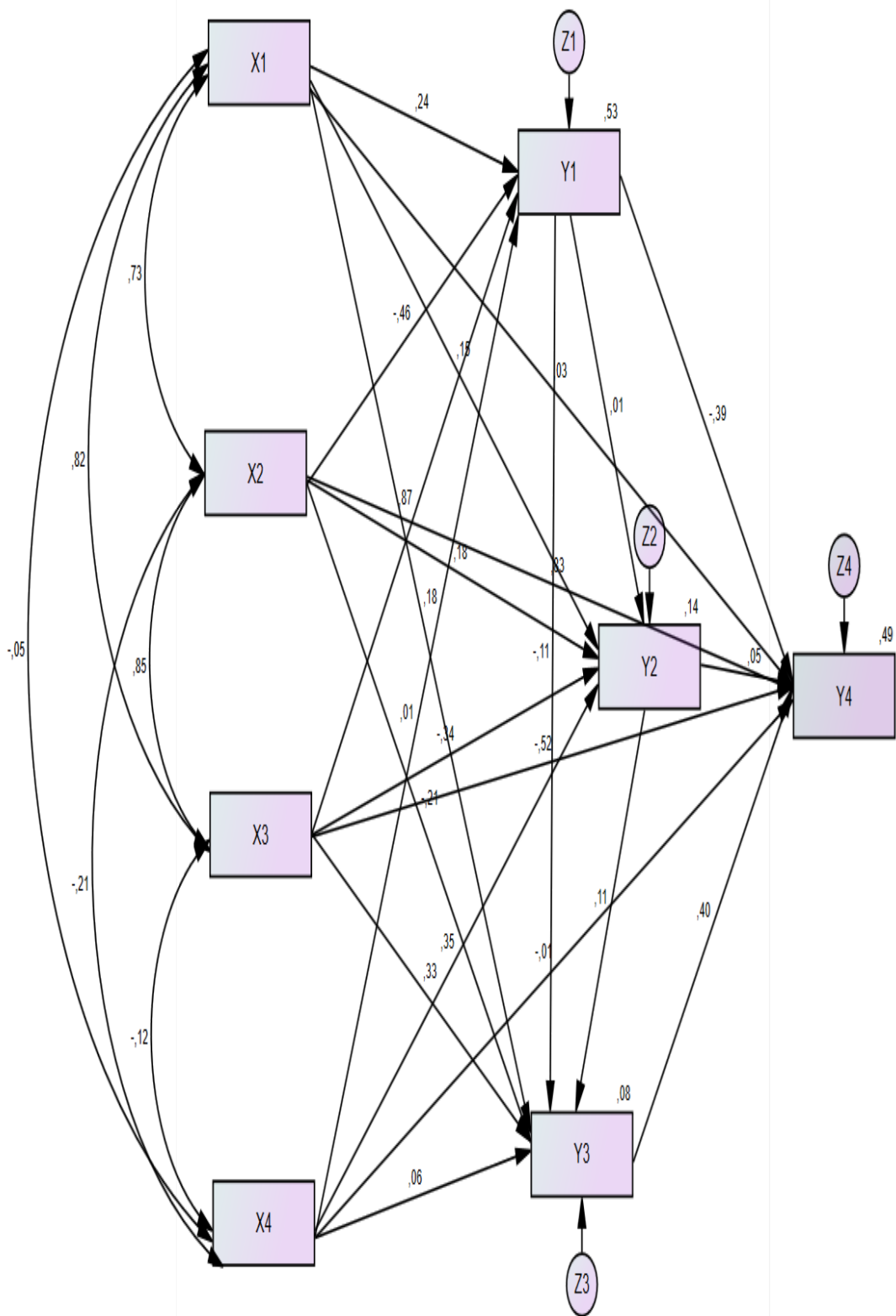
| Path Coefficient |     |    | Estimate | S.E.      | C.R.      | P 1 tail | P 2 tail | Sig.           |
|------------------|-----|----|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------------|
| X1               | --> | Y1 | 0.241    | 4587.000  | 2926.000  | 0.0030   | 0.0015   | Sig. level 1%  |
| X2               | --> | Y1 | -0.458   | 0.123     | -4981.000 | ***      | ***      | Sig. level 1%  |
| X3               | --> | Y1 | 0.869    | 0.180     | 8094.000  | ***      | ***      | Sig. level 1%  |
| X4               | --> | Y1 | 0.008    | 0.048     | 0.158     | 0.8740   | 0.4370   | Not Sig.       |
| X1               | --> | Y2 | 0.152    | 15130.000 | 1349.000  | 0.1770   | 0.0885   | Sig. level 10% |
| X2               | --> | Y2 | 0.182    | 0.419     | 1398.000  | 0.1620   | 0.0810   | Sig. level 10% |
| X3               | --> | Y2 | -0.345   | 0.662     | -2094.000 | 0.0360   | 0.0180   | Sig. level 5%  |
| X4               | --> | Y2 | 0.349    | 0.156     | 5393.000  | ***      | ***      | Sig. level 1%  |
| Y1               | --> | Y2 | 0.007    | 0.218     | 0.075     | 0.9400   | 0.4700   | Not Sig.       |
| X1               | --> | Y3 | 0.176    | 0.193     | 1502.000  | 0.1330   | 0.0665   | Sig. level 10% |
| X2               | --> | Y3 | -0.209   | 0.005     | -1545.000 | 0.1220   | 0.0610   | Sig. level 10% |
| X3               | --> | Y3 | 0.327    | 0.008     | 1904.000  | 0.0570   | 0.0285   | Sig. level 5%  |
| X4               | --> | Y3 | 0.056    | 0.002     | 0.788     | 0.4300   | 0.2150   | Not Sig.       |
| Y2               | --> | Y3 | 0.108    | 0.001     | 1556.000  | 0.1200   | 0.0600   | Sig. level 10% |
| Y1               | --> | Y3 | -0.114   | 0.003     | -1214.000 | 0.2250   | 0.1125   | Not Sig.       |
| Y3               | --> | Y4 | 0.400    | 7329.000  | 7976.000  | ***      | ***      | Sig. level 1%  |
| Y1               | --> | Y4 | -0.389   | 0.303     | -5552.000 | ***      | ***      | Sig. level 1%  |
| X1               | --> | Y4 | 0.033    | 21.154    | 0.380     | 0.7040   | 0.3520   | Not Sig.       |
| X2               | --> | Y4 | 0.830    | 0.586     | 8161.000  | ***      | ***      | Sig. level 1%  |
| X3               | --> | Y4 | -0.521   | 0.933     | -4029.000 | ***      | ***      | Sig. level 1%  |
| Y2               | --> | Y4 | 0.049    | 0.094     | 0.946     | 0.3440   | 0.1720   | Not Sig.       |
| X4               | --> | Y4 | -0.011   | 0.230     | -0.204    | 0.8380   | 0.4190   | Not Sig.       |



## Indirrect Effect - Mediation Test

| Hipotesis | Jalur                   | Hasil         |        |       | Dirrect Effect | Indirrect Effect | Total Effect | VAF     | Sig. Indirrect Effect   | Kesimpulan Uji Hipotesis |
|-----------|-------------------------|---------------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|---------|-------------------------|--------------------------|
|           |                         | a             | b      | c     |                |                  |              |         |                         |                          |
| <b>1A</b> | <b>X1 --&gt; Y4</b>     | <b>0.033</b>  | -      | -     | <b>0.033</b>   |                  |              |         | <b>Tidak signifikan</b> | Tidak terbukti           |
| 1B        | X1 --> Y1 --> Y4        | 0.241         | -0.389 | -     | 0.033          | -0.094           | -0.061       | 154.322 | Full Mediasi            | Terbukti                 |
| 1C        | X1 --> Y2--> Y4         | 0.152         | 0.049  | -     | 0.033          | 0.007            | 0.040        | 18.414  | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| 1D        | X1 --> Y3--> Y4         | 0.176         | 0.400  | -     | 0.033          | 0.070            | 0.103        | 68.085  | Mediasi Parsial         | Terbukti                 |
| 1E        | X1 --> Y1 --> Y2 --> Y4 | 0.241         | 0.007  | 0.049 | 0.033          | 0.000            | 0.033        | 0.250   | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| 1F        | X1 --> Y1 --> Y3 --> Y4 | 0.241         | -0.114 | 0.400 | 0.033          | -0.011           | 0.022        | -49.929 | Mediasi Parsial         | Terbukti                 |
| 1G        | X1 --> Y2 --> Y3 --> Y4 | 0.152         | 0.108  | 0.400 | 0.033          | 0.007            | 0.040        | 16.596  | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
|           |                         |               |        |       |                |                  |              |         |                         |                          |
| Hipotesis | Jalur                   | Hasil         |        |       | Dirrect Effect | Indirrect Effect | Total Effect | VAF     | Sig. Indirrect Effect   | Kesimpulan Uji Hipotesis |
|           |                         | a             | b      | c     |                |                  |              |         |                         |                          |
| <b>2A</b> | <b>X2 --&gt; Y4</b>     | <b>0.830</b>  | -      | -     | <b>0.830</b>   |                  |              |         | <b>Sig. Level 1%</b>    | Terbukti                 |
| <b>2B</b> | X2 --> Y1 --> Y4        | -0.458        | -0.389 | -     | 0.830          | 0.178            | 1.008        | 17.672  | Tidak Memediasi         | Terbukti                 |
| 2C        | X2 --> Y2--> Y4         | 0.182         | 0.049  | -     | 0.830          | 0.009            | 0.839        | 1.063   | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| 2D        | X2 --> Y3--> Y4         | -0.209        | 0.400  | -     | 0.830          | -0.084           | 0.746        | -11.200 | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| 2E        | X2 --> Y1 --> Y2 --> Y4 | -0.458        | 0.007  | 0.049 | 0.830          | 0.000            | 0.830        | -0.019  | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| 2F        | X2 --> Y1 --> Y3 --> Y4 | -0.458        | -0.114 | 0.400 | 0.830          | 0.021            | 0.851        | 2.454   | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| 2G        | X2 --> Y2 --> Y3 --> Y4 | 0.182         | 0.108  | 0.400 | 0.830          | 0.008            | 0.838        | 0.938   | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
|           |                         |               |        |       |                |                  |              |         |                         |                          |
| Hipotesis | Jalur                   | Hasil         |        |       | Dirrect Effect | Indirrect Effect | Total Effect | VAF     | Sig. Indirrect Effect   | Kesimpulan Uji Hipotesis |
|           |                         | a             | b      | c     |                |                  |              |         |                         |                          |
| <b>3A</b> | <b>X3 --&gt; Y4</b>     | <b>-0.521</b> | -      | -     | <b>-0.521</b>  |                  |              |         | <b>Sig. Level 1%</b>    | Terbukti                 |

|           |                         |               |          |          |                |                  |              |         |                         |                          |
|-----------|-------------------------|---------------|----------|----------|----------------|------------------|--------------|---------|-------------------------|--------------------------|
| 3B        | X3 --> Y1 --> Y4        | 0.869         | -0.389   | -        | -0.521         | -0.338           | -0.859       | 39.351  | Mediasi Parsial         | Terbukti                 |
| 3C        | X3 --> Y2--> Y4         | -0.345        | 0.049    | -        | -0.521         | -0.017           | -0.538       | 3.143   | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| 3D        | X3 --> Y3--> Y4         | 0.327         | 0.400    | -        | -0.521         | 0.131            | -0.390       | -33.521 | Mediasi Parsial         | Terbukti                 |
| 3E        | X3 --> Y1 --> Y2 --> Y4 | 0.869         | 0.007    | 0.049    | -0.521         | 0.000            | -0.521       | -0.057  | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| 3F        | X3 --> Y1 --> Y3 --> Y4 | 0.869         | -0.114   | 0.400    | -0.521         | -0.040           | -0.561       | 7.068   | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| 3G        | X3 --> Y2 --> Y3 --> Y4 | -0.345        | 0.108    | 0.400    | -0.521         | -0.015           | -0.536       | 2.781   | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
|           |                         |               |          |          |                |                  |              |         |                         |                          |
| Hipotesis | Jalur                   | Hasil         |          |          | Dirrect Effect | Indirrect Effect | Total Effect | VAF     | Sig. Indirrect Effect   | Kesimpulan Uji Hipotesis |
|           |                         | a             | b        | c        |                |                  |              |         |                         |                          |
| <b>4A</b> | <b>X4 --&gt; Y4</b>     | <b>-0.011</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-0.011</b>  |                  |              |         | <b>Tidak Signifikan</b> | Tidak terbukti           |
| 4B        | X4 --> Y1 --> Y4        | 0.008         | -0.389   | -        | -0.011         | -0.003           | -0.014       | 22.052  | Mediasi Parsial         | Terbukti                 |
| 4C        | X4 --> Y2--> Y4         | 0.349         | 0.049    | -        | -0.011         | 0.017            | 0.006        | 280.298 | Full Medias             | Terbukti                 |
| 4D        | X4 --> Y3--> Y4         | 0.056         | 0.400    | -        | -0.011         | 0.022            | 0.011        | 196.491 | Full Medias             | Terbukti                 |
| 4E        | X4 --> Y1 --> Y2 --> Y4 | 0.008         | 0.007    | 0.049    | -0.011         | 0.000            | -0.011       | -0.025  | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| 4F        | X4 --> Y1 --> Y3 --> Y4 | 0.008         | -0.114   | 0.400    | -0.011         | 0.000            | -0.011       | 3.210   | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| 4G        | X4 --> Y2 --> Y3 --> Y4 | 0.349         | 0.108    | 0.400    | -0.011         | 0.015            | 0.004        | 369.819 | Full Mediasi            | Terbukti                 |



| Criteria        | Rule of Thumb       |
|-----------------|---------------------|
| VAF < 20%       | No mediation effect |
| 20% ≤ VAF ≤ 80% | Partial mediation   |
| VAF > 80%       | Full mediation      |

Source: Solihin & Ratmono (2013)

Path Model 2 (lag 1)

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

|    |      |         | Estimate | S.E.   | C.R.   | P    | Label  |
|----|------|---------|----------|--------|--------|------|--------|
| Y1 | <--- | X1_lag1 | 12,332   | 6,206  | 1,987  | ,047 | par_1  |
| Y1 | <--- | X2_lag2 | -,485    | ,139   | -3,496 | ***  | par_2  |
| Y1 | <--- | X3_lag3 | 1,314    | ,221   | 5,941  | ***  | par_3  |
| Y1 | <--- | X4      | -,046    | ,050   | -,927  | ,354 | par_4  |
| Y2 | <--- | X1_lag1 | 15,626   | 20,286 | ,770   | ,441 | par_14 |
| Y2 | <--- | X2_lag2 | ,715     | ,463   | 1,545  | ,122 | par_15 |
| Y2 | <--- | X3_lag3 | -1,182   | ,779   | -1,518 | ,129 | par_16 |
| Y2 | <--- | X4      | ,923     | ,163   | 5,680  | ***  | par_17 |
| Y2 | <--- | Y1      | -,177    | ,233   | -,761  | ,446 | par_19 |
| Y3 | <--- | X1_lag1 | ,124     | ,244   | ,511   | ,610 | par_5  |
| Y3 | <--- | X2_lag2 | -,008    | ,006   | -1,436 | ,151 | par_6  |
| Y3 | <--- | X3_lag3 | ,024     | ,009   | 2,565  | ,010 | par_7  |
| Y3 | <--- | X4      | ,000     | ,002   | ,105   | ,916 | par_8  |
| Y3 | <--- | Y2      | ,002     | ,001   | 1,963  | ,050 | par_20 |
| Y3 | <--- | Y1      | -,005    | ,003   | -1,819 | ,069 | par_28 |
| Y4 | <--- | Y3      | 57,486   | 7,739  | 7,429  | ***  | par_9  |
| Y4 | <--- | Y1      | -1,807   | ,303   | -5,954 | ***  | par_10 |
| Y4 | <--- | X1_lag1 | -34,597  | 26,220 | -1,319 | ,187 | par_11 |
| Y4 | <--- | X2_lag2 | 5,754    | ,604   | 9,524  | ***  | par_12 |
| Y4 | <--- | X3_lag3 | -3,064   | 1,027  | -2,983 | ,003 | par_13 |
| Y4 | <--- | Y2      | ,051     | ,094   | ,546   | ,585 | par_18 |
| Y4 | <--- | X4      | -,154    | ,226   | -,681  | ,496 | par_27 |

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

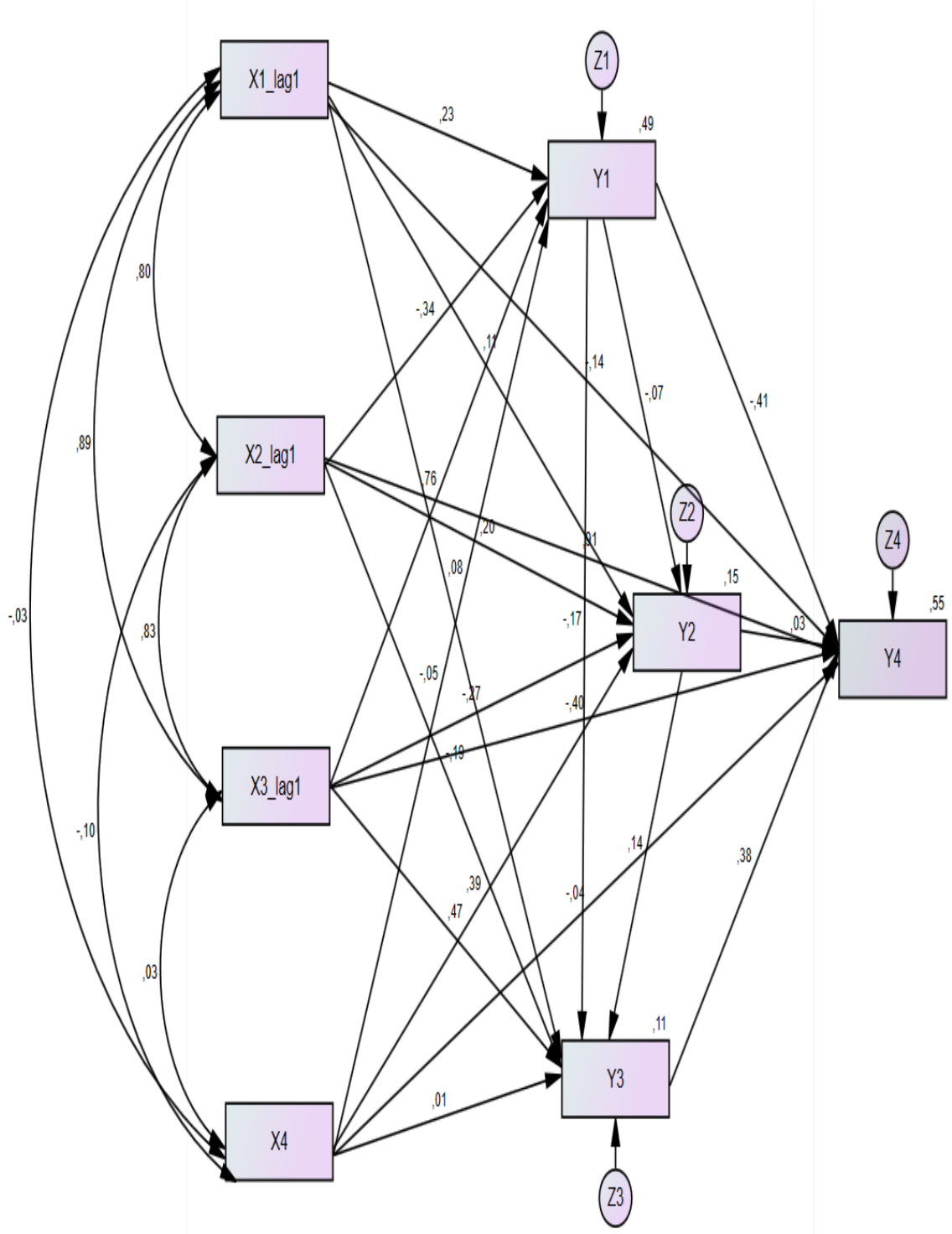
|    |      |         | Estimate |
|----|------|---------|----------|
| Y1 | <--- | X1_lag1 | ,227     |
| Y1 | <--- | X2_lag2 | -,342    |
| Y1 | <--- | X3_lag3 | ,757     |
| Y1 | <--- | X4      | -,049    |
| Y2 | <--- | X1_lag1 | ,115     |
| Y2 | <--- | X2_lag2 | ,201     |
| Y2 | <--- | X3_lag3 | -,271    |
| Y2 | <--- | X4      | ,389     |
| Y2 | <--- | Y1      | -,071    |
| Y3 | <--- | X1_lag1 | ,078     |
| Y3 | <--- | X2_lag2 | -,192    |
| Y3 | <--- | X3_lag3 | ,471     |
| Y3 | <--- | X4      | ,008     |
| Y3 | <--- | Y2      | ,145     |
| Y3 | <--- | Y1      | -,173    |
| Y4 | <--- | Y3      | ,380     |
| Y4 | <--- | Y1      | -,405    |
| Y4 | <--- | X1_lag1 | -,143    |
| Y4 | <--- | X2_lag2 | ,911     |
| Y4 | <--- | X3_lag3 | -,396    |
| Y4 | <--- | Y2      | ,029     |
| Y4 | <--- | X4      | -,037    |

| Hipotesis | Jalur                   | Hasil         |        |       | Dirrect Effect | Indirrect Effect | Total Effect | VAF       | Sig. Indirrect Effect   | Kesimpulan Uji Hipotesis |
|-----------|-------------------------|---------------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|-----------|-------------------------|--------------------------|
|           |                         | a             | b      | c     |                |                  |              |           |                         |                          |
| <b>1A</b> | <b>X1 --&gt; Y4</b>     | <b>-0.143</b> | -      | -     | <b>-0.143</b>  |                  |              |           | <b>Sig. level 5%</b>    | Terbukti                 |
| 1B        | X1 --> Y1 --> Y4        | 0.241         | -0.405 | -     | -0.143         | -0.098           | -0.241       | 40.566    | Mediasi Parsial         | Terbukti                 |
| 1C        | X1 --> Y2--> Y4         | 0.152         | 0.029  | -     | -0.143         | 0.004            | -0.139       | -3.181    | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| 1D        | X1 --> Y3--> Y4         | 0.176         | 0.380  | -     | -0.143         | 0.067            | -0.076       | -87.861   | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| 1E        | X1 --> Y1 --> Y2 --> Y4 | 0.241         | -0.071 | 0.029 | -0.143         | 0.000            | -0.143       | 0.346     | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| 1F        | X1 --> Y1 --> Y3 --> Y4 | 0.241         | -0.173 | 0.380 | -0.143         | -0.016           | -0.159       | 9.974     | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| 1G        | X1 --> Y2 --> Y3 --> Y4 | 0.152         | 0.145  | 0.380 | -0.143         | 0.008            | -0.135       | -6.221    | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| Hipotesis | Jalur                   | Hasil         |        |       | Dirrect Effect | Indirrect Effect | Total Effect | VAF       | Sig. Indirrect Effect   | Kesimpulan Uji Hipotesis |
|           |                         | a             | b      | c     |                |                  |              |           |                         |                          |
| <b>2A</b> | <b>X2 --&gt; Y4</b>     | <b>0.830</b>  | -      | -     | <b>0.830</b>   |                  |              |           | <b>Sig. Level 1%</b>    | Terbukti                 |
| <b>2B</b> | X2 --> Y1 --> Y4        | -0.342        | -0.405 | -     | 0.830          | 0.139            | 0.969        | 14.301    | Tidak Memediasi         | Terbukti                 |
| 2C        | X2 --> Y2--> Y4         | 0.201         | 0.029  | -     | 0.830          | -0.006           | 0.824        | -0.675    | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| 2D        | X2 --> Y3--> Y4         | -0.192        | 0.380  | -     | 0.830          | -0.130           | 0.700        | -18.565   | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| 2E        | X2 --> Y1 --> Y2 --> Y4 | -0.342        | -0.071 | 0.029 | 0.830          | 0.001            | 0.831        | 0.085     | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| 2F        | X2 --> Y1 --> Y3 --> Y4 | -0.342        | -0.173 | 0.380 | 0.830          | 0.022            | 0.852        | 2.637     | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| 2G        | X2 --> Y2 --> Y3 --> Y4 | 0.201         | 0.145  | 0.380 | 0.830          | 0.011            | 0.841        | 1.317     | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| Hipotesis | Jalur                   | Hasil         |        |       | Dirrect Effect | Indirrect Effect | Total Effect | VAF       | Sig. Indirrect Effect   | Kesimpulan Uji Hipotesis |
|           |                         | a             | b      | c     |                |                  |              |           |                         |                          |
| <b>3A</b> | <b>X3 --&gt; Y4</b>     | <b>-0.521</b> | -      | -     | <b>-0.521</b>  |                  |              |           | <b>Sig. Level 1%</b>    | Terbukti                 |
| 3B        | X3 --> Y1 --> Y4        | 0.757         | -0.405 | -     | -0.521         | -0.307           | -0.828       | 37.046    | Mediasi Parsial         | Terbukti                 |
| 3C        | X3 --> Y2--> Y4         | -0.271        | 0.029  | -     | -0.521         | -0.008           | -0.529       | 1.486     | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| 3D        | X3 --> Y3--> Y4         | 0.471         | 0.380  | -     | -0.521         | 0.179            | -0.342       | -52.330   | Mediasi Parsial         | Terbukti                 |
| 3E        | X3 --> Y1 --> Y2 --> Y4 | 0.757         | -0.071 | 0.029 | -0.521         | -0.002           | -0.523       | 0.298     | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| 3F        | X3 --> Y1 --> Y3 --> Y4 | 0.757         | -0.173 | 0.380 | -0.521         | -0.050           | -0.571       | 8.719     | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| 3G        | X3 --> Y2 --> Y3 --> Y4 | -0.271        | 0.145  | 0.380 | -0.521         | -0.015           | -0.536       | 2.786     | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |
| Hipotesis | Jalur                   | Hasil         |        |       | Dirrect Effect | Indirrect Effect | Total Effect | VAF       | Sig. Indirrect Effect   | Kesimpulan Uji Hipotesis |
|           |                         | a             | b      | c     |                |                  |              |           |                         |                          |
| <b>4A</b> | <b>X4 --&gt; Y4</b>     | <b>-0.011</b> | -      | -     | <b>-0.011</b>  |                  |              |           | <b>Tidak Signifikan</b> | Tidak terbukti           |
| 4B        | X4 --> Y1 --> Y4        | 0.008         | -0.405 | -     | -0.011         | -0.003           | -0.014       | 22.753    | Mediasi Parsial         | Terbukti                 |
| 4C        | X4 --> Y2--> Y4         | 0.349         | 0.029  | -     | -0.011         | 0.010            | -0.001       | -1151.422 | Full Mediasi            | Terbukti                 |
| 4D        | X4 --> Y3--> Y4         | 0.056         | 0.380  | -     | -0.011         | 0.021            | 0.010        | 207.004   | Full Mediasi            | Terbukti                 |
| 4E        | X4 --> Y1 --> Y2 --> Y4 | 0.008         | -0.071 | 0.029 | -0.011         | 0.000            | -0.011       | 0.150     | Tidak Memediasi         | Tidak terbukti           |

|           |                         |        |        |       |                |                  |              |         |                       |                          |
|-----------|-------------------------|--------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------------------|
| 4F        | X4 --> Y1 --> Y3 --> Y4 | 0.008  | -0.173 | 0.380 | -0.011         | -0.001           | -0.012       | 4.563   | Tidak Memediasi       | Tidak terbukti           |
| 4G        | X4 --> Y2 --> Y3 --> Y4 | 0.349  | 0.145  | 0.380 | -0.011         | 0.019            | 0.008        | 233.659 | Full Mediasi          | Terbukti                 |
| Hipotesis | Jalur                   | Hasil  |        |       | Dirrect Effect | Indirrect Effect | Total Effect | VAF     | Sig. Indirrect Effect | Kesimpulan Uji Hipotesis |
|           |                         | a      | b      | c     |                |                  |              |         |                       |                          |
| 5A        | Y1 --> Y4               | 0.389  | -      | -     | 0.389          |                  |              |         | Sig. level 1%         | Terbukti                 |
| 5B        | Y1 --> Y2 --> Y4        | 0.007  | 0.049  | -     | 0.389          | 0.000343         | 0.389        | 0.088   | Tidak Memediasi       | Tidak terbukti           |
| 5C        | Y1 --> Y3 --> Y4        | -0.114 | 0.400  | -     | 0.389          | -0.0456          | 0.343        | -13.279 | Tidak Memediasi       | Tidak terbukti           |
| 5D        | Y1 --> Y2 --> Y3 --> Y4 | 0.007  | 0.108  | 0.400 | 0.389          | 0.000302         | 0.389        | 0.078   | Tidak Memediasi       | Tidak terbukti           |
| Hipotesis | Jalur                   | Hasil  |        |       | Dirrect Effect | Indirrect Effect | Total Effect | VAF     | Sig. Indirrect Effect | Kesimpulan Uji Hipotesis |
|           |                         | a      | b      | c     |                |                  |              |         |                       |                          |
| 6A        | Y2 --> Y4               | 0.049  | -      | -     | 0.389          |                  |              |         | Tidak Signifikan      | Tidak terbukti           |
| 6B        | Y2 --> Y3 --> Y4        | 0.108  | 0.400  | -     | 0.389          | 0.0432           | 0.432        | 9.995   | Tidak Memediasi       | Tidak terbukti           |
| Hipotesis | Jalur                   | Hasil  |        |       | Dirrect Effect | Indirrect Effect | Total Effect | VAF     | Sig. Indirrect Effect | Kesimpulan Uji Hipotesis |
|           |                         | a      | b      | c     |                |                  |              |         |                       |                          |
| 7A        | Y3 --> Y4               | 0.400  | -      | -     | 0.389          |                  |              |         | Sig. level 1%         | Terbukti                 |

| <b>Criteria</b> | <b>Rule of Thumb</b> |
|-----------------|----------------------|
| VAF < 20%       | No mediation effect  |
| 20% ≤ VAF ≤ 80% | Partial mediation    |
| VAF > 80%       | Full mediation       |

Source: Solihin & Ratmono (2013)



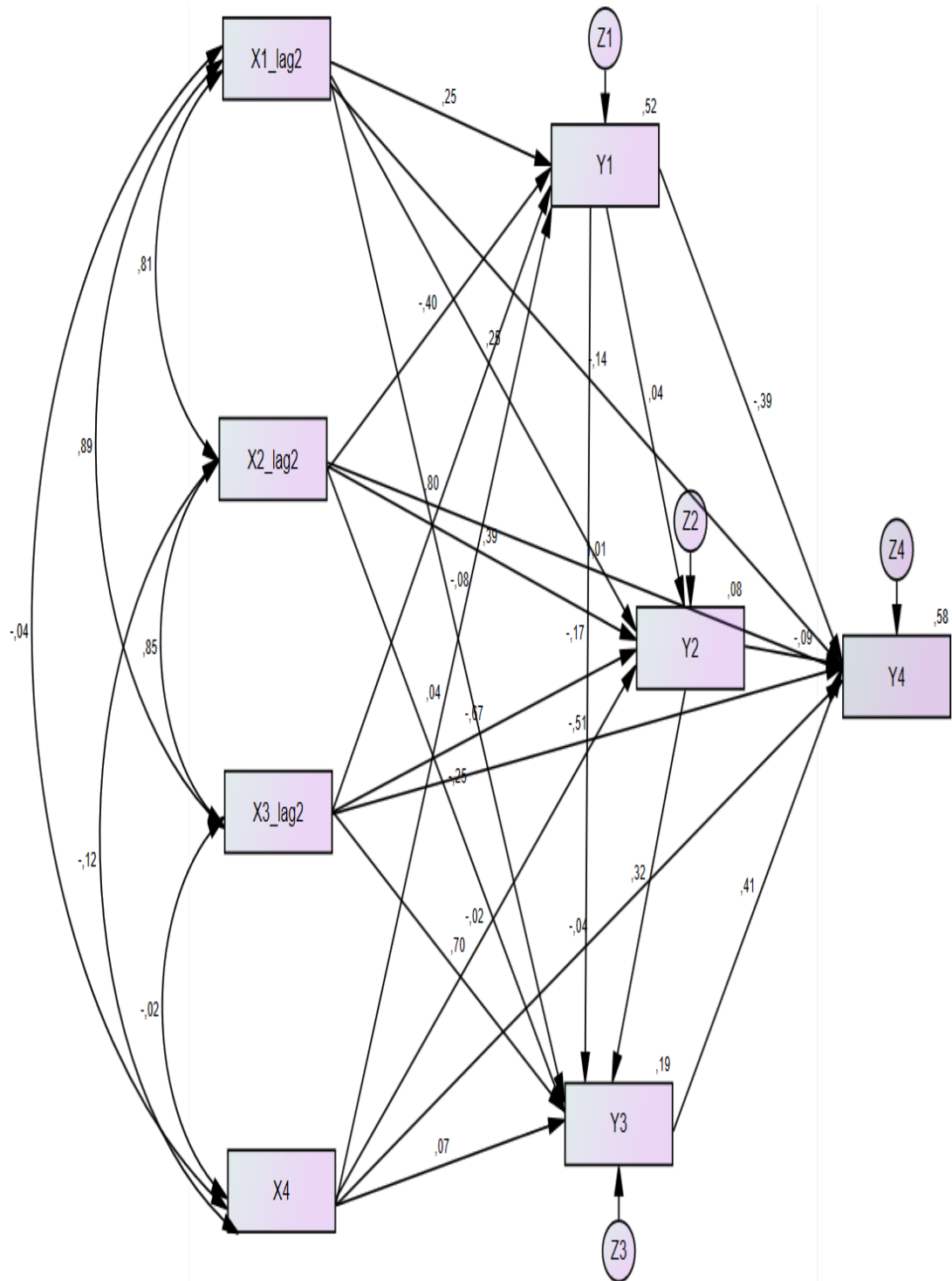


## Path Model 3 (Lag 2)

| Regression Weights: (Group number 1 - Default model) |      |         |          |        |        |      |        |
|--|------|---------|----------|--------|--------|------|--------|
|  |      |         | Estimate | S.E.   | C.R.   | P    | Label  |
| Y1   | <--- | X1_lag2 | 13,810   | 6,782  | 2,036  | ,042 | par_1  |
| Y1   | <--- | X2_lag2 | -,570    | ,156   | -3,650 | ***  | par_2  |
| Y1   | <--- | X3_lag2 | 1,380    | ,238   | 5,805  | ***  | par_3  |
| Y1   | <--- | X4      | ,037     | ,058   | ,638   | ,523 | par_4  |
| Y2   | <--- | X1_lag2 | 17,338   | 11,911 | 1,456  | ,145 | par_14 |
| Y2   | <--- | X2_lag2 | ,704     | ,282   | 2,499  | ,012 | par_15 |
| Y2   | <--- | X3_lag2 | -1,444   | ,454   | -3,180 | ,001 | par_16 |
| Y2   | <--- | X4      | -,020    | ,101   | -,202  | ,840 | par_17 |
| Y2   | <--- | Y1      | ,050     | ,138   | ,364   | ,716 | par_19 |
| Y3   | <--- | X1_lag2 | -,122    | ,259   | -,472  | ,637 | par_5  |
| Y3   | <--- | X2_lag2 | -,010    | ,006   | -1,682 | ,093 | par_6  |
| Y3   | <--- | X3_lag2 | ,035     | ,010   | 3,451  | ***  | par_7  |
| Y3   | <--- | X4      | ,002     | ,002   | ,942   | ,346 | par_8  |
| Y3   | <--- | Y2      | ,007     | ,002   | 4,358  | ***  | par_20 |
| Y3   | <--- | Y1      | -,005    | ,003   | -1,648 | ,099 | par_28 |
| Y4   | <--- | Y3      | 62,761   | 8,862  | 7,082  | ***  | par_9  |
| Y4   | <--- | Y1      | -1,754   | ,335   | -5,234 | ***  | par_10 |
| Y4   | <--- | X1_lag2 | -35,657  | 28,900 | -1,234 | ,217 | par_11 |
| Y4   | <--- | X2_lag2 | 6,474    | ,698   | 9,276  | ***  | par_12 |
| Y4   | <--- | X3_lag2 | -3,952   | 1,170  | -3,379 | ***  | par_13 |
| Y4   | <--- | Y2      | -,313    | ,203   | -1,544 | ,122 | par_18 |
| Y4   | <--- | X4      | -,193    | ,245   | -,789  | ,430 | par_27 |

| Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) |      |         |          |
|---|------|---------|----------|
|   |      |         | Estimate |
| Y1  | <--- | X1_lag2 | ,250     |
| Y1  | <--- | X2_lag2 | -,397    |
| Y1  | <--- | X3_lag2 | ,798     |
| Y1  | <--- | X4      | ,036     |
| Y2  | <--- | X1_lag2 | ,250     |
| Y2  | <--- | X2_lag2 | ,392     |
| Y2  | <--- | X3_lag2 | -,666    |
| Y2  | <--- | X4      | -,016    |
| Y2  | <--- | Y1      | ,040     |
| Y3  | <--- | X1_lag2 | -,076    |
| Y3  | <--- | X2_lag2 | -,251    |
| Y3  | <--- | X3_lag2 | ,698     |
| Y3  | <--- | X4      | ,069     |
| Y3  | <--- | Y2      | ,325     |
| Y3  | <--- | Y1      | -,170    |
| Y4  | <--- | Y3      | ,406     |
| Y4  | <--- | Y1      | -,392    |
| Y4  | <--- | X1_lag2 | -,144    |
| Y4  | <--- | X2_lag2 | 1,009    |
| Y4  | <--- | X3_lag2 | -,511    |
| Y4  | <--- | Y2      | -,088    |
| Y4  | <--- | X4      | -,042    |

| Regression Weights: (Group number 1 - Default model) |      |         |          |        |        |                |                |                 |
|--|------|---------|----------|--------|--------|----------------|----------------|-----------------|
|  |      |         | Estimate | S.E.   | C.R.   | P value 2 tail | P value 1 tail | Sig.            |
| Y1   | <--- | X1_lag2 | 0.25     | 6,782  | 2,036  | 0.042          | 0.021          | Sig. level 5%   |
| Y1   | <--- | X2_lag2 | -0.397   | 0.156  | -3,650 | ***            | ***            | Sig. level 1%   |
| Y1   | <--- | X3_lag2 | 0.798    | 0.238  | 5,805  | ***            | ***            | Sig. level 1%   |
| Y2   | <--- | X1_lag2 | 0.25     | 11,911 | 1,456  | 0.145          | 0.0725         | Sig. level 10%  |
| Y2   | <--- | X2_lag2 | 0.392    | 0.282  | 2,499  | 0.012          | 0.006          | Sig. level 1%   |
| Y2   | <--- | X3_lag2 | -0.666   | 0.454  | -3,180 | 0.001          | 0.0005         | Sig. level 1%   |
| Y3   | <--- | X1_lag2 | -0.076   | 0.259  | -0.472 | 0.637          | 0.3185         | <b>Not Sig.</b> |
| Y3   | <--- | X2_lag2 | -0.251   | 0.006  | -1,682 | 0.093          | 0.0465         | Sig. level 5%   |
| Y3   | <--- | X3_lag2 | 0.698    | 0.01   | 3,451  | ***            | ***            | Sig. level 1%   |
| Y4   | <--- | X1_lag2 | -0.144   | 28,900 | -1,234 | 0.217          | 0.1085         | <b>Not Sig.</b> |
| Y4   | <--- | X2_lag2 | 1,009    | 0.698  | 9,276  | ***            | ***            | Sig. level 1%   |
| Y4   | <--- | X3_lag2 | -0.511   | 1,170  | -3,379 | ***            | ***            | Sig. level 1%   |



Lampiran 14 Penelitian Terdahulu

| No | Judul, Nama dan Tahun Penelitian   | Tujuan Penelitian  | Variabel Penelitian dan model Analisis                     | Hasil Penelitian |  |
|----|--|--|--|------------------|--|
| 1  | Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Barat   | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat.  | Variabel: Pengeluaran Pemerintah, Kemiskinan               | 1                | Pengeluaran pemerintah kabupaten, secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, tetapi secara tidak langsung, tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat.   |
|    | Rahmah Amalia et al. (2015)  |  | Data sekunder: pengeluaran pemerintah, kemiskinan          | 2                | Pengeluaran pemerintah provinsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat.  |
|    | Jurnal Analisis  |  | Metode: metode SEM ( <i>Structural Equation Modeling</i> ) | 3                | Pengaruh pengeluaran pemerintah pusat terhadap kemiskinan, secara langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Sedangkan secara tidak langsung, berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat.   |
| 2  | Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur terhadap tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur | Variabel: Pengeluaran anggaran; tingkat pengangguran       | 1                | Peningkatan Pengeluaran Pemerintah bidang infrastruktur berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap peningkatan Kemiskinan melalui peningkatan Pengangguran Terbuka di Kalimantan Timur Artinya belum ada dampak yang tinggi dalam hal menurunkan angka kemiskinan melalui penurunan angka pengangguran karena masih terjadinya ketimpangan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur.   |
|    | Mardiana et al. (2017)   |  | Data sekunder 2006-2015                                    | 2                | Peningkatan Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penurunan Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur. Dapat disimpulkan anggaran infrastruktur meningkat dan kemiskinan menurun. Artinya ada dampak dalam hal menurunkan angka kemiskinan namun masih rendah karena masih terjadi ketimpangan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur. |

| No | Judul, Nama dan Tahun Penelitian  | Tujuan Penelitian   | Variabel Penelitian dan model Analisis   | Hasil Penelitian |   |
|----|---|---|--|------------------|---|
|    | Jurnal  |   | Metode: analisis jalur ( <i>path analisis</i> )  | 3                | Peningkatan Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kenaikan Pengangguran Terbuka di Kalimantan Timur. Dapat disimpulkan jika anggaran infrastruktur naik maka pengangguran akan turun. Artinya Pengeluaran Pemerintah bidang infrastruktur sudah memberikan dampak secara langsung, namun masih rendah dalam penurunan pengangguran di Kalimantan Timur karena masih minimnya pembangunan infrastruktur. Karena pembangunan infrastruktur masih fokus dikota-kota besar. |
| 3  | Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali           | Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.   | Variabel: pengeluaran pemerintah, investasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan.  | 1                | Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan  |
|    | Nengah Rai Narka Suda Pratama (2019)  |   | Metode: analisis jalur   | 2                | Investasi memiliki pengaruh langsung positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan   |
|    | Jurnal Ekonomi dan Bisnis   |   |  | 3                | Pengeluaran pemerintah dan investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.   |
| 4  | Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ketimpangan Wilayah dan Indeks Pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur | Untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung belanja infrastruktur, belanja pendidikan, belanja kesehatan, dana bagi hasil, dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi, ketimpangan wilayah, dan indeks pembangunan manusia. | Variabel: desentralisasi fiskal, belanja infrastruktur, belanja pendidikan, belanja kesehatan, dana bagi hasil, DAU, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan wilayah, indeks pembangunan manusia. | 1                | Belanja infrastruktur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah., negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia   |
|    | Diana Lestari (2012)  |   | Data: Kab/kota di Prov. Kaltim tahun 2006-2011   | 2                | Belanja pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah, positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.  |

| No | Judul, Nama dan Tahun Penelitian   | Tujuan Penelitian  | Variabel Penelitian dan model Analisis  | Hasil Penelitian  |  |
|----|--|--|---|---|--|
|    | Disertasi  |  | Metode: SEM   | 3   | Belanja kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah, positif dan tidak signifikan indeks pembangunan manusia dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah, negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. |
|    |  |  |   | 4   | Dana alokasi umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah, negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia   |
|    |  |  |   | 5   | Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah, negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia  |
|    |  |  |   | 6   | Ketimpangan wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.  |
| 5  | <p>Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran</p> <p>Anis Setiyawati (2006)</p> <p>Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia</p> | <p>Untuk menguji secara langsung pengaruh penerimaan asli daerah, alokasi dana umum, alokasi dana khusus, dan belanja modal pada pertumbuhan ekonomi; untuk menguji secara langsung pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran; dan untuk menguji secara tidak langsung pengaruh pendapatan asli daerah, alokasi dana umum, alokasi dana khusus, dan belanja modal untuk penanggulangan</p> | <p>Variabel: pendapatan asli daerah, alokasi dana umum, alokasi dana khusus, biaya pembangunan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran</p> <p>Data: laporan APBD Jatim dan realisasinya Tahun 2001-2005</p> <p>Metode: statistik deskriptif dan regresi linear</p> | Bahwa pendapatan asli daerah dan alokasi dana umum berpengaruh langsung signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung signifikan pada kemiskinan, dan pengangguran, pendapatan asli daerah dan alokasi dana umum secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan pengangguran. |  |

| No | Judul, Nama dan Tahun Penelitian   | Tujuan Penelitian  | Variabel Penelitian dan model Analisis                                  | Hasil Penelitian  |
|----|--|--|---|---|
|    |  | kemiskinan/pengangguran.   |   |   |
| 6  | Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Propinsi Sumut) | Untuk menganalisis dampak penerapan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan daerah disparitas di 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara                    | Variabel: Desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan       | 1   Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan secara statistik signifikan sebesar 365,1798 terhadap perekonomian daerah pertumbuhan di 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.  |
|    | Y. Simonsen Sianturi (2009)  |  | Data: 19 kab/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2004-2008            | 2   Untuk disparitas daerah, desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan jumlah yang signifikan secara statistik 284,3040 untuk perbedaan antara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.   |
|    | Tesis  |  | Metode: OLS dan PLS   | 3   Desentralisasi fiskal membuat pertumbuhan ekonomi 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, meningkat setiap tahun, tetapi grafik pertumbuhan ekonomi meningkat setiap tahun sehingga semakin terjadi disparitas wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara  |
| 7  | Peran Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali  | Penelitian ini menganalisis kemiskinan sebagai fungsi dari dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), jumlah penduduk, pendidikan, dan kesehatan. | Variabel: Dana Perimbangan, Populasi, Kesehatan, Pendidikan, Kemiskinan | Penelitian ini menemukan bahwa Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali, barangkali dikarenakan desain DAK memang bukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Jumlah Penduduk di Provinsi Bali tidak berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali, dikarenakan peningkatan proporsi penduduk produktif sebagai akibat dari arus migrasi yang masuk ke Bali dengan tujuan mencari pekerjaan. Tingkat Pendidikan dan tingkat kesehatan berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali. |
|    | Arie Ismail, Abdul Hakim (2012)  |  | Data: 9 Kab/kota di Provinsi Bali, Tahun 2006-2011                      |   |
|    | Jurnal Aplikasi Bisnis   |  | Metode: <i>pooled</i> OLS, <i>fixed effect</i> dan <i>random effect</i> |   |

| No | Judul, Nama dan Tahun Penelitian  | Tujuan Penelitian  | Variabel Penelitian dan model Analisis   | Hasil Penelitian |   |
|----|---|--|--|------------------|---|
| 8  | Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota Di Indonesia                           | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan di tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia.                                   | Variabel: Dana Desa, Kemiskinan  | 1                | Variabel alokasi dana desa memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin berdasarkan nilai dari koefisien regresi yang bernilai negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika Alokasi Dana Desa naik maka jumlah penduduk miskin akan menurun. |
|    | Tri Angga Sigit, 2020   |  | Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan <i>Fixed Effect Model</i> .  | 2                | Terdapat tiga aspek dari kebijakan Dana Desa yang perlu diperbaiki yaitu meliputi penyempurnaan aspek formulasi, aspek penguatan pengawasan, dan aspek peningkatan inovasi dalam penggunaan Dana Desa   |
|    | Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik   |  | Data kualitatif berupa wawancara mendalam pada DJPK dan Badan Kebijakan Fiskal   |                  |   |
| 9  | Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali | Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. | Variabel: dana desa; tingkat kemiskinan; kesejahteraan masyarakat  | 1                | Dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya bahwa semakin tinggi dana desa maka semakin turun tingkat kemiskinan.   |
|    | Kalpika Sunu (2019)   |  | Metode: statistik deskriptif dan <i>path analysis</i>  | 2                | Dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya bahwa semakin tinggi dana desa maka akan semakin tinggi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut   |
|    | Jurnal Ekonomi  |  | Data dana desa diperoleh dari Dinas PMD Provinsi Bali, sedangkan tingkat kemiskinan dan IPM diperoleh dari BPS Provinsi Bali pada tahun 2015-2017. | 3                | Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat artinya semakin tinggi tingkat kemiskinan maka semakin menurun kesejahteraan masyarakat.  |



| No   | Judul, Nama dan Tahun Penelitian   | Tujuan Penelitian   | Variabel Penelitian dan model Analisis  | Hasil Penelitian  |
|--|--|---|---|---|
| 10   | Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Di Provinsi Sumatera Utara   | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Kemiskinan di Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota. | Variabel: Alokasi Dana Desa, Kemiskinan   | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif secara signifikan. Kesimpulan hasil penelitian atas alokasi dana desa ini adalah merupakan salah satu pendapatan desa yang memiliki pengaruh dalam mengentaskan kemiskinan di pemerintah desa. |
|  | Ratna Sari Dewi, 2018  |   | Data: 81 Pemerintah Desa di Prov. Sumut tahun 2014-2016   |   |
|  | Jurnal Akuntansi dan Bisnis  |   | Metode <i>purposive sampling</i>  |   |
| 11   | Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Infrastruktur, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia | Untuk mengetahui pengaruh dari Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Infrastruktur dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat      | Variabel: Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Infrastruktur, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM). | 1 Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Bitung akan tetapi tidak signifikan secara statistik.  |
|  | Bitu Lailatul Yasinta (2018)   |   | Data: 14 Kab/kota Prov. Kalbar Tahun 2008-2017  | 2 Bahwa variabel belanja pendidikan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap variabel IPM  |
|  | Skripsi  |   | Metode: analisis regresi data panel   | 3 Variabel belanja kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap variabel IPM   |
|  |  |   |   | 4 Variabel belanja infrastruktur berpengaruh tidak signifikan namun memiliki arah positif terhadap variabel IPM   |
|  |  |   |   | 5 Variabel kemiskinan berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel IPM  |
| 12   | Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  | Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh infrastruktur ekonomi, infrastruktur pendidikan, dan infrastruktur kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi                     | Variabel: Infrastruktur Fisik, Kemiskinan   | 1 Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003 - 2018.   |
| Sodik Dwi Purnomo, Minadi Wijaya, Heri Setiawan (2019) | Data: 5 kab/kota di Prov. Yogyakarta tahun 2003-2018   | 2 Infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003 - 2018.                          |   |   |

| No | Judul, Nama dan Tahun Penelitian   | Tujuan Penelitian   | Variabel Penelitian dan model Analisis  | Hasil Penelitian  |
|----|--|---|---|---|
|    | <i>Research Paper</i>  | Daerah istimewa Yogyakarta.   | Metode: regresi linear berganda dengan aplikasi <i>eviews</i>   |   |
| 13 | Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah) | Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah atas pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan pada 35 Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah. | Variabel: Tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur.        | Pengeluaran pemerintah sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan pengeluaran sektor infrastruktur berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan.   |
|    | Mohamad Erhan Wibowo (2014)  |   | Data: 35 Kab/kota di Prov. Jawa Tengah, Tahun 2007-2012   |   |
|    | Skripsi  |   | Metode: regresi linear berganda (PLSRA)   |   |
| 14 | Kinerja Keuangan Daerah, Infrastruktur, dan Kemiskinan: Analisis Kabupaten/Kota di Indonesia 2006–2009   | Untuk mengetahui apakah kinerja pengelolaan keuangan daerah cukup efektif dalam penyediaan infrastruktur dasar dan apakah penyediaan infrastruktur dasar secara efektif mengurangi angka kemiskinan.      | Variabel: Kinerja Keuangan Daerah, Infrastruktur Listrik, Infrastruktur Air Bersih, Infrastruktur Jalan, Kemiskinan | Dengan menggunakan metode data panel, studi ini mengonfirmasi hubungan positif antara kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan penyediaan infrastruktur dasar (khususnya jalan dan listrik, namun tidak berlaku untuk air bersih). Adapun hubungan antara penyediaan infrastruktur dasar dengan angka kemiskinan, sesuai harapan, ternyata negatif. Temuan ini memperkuat keyakinan perlunya mendorong lebih kuat lagi pembangunan infrastruktur dasar untuk mengurangi angka kemiskinan. |
|    | Diyah Nugraheni dan D.S. Priyarsono (2010)   |   | Data sekunde 200 kab/kota di Indonesia, Tahun 2006-2009   |   |
|    | Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia   |   | Metode: time series   |   |

| No | Judul, Nama dan Tahun Penelitian  | Tujuan Penelitian   | Variabel Penelitian dan model Analisis  | Hasil Penelitian |  |
|----|---|---|---|------------------|--|
| 15 | Ketimpangan wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.                                 | Untuk mengetahui hubungan kebijakan pemerintah (inklusi keuangan, suku bunga, dan inflasi) terhadap kemiskinan di Indonesia melalui investasi, permintaan uang, dan pertumbuhan ekonomi.  | Variabel: keuangan inklusif, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan                                      | 1                | Bahwa inklusi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan secara tidak langsung melalui investasi, permintaan uang, dan pertumbuhan ekonomi  |
|    | Anas Iswanto Anwar (2014)   |   | Data: 34 Provinsi di Indonesia, Tahun 2005-2013   | 2                | Bahwa inklusi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan secara tidak langsung melalui investasi, permintaan uang, dan pertumbuhan ekonomi  |
|    | Disertasi   |   | Metode: SEM   | 3                | Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, baik langsung maupun tidak langsung, melalui investasi, permintaan uang, dan pertumbuhan ekonomi   |
| 16 | Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan secara langsung, selanjutnya menganalisis pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana pengaruh estimasi pertumbuhan ekonomi hasil analisis variabel investasi dan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. | Variabel: Investasi asing langsung (FDI), investasi pemerintah, tenaga kerja, PDB, dan Kemiskinan | 1                | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDB) terhadap tingkat kemiskinan secara langsung sangat kecil namun hubungannya negatif dan signifikan. FDI, investasi pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.   |
|    | Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur (2011)   |   | Data: Data time series, Tahun 1980-2010   | 2                | Pengaruh estimasi pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan juga tidak begitu besar namun hubungannya negatif dan signifikan. Untuk itu pemerintah hendaknya tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja akan tetapi lebih daripada itu pertumbuhan ekonomi harus berkualitas dan berkeadilan yaitu pertumbuhan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat |
|    | Jurnal Ilmu Ekonomi   |   | Metode: OLS   |                  |  |
| 17 | Pengaruh Investasi Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kemiskinan Di Provinsi Bali                          | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada atau tidaknya pengaruh signifikan investasi dan pengangguran terhadap   | Variabel: Investasi, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan                                | 1                | Hasil penelitian menyatakan, secara langsung variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.   |

| No | Judul, Nama dan Tahun Penelitian  | Tujuan Penelitian  | Variabel Penelitian dan model Analisis                     | Hasil Penelitian   |  |
|----|---|--|--|--|--|
|    | Anak Agung Istri Diah Paramita, Ida Bagus Putu Purbadharmaja (2014)<br>E-Jurnal EP Unud   | pertumbuhan ekonomi, untuk menganalisis ada atau tidaknya pengaruh signifikan investasi, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengaruh investasi dan pengangguran terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. | Data: Data sekunder di Bali, Tahun 1993-2013               | 2  | Secara langsung variabel investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.  |
|    | Metode: <i>Path Analysis</i>  |  | 3  | Untuk pengaruh investasi terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan. |  |
|    |   |  | 4  | Untuk pengangguran terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan        |  |
| 18 | Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013<br><br>Ambok Pangiuk, 2018<br><br>Iltizam Journal Of Shariah Economic Research | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan di provinsi Jambi pada tahun 2009-2013  | Variabel: Pertumbuhan Ekonomi, Pengurangan Kemiskinan      | 1  | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Faktor-faktor ini volume pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh paling dominan terhadap kemiskinan karena memiliki nilai terbesar dibandingkan dengan nilai pertumbuhan.   |
|    |   |  | Metode pendekatan kuantitatif, statistik regresi sederhana | 2  | Hasil analisis yang menyatakan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Jambi persentase tertinggi pertumbuhan ekonomi tahun 2009-2013 pada tahun 2011 adalah 8,54%, sedangkan persentase terendah pada tahun 2009 adalah 5,57%. Berdasarkan perkembangan kemiskinan di provinsi Jambi, persentase tertinggi tingkat kemiskinan pada tahun 2009-2013 adalah tahun 2013 yaitu 31,78% dan persentase terendah tahun 2011 adalah 26,04%. |
|    |   |  |  | 3  | Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi, dimana variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan atau nilai kesatuannya terhadap kemiskinan adalah negatif. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi.  |

| No | Judul, Nama dan Tahun Penelitian   | Tujuan Penelitian  | Variabel Penelitian dan model Analisis  | Hasil Penelitian  |   |                                  |
|----|--|--|---|---|---|----------------------------------|
| 19 | Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (studi provinsi-provinsi di Indonesia) | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di Indonesia; 2) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan provinsi-provinsi di Indonesia. | Variabel: PDRB, Ketimpangan pendapatan, Kemiskinan  | 1   | Hasil analisis menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin provinsi-provinsi di Indonesia. |                                  |
|    | Istiqamah, 2018  |  |   | 2   | Hasil analisis menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin provinsi-provinsi di Indonesia. |                                  |
|    | Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan  |  | Data: 34 Provinsi di Indonesia<br>Metode: Regresi data panel  |   |   |                                  |
| 20 | Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009-2018          | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009-2018.   | Variabel: ketimpangan pendapatan; kemiskinan; regresi linier sederhana                              | Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  |   |                                  |
|    | Khoirun Nisa, 2020   |  |   |   |   | Data: Time Series                |
|    | Jurnal Ilmu sosial   |  |   |   |   | Metode: Regresi linear sederhana |
| 21 | Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Terhadap Kemiskinan di Indonesia 2004-2013                           | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah dan menganalisis pengaruh variabel ketimpangan pembangunan antarwilayah, PDRB, investasi dan aglomerasi                           | Variabel: ketimpangan pembangunan, antarwilayah, kemiskinan, Indonesia, PDRB, investasi, aglomerasi | Dari tahun 2004 sampai dengan 2013 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sejalan dengan semakin menurunnya ketimpangan pembangunan antarwilayah. Penurunan ketimpangan ini ditunjukkan dengan Indeks Williamson yang semakin menurun untuk Indonesia bagian barat dan timur. Hasil analisa kuantitatif dengan regresi panel data menemukan bahwa variabel ketimpangan pembangunan dan aglomerasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel PDRB dan investasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hasil itu, pemerintah harus melakukan crash program untuk mengatasi lebih jauh ketimpangan pembangunan, agar kemiskinan dapat |   |                                  |
|    | Ari Mulianta Ginting, 2015   |  |   |   |   | Data: Kualitatif dan Kuantitatif |
|    | Jurnal   |  |   |   |   |                                  |

| No | Judul, Nama dan Tahun Penelitian  | Tujuan Penelitian   | Variabel Penelitian dan model Analisis   | Hasil Penelitian                            |   |
|----|---|---|--|---|---|
|    |   | terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia  |  | menurun lebih signifikan lagi di Indonesia. |   |
| 22 | Pengaruh Reformasi Keuangan dan Desentralisasi Fiskal tentang Tata Kelola Keuangan di Bone, Indonesia | Untuk membahas Pengaruh Reformasi Keuangan dan Desentralisasi Fiskal terhadap Tata Kelola Keuangan di Bone, Indonesia   | Variabel: Reformasi Keuangan, Desentralisasi Keuangan, Tata Kelola Keuangan  | 1   | Bahwa dari enam variabel penelitian, hanya satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap IPM yaitu rasio kesesuaian pengeluaran langsung.  |
|    | Andi Muhammad Iqbal Walinono (2020)   |   | Data: LRA dan IPM Kab. Bone, Tahun 2010-2019   | 2   | Bahwa dari enam variabel penelitian, hanya satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap IPM yaitu rasio kesesuaian pengeluaran langsung.  |
|    | Jurnal Internasional Scopus (Q2)  |   | Metode: statistik deskriptif dan regresi linear berganda   | 3   | IPM Kabupaten Bone tahun 2010-2019 dipengaruhi oleh rasio kesesuaian belanja langsung.  |
| 23 | Analisis Desentralisasi Fiskal, Ketimpangan Pendapatan dan Angka Kemiskinan di Indonesia              | Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan melalui investasi, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan | Variabel: Tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, investasi, dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan anggaran infrastruktur | 1   | Desentralisasi fiskal secara langsung melalui variabel dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan anggaran infrastruktur berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia   |
|    | Andi Muhammad Iqbal Walinono (2022)   |   | Data: Data panel gabungan data dari 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2015-2019  | 2   | Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif secara langsung dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan ketimpangan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia |
|    | Jurnal Internasional Scopus (Q2)  |   | Metode: SEM melalui software Amos  | 3   | Variabel anggaran infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.   |

| No | Judul, Nama dan Tahun Penelitian                    | Tujuan Penelitian  | Variabel Penelitian dan model Analisis   | Hasil Penelitian |  |
|----|---|--|--|------------------|--|
| 24 | Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan di Indonesia | Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dalam hal ini dana perimbangan, dana desa, anggaran infrastruktur dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan melalui variabel investasi, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan. | Variabel: Tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, investasi, dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan anggaran infrastruktur | 1                | Dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, namun secara tidak langsung dana perimbangan melalui investasi, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan   |
|    | Andi Muhammad Iqbal Walinono (2022)                 |  | Data: Data panel gabungan data dari 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2015-2019  | 2                | Dana desa tidak berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui investasi, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan   |
|    | Jurnal Internasional Scopus (Q2)                    |  | Metode: model persamaan struktural ekonometrika dalam program views 12   | 3                | Anggaran infrastruktur berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan secara langsung dan secara tidak langsung berpengaruh negatif signifikan melalui investasi, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan  |
|    |   |  |  | 4                | Inflasi secara langsung berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, secara tidak langsung berpengaruh tidak signifikan melalui investasi, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan, tetapi inflasi secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan |